

# DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KOTA BLITAR TAHUN 2020

ZAINAL ABIDIN ACHMAD, ENDAH SISWATI, AGUS WAHYUDI,  
SYIFA SYARIFAH ALAMIYAH, JUWITO



ISBN 978-623-6677-37-7



**DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
KOTA BLITAR  
TAHUN 2020**

**Penyusun:**

Zainal Abidin Achmad

Endah Siswati

Agus Wahyudi

Syifa Syarifah Alamiyah

Juwito



# **DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KOTA BLITAR TAHUN 2020**

## **Penyusun:**

Zainal Abidin Achmad  
Endah Siswati  
Agus Wahyudi  
Syifa Syarifah Alamiyah  
Juwito

## **Editor:**

Zainal Abidin Achmad & Devi Nasution

## **Cover & Layout:**

Devi Nasution

## **Kontributor:**

Fera Tara Batari  
Vera Hayu Masruroh

# DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KOTA BLITAR TAHUN 2020

Copyright ©PenerbitSahaja

Penyusun: Zainal Abidin Achmad, Endah Siswati, Agus Wahyudi, Syifa Syarifah Alamiyah dan Juwito

Penyunting: Zainal Abidin Achmad & Devi Nasution

Penyelia Naskah: Ihdina Sabili

Desain Sampul: Devi Nasution

Penata Letak: Devi Nasution

ISBN 978-623-6677-37-7

14 x 21 cm; 180 halaman

Cetakan ke-1, Juni 2021

Sahaja. 2021.0015

## Penerbit Sahaja

Perumahan ITS Blok T-45, Keputih, Sukolilo, Surabaya

Surel : [penerbitsahaja@gmail.com](mailto:penerbitsahaja@gmail.com)

Telp: 081333754212

Facebook dan IG : Sahajabuku

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 1997, bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diselesaikannya Laporan Antara (Fakta dan Analisis) Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2020. Laporan Antara ini disusun untuk mempersiapkan penyusunan buku “Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2020” sebagai bagian dari rencana dan pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar.

Kota Blitar menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia pada pembangunan politik di daerahnya. Pada setiap penyusunan data IDI, seluruh pemangku kepentingan politik di Kota Blitar bekerjasama secara sinergis sebagai wujud kepedulian yang tinggi untuk pencapaian kondisi demokrasi yang baik. Unsur-unsur pemerintahan seperti Bappeda; Bakesbangpol dan PBD; BPKAD; Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Humas dan Protokol); Sekretariat DPRD; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Unsur Pertahanan dan Keamanan (Kodim 0808 dan Polres). Unsur lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum (KPU dan Bawaslu). Unsur media massa cetak dan daring (Radar Blitar, Memorandum, Blitarkota.go.id, harianbhirawa.co.id, mayangkanews.com, dan beberapa media massa lainnya). Unsur akademisi (dosen), organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi buruh, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Semua pihak terlibat dalam penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2020 ini, dengan memberikan dukungan terhadap proses pengumpulan data yang akurat di lapangan demi menjaga kualitas pengukuran skor IDI kota Blitar.

Sejak Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi pada tahun 2009, melalui Kemenko Polhukam sebagai *leading sector* bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri, hal ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik. Upaya ini perlu mendapat dukungan segenap masyarakat, mengingat cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi domain perhatian pemerintah tetapi juga mensyaratkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Dari 34 provinsi di Indonesia yang berkomitmen untuk melakukan utilisasi IDI, hanya Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Jawa Timur yang mendorong utilisasi IDI pada tingkat kota/kabupaten. Kota Blitar merupakan pelopor utilisasi IDI pada tingkat kota/kabupaten di Indonesia yang mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Ahli IDI Pusat dan BPS Pusat. Kota Blitar adalah kota pertama di Indonesia yang menempatkan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sejak tahun 2017.

Laporan Antara Penyusunan Data IDI di kota Blitar Tahun Data 2020 ini menyajikan tahapan dan metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia, serta memberikan kesamaan pemahaman kepada para pihak yang terkait dengan pengumpulan data IDI. Terutama pemahaman pada jenis berita dan jenis dokumen dan pengelolaannya. Berbagai berita dan dokumen tersebut akan dianalisis berdasarkan aspek, variabel dan indikator dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. Metode pengumpulan data diperoleh dari berita-berita di media massa cetak dan daring, serta berbagai dokumen yang bersumber dari para pemangku kepentingan yang menjadi pendukung data utama.

Untuk memperkuat fakta dan analisis, dibutuhkan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. Hasil laporan akhir analisis nantinya ditampilkan dalam bentuk buku yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai landasan penyusunan program-program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Blitar yang terkait dalam pembangunan politik. Tujuan bersamanya adalah untuk memperkuat kinerja demokrasi Kota Blitar dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial, politik, hukum dan keamanan yang mempengaruhi skor Indeks Demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, semua kebijakan politik dan program kerja yang dibuat oleh seluruh pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari Penyusunan Data IDI Kota Blitar ini, dapat bersinergi dan saling dukung demi terwujudnya kinerja demokrasi yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Antara yang berisikan fakta dan analisis ini masih jauh dari sempurna. Kami mengharapkan berbagai masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2020.

Kota Blitar, 2021

Tim Penyusun



# DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTARTABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Target.....	3
1.4. Dasar Hukum.....	3
<b>BAB 2 TEORI DAN KONSEP.....</b>	<b>6</b>
2.1. Landasan Konseptual Indeks Demokrasi Indonesia.....	6
2.2. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.....	8
2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil.....	11
2.2.2. Aspek Hak-Hak Politik.....	11
2.2.3. Aspek Institusi Demokrasi.....	12
2.3. Gambaran Umum Kota Blitar.....	13
2.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar.....	14
2.3.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	14
2.3.1.2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	15
2.3.2. Hukum dan Kriminalitas.....	15
2.3.3. Agama.....	15
2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja.....	15
<b>BAB 3 METODOLOGI.....</b>	<b>16</b>
3.1. Metode Pengumpulan Data.....	16
3.1.1. Review Media dan Review Dokumen.....	16
3.1.2. Focus Group Discussion (FGD).....	18
3.1.3. Wawancara Mendalam.....	18
3.2. Peran Kelompok Kerja (POKJA) IDI.....	20
<b>BAB 4 REVIEW MEDIA.....</b>	<b>21</b>
4.1. BeritadiMedia Cetak dan Media Daring.....	21
4.2. Rangkuman Peristiwa bulan Januari hingga Juni 2020.....	22
4.2.1. Analisis Isi Berita Media Massa pada Semester I (Januari-Juni 2020).....	27
4.3. Rangkuman Peristiwa bulan Juli hingga Desember 2020.....	41
4.3.1. Analisis Isi Berita Media Massa pada Semester (Juli-Desember 2020).....	79

<b>BAB 5 REVIEW DOKUMEN.....</b>	<b>124</b>
5.1. Aspek Kebebasan Sipil.....	124
5.1.1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.....	124
5.1.2. Kebebasan Berpendapat.....	125
5.1.3. Kebebasan Berkeyakinan.....	125
5.1.4. Kebebasan dari Diskriminasi.....	126
5.2. Aspek Hak-Hak Politik.....	126
5.2.1. Hak Memilih dan Dipilih.....	127
5.2.2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.....	131
5.3. Aspek Lembaga Demokrasi.....	132
5.3.1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil di Kota Blitar.....	133
5.3.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar.....	139
5.3.3. Peran Partai Politik di Kota Blitar.....	141
5.3.4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.....	143
5.3.5. Peradilan yang Independen.....	148
<b>BAB 6 HASIL PENGHITUNGAN SKOR IDI KOTA BLITAR TAHUN 2020.....</b>	<b>149</b>
6.1. Perkembangan Indeks Aspek IDI.....	149
6.2. Perkembangan Indeks Variabel IDI.....	150
6.3. Perkembangan Skor Indikator IDI.....	151
6.4. Penjelasan Teknis.....	153
<b>BAB 7 PENUTUP.....</b>	<b>159</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>160</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>162</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia.....	9
Tabel 2: Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2019 (Dapil 1: Kecamatan Kepanjen Kidul).....	133
Tabel 3: Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Dapil 2 Kecamatan Sanan Wetan) .....	134
Tabel 4: Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2014 (Dapil 3 Kecamatan Sukorejo) .....	135
Tabel 5: Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2019.....	136
Tabel 6: Komposisi Anggota DPRD Kota Blitar 2014-2019.....	139
Tabel 7: Komposisi Pengurus Perempuan pada Partai-partai Politik di Kota Blitar Tahun 2019.....	142
Tabel 8: Komponen Penghitungan IDI Kota Blitar, 2017-2019.....	155
Tabel 9: Skor Aspek, Variabel dan Indikator IDI Kota Blitar, 2018-2020.....	156

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Wilayah Kota Blitar (Sumber: BPS Kota Blitar, 2020).....	13
Gambar 2: Hasil Unggahan RKA SKPD Tahun 2020.....	146
Gambar 3: Hasil Unggahan RKA PPKD Tahun 2020.....	146
Gambar 4: Hasil Unggahan Raperda APBD Tahun 2020.....	146
Gambar 5: Hasil Unggah Raperda Perubahan APBD Tahun 2020.....	147
Gambar 6: Hasil Unggah Perda tentang APBD Kota Blitar Tahun 2020.....	147
Gambar 7: Hasil Unggahan Perda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2020.....	147
Gambar 8: Hasil Unggahan Daftar DPA SKPD Kota Blitar Tahun 2020.....	148
Gambar 9: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2020.....	148
Gambar 10: Perkembangan Indeks Aspek IDI Kota Blitar, 2018-2020.....	150
Gambar 11: Perkembangan Indeks Variabel IDI Kota Blitar.....	151

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas. Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Adanya IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi perkembangan ekonomi yang

sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi. IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangan demokrasinya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data- data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakat untuk mengevaluasi diri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan perkembangan demokrasi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tujuan utama dari penyusunan IDI adalah menyediakan data kuantitatif berkaitan dengan kinerja demokrasi di masing- masing provinsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah data indeks demokrasi Indonesia dapat dikumpulkan di tingkat kota dan kabupaten dan apakah kemudian data tersebut dapat digunakan untuk deteksi dini kondisi demokrasi di tingkat kabupaten atau kota? Untuk itu, kehadiran dari "Data Indeks Demokrasi di Kota Blitar Tahun 2020" ini menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat memberi arahan dalam menjawab pertanyaan di atas.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar**

Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar tahun 2020 ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di kota Blitar. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut akan terlihat kondisi demokrasi kota Blitar sesuai dengan ketiga aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Mengingat data dan informasi yang dikumpulkan adalah data-data di kota Blitar, maka data IDI yang disusun ini adalah bersumber dari keseluruhan fakta dan peristiwa sosial, politik, hukum, dan keamanan yang terjadi di kota Blitar sepanjang tahun 2020. Melalui proses analisis yang mendasarkan pada aspek, variabel dan indikator IDI, maka data ini akan bermanfaat untuk mengantisipasi dan mendeteksi peristiwa sosial, politik, hukum, dan keamanan yang akan terjadi pada tahun mendatang, sehingga kinerja demokrasi Kota Blitar dapat berlangsung semakin positif atau membaik.

### **1.3. Target Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar**

Sedikitnya ada 3 (tiga) target utama dari penyusunan Data Indeks Demokrasi Kota Blitar ini, yaitu:

1. Memberikan paparan kondisi dan peristiwa demokrasi selama tahun 2020 di kota Blitar berdasarkan data dari institusi terkait dan berita di media massa.
2. Memberikan arahan tentang metode “pengintegrasian” IDI ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Blitar.
3. Memberikan arahan tentang teknik penerapan IDI kedalam program, dan/atau kegiatan pemerintah daerah Kota Blitar.

### **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2020, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
6. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik;
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4967);
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang No 11 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;

10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Blitar.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peratuan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peratuan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G);



20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## **BAB 2**

### **TEORI DAN KONSEP**

#### **2.1. Landasan Konseptual Indeks Demokrasi Indonesia**

Secara umum, definisi demokrasi yang ideal atau disebut sebagai definisi populistik adalah sebuah sistem pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Namun, pada tingkat kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl, 1971; Coppedge and Reinicke, 1993).

Berangkat dari sejumlah kelemahan tersebut, maka Robert A. Dahl (1971), mengusulkan konsep “poliarki” sebagai pengganti dari konsep “demokrasi populistik”. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang” bukan oleh “semua orang.”

Demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: Adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk 1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, 2) berekspresi atau berpendapat, 3) menjadi pejabat publik, 4) persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, 5) memberikan suara dalam pemilihan umum, 6) ada pemilihan umum yang jujur, 7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan 8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl, 1971).

Pada bagian lain, William Case (2013), membedakan ada dua kategori utama demokrasi ketika dikaitkan dengan konsepsi ideal dari demokrasi itu sendiri. Dua model demokrasi yang dimaksud adalah: *Substantive Democracy* dan *Procedural Democracy*. Karakteristik dari model yang pertama (*Substantive Democracy*), antara lain, ditandai oleh

adanya persamaan antar kelas, etnik, gender, dan bentuk-bentuk lain dari identitas atau afiliasi dalam masyarakat. Model yang disebut pertama ini, secara esensial, banyak merujuk pada model “demokrasi ideal”, atau konsep demokrasi populis. Sedangkan, karakteristik dari model yang kedua (*Procedural Democracy*), antara lain, ditunjukkan oleh adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler (Case, 2013). Model ini sejatinya memiliki banyak kesamaan dengan model *polyarchy*, sebagaimana diusulkan oleh Robert A. Dahl.

Kendati tidak dikemukakan secara eksplisit, William Case terlihat mendukung konsep *polyarchy*—dalam pengertian, sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang” bukan oleh “semua orang”—sebagai model yang paling realistis dalam kehidupan nyata. Namun demikian, bagi negara-negara sedang berkembang, pada khususnya, sebelum mencapai model *polyarchy* tersebut, tampaknya terlebih dahulu harus berhadapan dengan salah satu dari dua varian *Procedural Democracy*, yaitu: *Semi-Democracy* dan *Pseudo-Democracy*. Secara umum, *Semi-Democracy* dicirikan oleh antara lain, dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, tetapi pada sisi lain, kebebasan sipil sangat dibatasi. Oleh karenanya, pada praktik *Semi-Democracy*, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas. Lebih spesifiknya, ditulis sebagai berikut:

*“[In a semi-democracy practice], ... government regularly hold elections, thus offering a snapshot of propriety on voting day. But they have limited civil liberties beforehand, thereby hindering opposition parties in contesting effectively. More specifically, opposition parties are permitted to organize, operate head-quarters, solicit contributions, select their own leaders and candidates, and then recruit cadres and core constituencies. On the other hand, they are prevented from reaching wider audiences by the government's owning most media outlets, they are restricted in circulating their own party publications, and they are barred from organizing mass rallies, even daring campaign periods” (Case, 2013).*

Sementara, karakteristik dari *Pseudo-Democracy*, antara lain, juga ditunjukkan oleh dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan sipil nyaris dimatikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat ketat dikontrol oleh pihak pemerintah.

Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki otonomi, karena dominannya hegemoni pemerintah, baik pada pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukan personil pengurus, rekrutmen kader, maupun dalam hal keuangan partai (Siswati, 2018). Dalam narasi yang lebih elaboratif, William Case (2013) mendeskripsikan karakteristik dari *Pseudo-Democracy* sebagai berikut:

*"Beyond semi-democracies, one find pseudo-democracies, a category in which elections are also held regularly. However, these elections are rigged, while civil liberties are nearly extinguished, with rights of expression, information, and assembly all rigidly controlled. But the most striking qualitative difference between semi and pseudo-democracies appears in the respective approaches taken toward opposition parties. Put simply, in pseudo-democracies, opposition parties are permitted no autonomy, with governments interfering deeply in their formation, organizational structure, selection of officers and candidates, fund-raising, and campaigning. Thus, while opposition parties may win legislative seats, they are barred from performing even limited accountability functions."*

Akhirnya, dengan mempertimbangkan serangkaian ulasan teoritis diatas, maka definisi demokrasi, bila boleh disederhanakan, sejatinya tidak lain adalah sistem pemerintahan yang ditandai oleh, antara lain, adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik (Bollen, 1993). Karena kebebasan sipil merupakan salah satu "inti" dari konsepsi demokrasi, *Freedom House*, menggunakan "kebebasan", bukan "demokrasi", untuk menggambarkan tingkat demokrasi di negara- negara di dunia (Gastil, 1993).

Pada bagian lain, dengan merujuk pada ciri-ciri pokok sistem demokrasi dari Dahl (1971), Gastil (1993) dan juga Bollen (1993) kemudian membedakan konsep demokrasi, poliarki, atau kebebasan itu ke dalam dua dimensi atau aspek: Hak-hak politik (*Political Rights*) dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*).

## **2.2. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia**

Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), disepakati sedikitnya ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik

(*Political Rights*), dan Institusi Demokrasi (*Institution of Democracy*). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberty* dan *political rights*) tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, maka dalam penyusunan IDI, *institusi demokrasi*, telah didudukkan sebagai aspek ketiga.

**Tabel 1: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia**

Aspek	Variabel	Indikator
Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
	2. Kebebasan Berpendapat	3. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, 4. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
	3. Kebebasan Berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya 6. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama, 7. Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat thd Kelompok Masyarakat Lain terkait Ajaran Agama,
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 9. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 10. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,

<b>Hak-Hak Politik</b>	5. Hak Memilih dan Dipilih	11. Hak memilih atau dipilih terhambat 12. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 14. Voters turnout 15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	16. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
<b>Lembaga Demokrasi</b>	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 19. Kecurangan dalam penghitungan suara
	8. Peran DPRD	20. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
	9. Peran Partai Politik	23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu 24. Persentase perempuan pengurus partai politik
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
	11. Peradilan yang Independen	27. Keputusan hakim yang kontroversial 28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Tiga aspek tersebut, kemudian telah diturunkan kedalam 11 (sebelas) variabel, dan selanjutnya, untuk mendapatkan data serta informasi berkaitan dengan sebelas variabel tersebut, maka telah dirumuskan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator IDI. Selengkapny dapat dilihat dalam tabel di atas.

### 2.2.1. Aspek Kebebasan Sipil

Secara teoritis, konsep *civil liberty* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* (Bealey, 1999). Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberty*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat (*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/ beribadah (*worship*) (Bealey, 2000).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberties*) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
2. Kebebasan Berpendapat,
3. Kebebasan Berkeyakinan, dan
4. Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama

### 2.2.2. Aspek Hak-Hak Politik

Mengingat pentingnya aspek hak-hak politik (*political rights*) ini, maka Robert A. Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Hak-hak politik sejatinya mencakup partisipasi dan kompetisi, sebagaimana secara implisit terdapat dalam pernyataan berikut:

*"Political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives (Bollen, 1993)."*

Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Politik, dan
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan.

### 2.2.3. Aspek Institusi Demokrasi

Kendati kata "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealy, 2000). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis (Achmad, 2020a).

Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur"— meliputi, antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur"— seperti misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, media massa (pers), dan kelompok kepentingan. Memaknai institusi demokrasi, di dalamnya termasuk tarik menarik kepentingan politik, perebutan basis massa politik (Wahyudi, 2013), persaingan elit politik di lingkaran legislatif dan eksekutif dan kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen (Suwarko, 2014).

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek institusi demokrasi pun telah dioperasionalkan kedalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Peran Partai Politik, dan
4. Peradilan yang Independen.



### 2.3. Gambaran Umum Kota Blitar

Gambaran umum kota Blitar ini merujuk pada data yang diperoleh dari BPS Kota Blitar dalam Statistik Daerah Kota Blitar Tahun 2020 (BPS Kota Blitar, 2020). Artinya, keseluruhan gambaran umum pada paparan ini adalah potret dari kondisi Kota Blitar di tahun 2020.

Selain gambaran kondisi geografis dan kewilayahan, bidang-bidang yang ditampilkan dalam gambaran umum ini adalah bidang yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, antara lain: pemerintahan (birokrasi, parlemen, PNS), hukum dan kriminalitas (kejaksaan, pengadilan, kepolisian), sosial kemasyarakatan (agama), industri dan tenaga kerja (jenis industri dan jumlah tenaga kerja).

Secara geografis, kota Blitar terletak pada koordinat  $112^{\circ}14'$  –  $112^{\circ}28'$  Bujur Timur dan  $8^{\circ}2'$  –  $8^{\circ}8'$  Lintang Selatan, tepatnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Jarak tempuh dari ibukota Propinsi Jawa Timur  $\pm$  160 km ke arah Barat Daya.



Gambar 1: Peta Wilayah Kota Blitar (Sumber: BPS Kota Blitar, 2020)

Kabupaten Blitar adalah satu-satunya kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar karena posisi Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Adapun kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan kulon, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Nglegok.

Dengan luas wilayah yang hanya 32,59 km<sup>2</sup>, Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur, setelah Kota Mojokerto. Secara administratif Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi kedalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km<sup>2</sup>.

### **2.3.1. Pemerintahan di Kota Blitar**

Secara administratif wilayah Kota Blitar terbagi dalam 3 Kecamatan yang masing-masing terdiri atas 7 Kelurahan, sehingga total Kelurahan di Kota Blitar sebanyak 21 Kelurahan. Setiap kelurahan terbagi lagi kedalam wilayah RW dan RT. Pada tahun 2019 jumlah RW dan RT di Kota Blitar adalah 188 RW dan 649 RT, masih sama dengan tahun sebelumnya.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km<sup>2</sup>. Adapun kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas 2,68 km<sup>2</sup>. Sementara Kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo yaitu 0,51 km<sup>2</sup>. Setiap kelurahan dikepalai oleh Lurah yang dibantu oleh 5 orang perangkat kelurahan.

Dari total 99 perangkat kelurahan di Kota Blitar, pada tahun 2020, sebesar 72,7 persen sudah berpendidikan Diploma/S1 dan sisanya berpendidikan SLTA.

#### **2.3.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar hasil pemilu 2019 sebanyak 25 orang dan didominasi oleh anggota dari PDI-P yaitu sebanyak 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB sebanyak 4 orang, PPP menempati urutan ketiga sebanyak 3 orang, disusul oleh Gerindra, Demokrat dan Golkar dengan masing-masing 2 anggota. Berikutnya dari Partai Hanura dan PKS masing-masing 1 anggota. Aspirasi kaum perempuan diharapkan dapat terwakili oleh 3 srikandi DPRD Kota Blitar yang masing-masing berasal dari PDI Perjuangan, PKB, dan PKS.

DPRD Kota Blitar terdiri dari 3 Komisi. Komisi I terdiri dari 8 anggota membidangi pemerintahan. Komisi II terdiri dari 7 anggota membidangi Perekonomian dan Keuangan. Komisi III terdiri dari 7 anggota membidangi Pembangunan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 kegiatan DPRD yang paling banyak adalah rapat komisi sebesar 29,47 persen dari total

kegiatan seluruhnya. Sedangkan produk yang dihasilkan sebanyak 22 produk hukum yang terdiri atas 6 peraturan daerah, 13 keputusan DPRD dan 3 keputusan pimpinan DPRD

### **2.3.1.2. Pegawai Negeri Sipil**

Data BPS Tahun 2020 menunjukkan bahwa komposisi PNS pada tahun 2019 adalah PNS pria sebanyak 1.320 orang dan wanita sebanyak 1.612 orang. Kualitas SDM dilingkungan Pemerintah Kota Blitar diupayakan selalu yang terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah PNS dengan pendidikan tertinggi minimal D4/S1 yang mencapai 59 persen dari total pegawai.

### **2.3.2. Hukum dan Kriminalitas**

Data Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kejadian kriminal yang dilaporkan di Satreskrim Polres Blitar Kota sepanjang tahun 2019 sebanyak 221 kasus dan 50,68 persen diantaranya merupakan kasus dari Kota Blitar dan sisanya berasal dari beberapa kecamatan Kabupaten Blitar yang juga berada di bawah kewenangan Polres Blitar Kota.

Sedangkan kejahatan narkoba yang dilaporkan dan diselesaikan selama tahun 2019 sebanyak 98, meningkat 338 persen dibanding tahun sebelumnya.

### **2.3.3. Agama**

Data Kota Blitar Dalam Angka 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Blitar beragama Islam dengan jumlah pemeluk mencapai 92 persen dari total penduduknya. Sedangkan sisanya beragama katolik (4 persen), Kristen (4 persen). Pemeluk agama lain seperti Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya sebesar 0 persen.

### **2.3.4. Industri dan Tenaga Kerja**

Menurut Data Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Blitar tahun 2019 mencapai 72,06 persen. Pada tahun 2019 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 4,64 persen.

Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2020 menyatakan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Blitar sebesar 16,58 persen, Upah Minimum Regional (UMR) juga mengalami kenaikan sebesar 8,5 persen. Bicara UMR berarti bicara antara kebutuhan pekerja untuk mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan kemampuan perusahaan untuk membayar pekerjanya.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

#### **3.1. Metode Pengumpulan Data**

Pilihan atas teknik-teknik pengumpulan data, tentunya, sangat ditentukan oleh, antara lain, sifat penelitian yang dilakukan, dan jenis data yang diperlukan. Atas dasar pertimbangan ini, maka dalam konteks penyusunan IDI, disepakati bahwa teknik pengumpulan data menerapkan apa yang dikenal dengan metode triangulation (Denzin & Lincoln, 2005), yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif.

Untuk lebih spesifiknya, ada 4 (empat) metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI, yaitu: review media (analisis isi berita surat kabar dan media daring), review dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam (in-depth Interview).

Mengapa empat metode tersebut dipilih, dan apa relevansinya terhadap proses penyusunan IDI akan menjadi fokus bahasan pada diskusi berikut.

##### **3.1.1. Review Media dan Review Dokumen**

Review media dan review dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi yang paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun, 2020) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI.

Medialah yang merekam kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi selama satu tahun secara terus menerus, dari hari ke hari. Atas dasar pertimbangan ini, maka juga cukup beralasan bila kemudian data hasil review media dan dokumen dijadikan sebagai basis utama dalam penyusunan IDI.

Studi media dilakukan dengan cara mengumpulkan, mendata, dan mengklasifikasikan berita-berita sosial politik, hukum, pemerintahan, keamanan, keagamaan, dan kehidupan demokrasi yang dimuat di media massa lokal (surat kabar dan media daring). Media massa yang direview untuk Penyusunan Data Indeks Demokrasi di Kota Blitar tahun 2020 adalah Radar Blitar (Jawa Pos), Harian Surya, MayangkaraNews.Com. dan Bhirawa.Com.

Penelusuran pada berbagai media tersebut dimaksudkan untuk menyusuri sebanyak mungkin berita dan informasi yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI di Kota Blitar, sekaligus sebagai sarana untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan uji triangulasi sumber. Meskipun demikian, media massa yang menjadi acuan utama tetap media yang secara umum diakui kredibilitasnya.

Sementara untuk jenis dokumen, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD—seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan DPRD, rekomendasi DPRD—serta dokumen-dokumen resmi lainnya—seperti data demonstrasi dari Kepolisian, data APBD dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.

Studi Dokumen (mengumpulkan, mendata, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, kepolisian, LSM dan lembaga lain yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi). Berbagai lembaga yang disasar dalam kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar antara lain adalah:

- Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar
- Sekretariat DPRD Kota Blitar
- Humas Pemerintah Kota Blitar
- Bappeda Kota Blitar
- Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Blitar
- Bakesbangpol dan BPD Kota Blitar
- BPS Provinsi Jawa Timur
- BPS Kota Blitar
- Pengadilan Negeri Kota Blitar
- Kejaksaan Negeri Kota Blitar
- Kepolisian Resort Kota Blitar
- Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
- Bawaslu Kota Blitar
- PTUN Surabaya
- LSM (Sapuan-Sahabat Perempuan dan Anak).

Studi media dan studi dokumen (media and document review), dalam kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi (IDI) di Kota Blitar, dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama. Pertimbangannya adalah karena keduanya merupakan cara menggali informasi yang paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun/2020 berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Lebih jauh, media adalah perekam denyut kehidupan dan proses demokrasi di daerah, selama satu tahun, dari hari ke hari, sehingga sangat relevan jika data hasil studi media dan dokumen dijadikan basis utama dalam penyusunan IDI.

### **3.1.2. Focus Group Discussion (FGD)**

Dalam kaidah penelitian ilmiah, FGD termasuk pada kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Sebagai salah satu dari teknik pengumpulan data, maka FGD dapat berperan sebagai metode utama, atau bila mengaplikasikan lebih dari satu teknik pengumpulan data, FGD dapat berperan sebagai komplementer terhadap metode lainnya. Pilihan atas peran ini, antara lain, sangat ditentukan oleh apa tujuan dari FGD itu sendiri dilakukan.

Mengingat proses pengumpulan data dalam penyusunan IDI itu sendiri menggunakan lebih dari satu metode—dan di antara metode-metode tersebut, review media dan dokumen difunkan sebagai basis utama dalam menjanging data kuantitatif—maka peran dari FGD dalam hal ini lebih difungsikan sebagai “komplementer” terhadap metode pengumpulan data melalui review media dan dokumen.

Secara umum, tujuan utama dari aplikasikannya FGD adalah untuk menjanging data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Namun demikian, secara lebih khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD pada kontek pengumpulan data IDI. Pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

### **3.1.3. Wawancara Mendalam**

Sama halnya dengan FGD, wawancara mendalam (in-depth interview) dalam kaidah penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Secara umum, teknik wawancara mendalam,

biasanya dilakukan dengan tujuan, antara lain: (1) mengkonstruksi kejadian, perasaan, dan motivasi, (2) me-rekonstruksi kejadian yang dialami pada masa lalu; (3) memproyeksi hal-hal yang diharapkan kedepan; dan (4) memverifikasi data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain (Moleong, 2005). Pada dimensi yang lebih khusus, yakni dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, teknik In-depth Interview umumnya digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam—atau melakukan eksplorasi atas pandangan/perspektif narasumber—berkaitan dengan isu-isu yang sedang diteliti (Guion, 2006; Berry, 1999).

Pada konteks penyusunan IDI, In-depth Interview diaplikasikan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman-pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media, review dokumen dan FGD. Oleh karenanya, cukup beralasan jika kemudian Focus Group Discussion dalam kegiatan penyusunan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar, lebih difungsikan sebagai metode komplementer terhadap metode pengumpulan data utama (studi media dan dokumen). Secara umum, tujuannya adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan secara khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD dalam proses pengumpulan data IDI. Pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

Secara keseluruhan, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana logika keterkaitan diantara 4 (empat) metode pengumpulan data, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dirancang untuk kepentingan penyusunan IDI? Dengan singkat, "benang merah" keterkaitan diantara empat metode pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dua metode yang pertama (review media dan review dokumen) berperan sebagai basis utama dalam penjaringan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data-data kuantitatif yang telah terekam melalui review media dan review dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dijarah melalui dua metode berikutnya (FGD dan In-depth Interview). Dengan demikian, cukup jelas tergambarkan sekarang, bahwa sejatinya "skor akhir" dari masing-masing indikator IDI akan ditetapkan dengan bertumpu pada

data kuantitatif yang diperoleh melalui dua metode yang pertama (review media dan review dokumen) serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan In-depth Interview).

### **3.2. Peran Kelompok Kerja (POKJA) IDI**

Pada seluruh rangkaian proses membaca, memaknai dan mengumpulkan data-data untuk IDI, maka peran POKJA sangat menentukan. Artinya, POKJA diharapkan dapat memainkan peran utama dalam bersama-sama menganalisis dan memaknai IDI di Kota Blitar. Melalui peran ini, maka POKJA IDI diyakini akan mampu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kinerja demokrasi di wilayah Kota Blitar serta mampu berperan sebagai “motor” penggerak dalam merumuskan “Tema Program” dan “Kegiatan” dalam rangka peningkatan kinerja demokrasi di Kota Blitar pada tahun berikutnya.



## **BAB 4**

### **REVIEW MEDIA**

#### **4.1. Berita di Media Cetak dan Media Daring**

Pada penyusunan data IDI Kota Blitar tahun 2020 ini, media yang dipilih bukan hanya media cetak surat kabar, tetapi juga media berita daring. Untuk surat kabar yang dipilih adalah: Radar Blitar (Jawa Pos) dan harian Memorandum dengan pertimbangan memiliki oplah terbesar dan jumlah pembaca terbanyak di Kota Blitar. Sedangkan untuk media daring, yang dipilih adalah: harianbhirawa.co.id dan Mayangkaranews.com, dengan pertimbangan memiliki halaman berita khusus untuk Kota Blitar dan memiliki jumlah berita terbanyak tentang Kota Blitar.

Berita-berita yang dipilih adalah peristiwa politik, pemerintahan, hukum, dan sosial di Kota Blitar, yang secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Demokrasi Indonesia. Sehingga berita yang di review adalah yang bersinggungan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia saja.

Melakukan review bukan sekedar membaca namun berupa menemukan, memaparkan dan menganalisis. Review media dilakukan per 3 (tiga) bulan dan terdapat kemungkinan dalam bulan tertentu tidak ada berita yang berhasil ditemukan dan tidak layak untuk dianalisis karena tidak mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan oleh Shoemaker dan Reese (1996) bahwa melakukan analisis terhadap konten media merupakan bagian dari penelitian kualitatif karena media berisikan fenomena, informasi, sumber yang dikutip atau dirujuk, dan konteks. Dan salah satu fungsi review media adalah melakukan sebagian tugas analisis konten dengan melakukan telaah urutan peristiwa dan memahami maknanya (Macnamara & R., 2005). Analisis isi media memiliki pendekatan humanis, karena konten media merupakan cerminan masyarakat dan budaya (Achmad, 2009). Secara pendekatan behavioristik, analisis isi media dapat melihat dampak dari pemberitaan terhadap masyarakat (Wiranata, Mardiyah, & Achmad, 2016).

## 4.2. Rangkuman Peristiwa bulan Januari hingga Juni 2020

\*Isi berita yang sama pada hari yang sama dijadikan satu

No.	Tgl*	Aktor	Issue/Aktivitas	Dampak	Sumber	Kaitan IDI
1	08/01/2020	KPU Kota Blitar	KPU menyiapkan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilwali 2020 yang akan dimulai bulan Januari-Februari 2020.	Proses rekrutmen memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.	Blitarkota.go.id	Tidak ada
2.	08/01/2020	KPU Kota Blitar, DPC, GMNI, HMI, Dispora.	KPU libatkan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi partisipasi politik pada Pilwali 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>KPU mendorong mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan politik.</li> <li>Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Blitar.</li> </ul>	Blitarkota.go.id	Dukungan indikator 14
3.	08/01/2020	Ketua dan Anggota DPRD, Anggota Paguyuban Cafe dan Karaoke	DPRD Kota Blitar dan Paguyuban Cafe dan Karaoke Kota Blitar melakukan <i>Hearing</i> di DPRD, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim).	DPRD Kota Blitar mendesak Pemkot Blitar untuk segera mengambil tindakan terkait pembukaan cafe dan karaoke di Blitar sesuai peraturan perizinan	Blitarkota.go.id	Poin indikator 17
4	16/01/2020	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Blitar (Muhaeni)	Lebih dari 6000 pemilih pemula di kota Blitar ditargetkan selesaikan perekaman KTP-el sebelum Pilwali kota Blitar 2020. Dispendukcapil bekerja ekstra; penggunaan strategi jemput bola; sekitar 6072 pemilih pemula bisa selesaikan pembuatan KTP-el sebelum Pilwali Kota Blitar 2020 dilaksanakan.	Hak pilih masyarakat (pemilih pemula) dalam Pilwali 2020 terjamin.	Maya ngkara News, blitar. go.id	Dukungan indikator 13
5	25/01/2020	Ketua Bawaslu Kota Blitar (Bangang Arintoko)	Bawaslu petakan potensi kerawanan perekrutan anggota PPK Pilwali Kota Blitar 2020. Anggota PPK harus benar-benar memenuhi syarat agar Pilwali dapat berlangsung dengan adil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecurangan dalam Pilkada/Pilwali dapat dicegah.</li> <li>Pilkada/Pilwali 2020 dapat berlangsung secara jurdil dan damai.</li> </ul>	Blitarkota.go.id	Cegah indikator 19

6	27/01/2020	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Blitar (Muhaeni)	Dispendukcapil kebut perekaman e-KTP untuk pemilih pemula. Dispendukcapil dan dinas pendidikan bekerja sama dalam pembuatan e-KTP dari sekolah.	Hak pilih masyarakat (pemilih pemula) dalam Pilwali 2020 terjamin.	Blitarkota.go.id	Dukungan indikator 14
7.	31/01/2020	Komisiner KPU Kota Blitar, 3 Duta Pemilih Pemula dan 3 Duta Pemilih Muda).	KPU Kota Blitar, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM (Rangga Bisma) libatkan 3 Duta Pemilih Pemula dan Pemilih Muda di Pilwali 2020 untuk berpartisipasi dalam program KPU <i>Goes to School and Campus</i> dalam rangka membantu KPU melakukan sosialisasi Pilwali 2020.	Partisipasi politik masyarakat meningkat khususnya di kalangan pemilih pemula dan pemilih muda.	Blitarkota.go.id	Dukungan indikator 14
8.	04/02/2020	Kasubid Hubungan Lembaga Kemasyarakatan, (Bakesbangpol PBD) Kota Blitar	Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol PBD) Kota Blitar (Sumarno S. Sos): Pemkot Blitar pastikan semua Ormas dan LSM di Kota Blitar berbadan hukum resmi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul terjamin dan terlindungi.</li> <li>Partisipasi masyarakat (Ormas dan LSM di Kota Blitar) dalam politik dan pembangunan meningkat.</li> </ul>	Blitarkota.go.id	Cegah indikator 1 dan 2. Dukung indikator 17
9.	04/02/2020	KPU Kota Blitar, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.	KPU Kota Blitar menjalin kerja sama dengan 3 kampus di Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pilwali 2020. (Komisiner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM (Rangga Bisma),	Mahasiswa Blitar yang berkuliah di Malang dijamin bisa pulang ke Blitar untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilwali 2020.	Blitarkota.go.id	Dukungan indikator 14
10.	05/02/2020	Ketua Bawaslu (Bambang Arintoko)	Bawaslu membuka layanan pengaduan terkait seleksi PPK yang digelar KPU Kota Blitar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kecurangan dalam pemilihan PPK Pilkada dan Pemilu 2020 di Kota Blitar akan menurun.</li> <li>Kecurangan dalam Pilkada/Pilwali dapat dicegah.</li> </ul>	Blitarkota.go.id	Dukungan indikator 17. Cegah indikator 18 dan 19

11.	06/02/2020	Komisio- ner KPU Di- visi Teknis (Hernawan Miftakhul Khabib)	3 bakal calon perseorangan siap maju di Pilwali Kota Blitar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dijamin, baik bakal calon yang direkomendasikan partai maupun balon perseorangan.</li> <li>Masyarakat memiliki lebih banyak pilihan balon dalam Pilwali 2020.</li> </ul>	Mayang- kara News	Dukungan indikator 11
12.	20/02/2020	DPRD Kota Blitar, Wakil Ket- ua DPRD Kota Blitar (Agus Zunaidi), Kepala Bangkes- bangpol Kota Blitar (Hakim Sisworo)	Rekomendasi DPRD Kota Blitar Kepada Pemekor untuk tidak memberikan izin pertandingan sepak bola di Kota Blitar kepada kesebelasan yang suporternya rawan ricuh.	Diterbitkan rekomendasi terkait larangan pertandingan sepak bola dengan suporter yang berpotensi ricuh.	Mayang- kara News	Poin indikator 22
13.	24/02/2020	Tiga Paslon Peroran- gan Pilwali Kota Blitar 2020, Komisio- ner Divisi Teknis KPU Kota Blitar	Tiga Paslon Pilwali Kota Blitar 2020 (Lisminingsih dan Teteng Rukmo Condrono, Purnawan Buchori dan Indri Kuswati serta Sumari dan Edi Widodo), sudah menyerahkan syarat dukungan perseorangan ke KPU, diterima Komisio- ner Divisi Teknis KPU Kota Blitar (Hernawan Miftakhul Khabib)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiga Paslon berhak maju ke tahap selanjutnya karena memenuhi persyaratan.</li> <li>Masyarakat memiliki lebih banyak pilihan balon dalam Pilwali 2020.</li> </ul>	Blitarko- ta.go.id	Jaminan indikator 11
14.	25/02/2020	Komisio- ner KPU Kota Blitar (Rangga Bisma)	Peminat PPS (Petugas Pemungutan Suara) Pilwali Kota Blitar 2020 masih cukup tinggi. Disampaikan Komisio- ner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 191 pendaftar dan akan diseleksi kembali dengan menyisakan 126 anggota PPS.</li> <li>Partisipasi politik masyarakat dalam Pilwali 2020 meningkat.</li> </ul>	Nok- tahmer- ah.com	Dukungan indikator 11

15.	27/02/2020	Sejumlah Tokoh berbagai Agama Danyon 511/DY, Kasdim 0808 Blitar dan Kapolres Blitar Kota	Polres Blitar Kota ajak tokoh agama dan masyarakat menjaga kondusifitas menjelang Pilwali 2020. Penggalangan tanda tangan pilkada damai dan para tokoh mengajak masyarakat menciptakan kondusifitas dalam Pilwali 2020. Sejumlah Tokoh Agama dari Ormas Islam, pimpinan Pondok Pesantren, pengurus Hindu Darma, Pendeta Gereja, Danyon 511/DY (Letkol Inf Georgius Luky Ariesty), Kasdim 0808 Blitar (Mayor Inf Leo E Panarukan) dan Kapolres Blitar Kota (AKBP Leonard M Sinambela)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat menjaga kondusifitas menjelang Pilwali.</li> <li>Pilwali 2020 berjalan kondusif, tertib dan damai.</li> </ul>	Mayang-kara News, blitar.go.id	Cegah indikator 7 dan 16
16.	11/03/2020	Kapolres Blitar Kota, Forkop-inda Kota Blitar dan Alim Ulama Kota Blitar	Jelang pilkada serentak 2020, Kapolres Blitar Kota, (AKBP Leonard M Sinambela), bersama warga dan Alim Ulama Melaksanakan Deklarasi Damai.	Pilkada serentak/ Pilwali 2020 berlangsung dengan damai.	Mayang-kara News	Cegah indikator 7 dan 16
17.	14/03/2020	Komisioner Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Blitar, Abdul Azis Alkaharudin	Ribuan data dukungan ganda ditemukan Bawaslu Kota Blitar. Bawaslu meminta KPU untuk meneliti lebih jeli terkait dukungan bakal calon perseorangan karena terdapat potensi dukungan ganda.	Kecurangan dalam Pilkada serentak/ Pilwali 2020 dapat diminimalisir	Blitarkota.go.id	Dukungan indikator 13
18.	22/03/2020	Wakil DPRD Kota Blitar (Totok Sugiharto), Plt Walikota Blitar (Santoso)	DPRD dalam Musrenbang RKPD Kota Blitar 2020 meminta pihak Pemkot melakukan upaya maksimal kurangi pengangguran.	Pemkot berusaha maksimal mengurangi angka pengangguran di Kota Blitar.	Mayang-kara News	Potensi poin indikator 22

19.	10/06/2020	Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim), Seluruh Anggota DPRD Kota Blitar	DPRD Kota Blitar tetapkan kode etik badan kehormatan. Kode etik meliputi tata cara menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, kunjungan kerja dan segala hal yang berkaitan dengan penyampaian pengaduan baik dari masyarakat, anggota atau pun pimpinan DPRD Kota Blitar.	Meningkatnya kinerja DPRD dalam segala hal yang berkaitan dengan penyampaian pengaduan baik dari masyarakat, anggota atau pun pimpinan DPRD Kota Blitar tentang adanya suatu penyimpangan.	Forum Nusan-tara	Dukungan indikator 17
20	12/06/2020	Ketua KPU Kota Blitar (Choirul Umam)	KPU siapakan skenario pemutakhiran data pemilih secara online.	Data pemilih termutakhirkan dan hak pilih masyarakat dalam Pilwali 2020 terjamin.	Blitarko-ta.go.id	Dukungan indikator 13
21	17/06/2020	Ketua Bawaslu Kota Blitar (Bambang Arintoko)	Panwascam diaktifkan kembali, Bawaslu siap mengawal pelaksanaan Pilkada 2020.	Kecurangan dalam pilkada serentak/ Pilwali 2020 dapat dicegah atau diminimalisir untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan damai.	Blitarko-ta.go.id	Cegah indikator 18 dan 19
22	24/06/2020	Komisioner KPU Kota Blitar divisi Teknis (Hernawan Miftakhul Khabib), ketua Bawaslu Kota Blitar (Bambang Arintoko), Polres Blitar Kota.	KPU Kota Blitar antisipasi data ganda saat verifikasi faktual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecurangan dalam Pilkada/Pilwali dapat dicegah.</li> <li>• Terwujudnya Pilkada/Pilwali 2020 yang jujur dan damai.</li> </ul>	Blitarko-ta.go.id	Cegah indikator 18 dan 19. Dukungan indikator 13
23	30/06/2020	Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar (Yasin Herman-to), Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar (Agus Zunaedi)	DPRD Kota Blitar Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses. DPRD melakukan aksi turun lapangan untuk menjarang aspirasi masyarakat dan menemukan banyak warga terdampak Covid-19 belum menerima Bansos dari pemerintah.	DPRD pun meminta Plt Walikota untuk segera mengambil tindakan terkait hal tersebut.  Telusuri kemungkinan adanya rekomendasi	Forum Nusan-tara	Dukungan indikator 22

24	30/06/2020	Komis-ioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya	KPU targetkan pemilihan di masa pandemi akan mencapai 80 persen partisipasi masyarakat. Pemilu tetap dapat dilaksanakan di masa pandemi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.	Partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pilwali 2020 akan tetap tinggi.	Kompas.id, blitarkota.go.id	Dukungan indikator 14
----	------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------

#### 4.2.1. Analisis Isi Berita Media Massa pada Semester I (Januari-Juni 2020)

1. Blitarkota.go.id., 8 Januari 2020, KPU Mulai Persiapkan Rekrutmen PPK Pilwali 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mulai mempersiapkan proses perekrutan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pilwali September 2020. Rencananya proses rekrutmen akan mulai Bulan Januari - Februari 2020 sesuai yang disebutkan oleh Rangga Bisma Aditya, Komisiner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Blitar, saat ditemui di kantornya, Selasa (07/01/2020). Rangga mengatakan, pelaksanaan perekrutan itu berdasarkan surat dinas dari KPU RI tentang perekrutan PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Perekrutan PPK akan dilaksanakan mulai 15 Januari sampai 14 Februari 2020. Sementara perekrutan PPS mulai tanggal 15 Februari sampai 14 Maret 2020. Sebagai persiapan, Rangga menyebut KPU telah melakukan koordinasi dengan kecamatan dan ketua desk pemilu Kota Blitar. Rencananya cek kesehatan bagi pendaftar PPK tidak akan ditarik retribusi alias gratis. Disinggung mengenai tahapan, Rangga menjelaskan tahapan perekrutan akan diawali dengan seleksi administrasi. Bagi pendaftar yang lolos administrasi selanjutnya akan mengikuti tes tulis berbasis online atau CAT. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar, terkait dengan tempat pelaksanaan tes online. Sekadar diketahui, pada Pilwali 2020, KPU Kota Blitar membutuhkan 15 PPK untuk tiga kecamatan. Sedangkan untuk PPS, tenaga yang dibutuhkan sebanyak 43 orang.

2. Blitarkota.go.id., 8 Januari 2020, KPU Libatkan Mahasiswa dalam Sosialisasi Pilwali 2020

Para mahasiswa yang tergabung dalam perkumpulan atau himpunan-himpunan mahasiswa telah dilibatkan sebagai peserta sosialisasi Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar. Rangga Bisma Aditya, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Blitar mengatakan, untuk sosialisasi yang melibatkan mahasiswa telah dilaksanakan pada akhir Desember 2019 lalu. Pihak KPU telah bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar. Sosialisasi berlangsung di Aula Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar, Kamis (26/12/2019). Ditempat yang sama dilanjutkan dengan sosialisasi yang berlangsung Sabtu (28/12/2019) dengan melibatkan peserta dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Blitar. Rangga menambahkan, puluhan mahasiswa telah dilibatkan sebagai peserta sosialisasi. Sehingga mereka memahami materi materi yang telah disampaikan. Seperti tahapan-tahapan dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Blitar. Rangga berharap keberadaan mahasiswa juga dapat mengajak para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih dan jangan sampai golput. Mereka akan lebih mudah memberikan ajakan karena seusia.

3. [blitarkota.go.id](http://blitarkota.go.id), 8 Januari 2020, DPRD Kota Blitar Lakukan *Hearing* dengan Paguyuban Cafe dan Karaoke

Anggota DPRD dan Paguyuban Cafe dan Karaoke melakukan *Hearing* di Gedung Graha Paripurna, Kantor DPRD Kota Blitar pada Rabu (08/01/2020) sesuai permintaan sejumlah pengusaha cafe dan karaoke yang meminta kepastian hukum untuk mengatur perizinan usaha karaoke di Kota Blitar. Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan sejumlah pengusaha karaoke yang datang ke kantor DPRD ini, diluar pengelola karaoke Maxi Brilian. Mereka menanyakan kepastian hukum terkait izin karaoke di Kota Blitar, serta tanggal pasti pembukaan segel tempat karaoke yang dilakukan sejak Agustus 2019. Dalam hearing yang dilaksanakan tertutup ini, Syahrul menyampaikan bahwa DPRD Kota Blitar sudah memberikan rekomendasi, tindak lanjut hasil evaluasi karaoke ke Pemerintah Kota Blitar. Dalam rekomendasi itu, dewan meminta agar eksekutif segera mengambil tindakan, membuat regulasi yang mengatur usaha karaoke. Sementara itu, Pipit salah satu pengusaha karaoke di Kota Blitar mengatakan, ingin kejelasan dari Pemerintah Kota Blitar terkait hasil evaluasi yang dibahas dengan DPRD Kota Blitar. Ia juga mempertanyakan penundaan pembukaan segel di dua tempat karaoke di Jalan Tanjung dan Veteran. Padahal secara dua tempat karaoke itu sudah memenuhi syarat perizinan.



4. Blitarkota.go.id., 16 Januari 2020, Lebih Dari 6000 Pemilih Pemula di Kota Blitar Ditargetkan Menyelesaikan Perekaman KTP-El Sebelum Pilwali Kota Blitar 2020

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Blitar, Muheni mengatakan perekaman KTP-el untuk 6.072 pemula itu ditargetkan selesai September 2020 atau sebelum pelaksanaan Pilwali Kota Blitar. Muheni menjelaskan Dispendukcapil Kota Blitar melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP-el bagi pemula. Perekaman KTP-el pemula dimulai pada bulan Februari 2020. Selain ke sekolah, pihaknya juga akan menambah jam pelayanan perekaman KTP-el di luar jam kantor, seperti pada Sabtu mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Muheni menambahkan saat ini ketersediaan blanko KTP-el sekitar 300 keping. Blanko KTP-el itu merupakan sisa dari jatah blanko KTP-el Desember 2019 lalu.

5. Blitarkota.go.id., 25 Januari 2020, Bawaslu Petakan Potensi Kerawanan Perekrutan PPK Pilwali Kota Blitar 2020

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar telah memetakan potensi kerawanan dalam proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilwali 2020. Untuk mengawasi kerawanan itu, Bawaslu menerjunkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang telah dilantik akhir tahun 2019 lalu. Demikian disampaikan Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar, saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (24/01/2020). Bambang mengatakan, sesuai pemetaan terdapat beberapa kerawanan selama proses perekrutan PPK Pilwali 2020. Di antaranya terkait perodesasi, belum cukup umur, calon suami/istri penyelenggara, bukan pengurus parpol, dan bukan tim kampanye pasangan calon walikota dan calon wakil wali kota. Bambang mengaku dalam melakukan pengawasan, pihaknya menerjunkan langsung anggota panwascam ditambah sekretariat. Sedangkan untuk komisioner hanya melakukan supervisi. Bambang menyebut, terdapat beberapa persyaratan perekrutan PPK Pilwali 2020, diantaranya calon anggota PPK tidak boleh menjabat dua kali periode berturut-turut pada jabatan yang sama, tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu, tidak menjadi partai politik, dan lain-lain. Seperti diberitakan sebelumnya, proses pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan mulai 18-24 Januari 2020. KPU Kota Blitar membutuhkan 15 anggota PPK untuk 3 kecamatan, yaitu Sukorejo, Sananwetan, dan Kepanjenkidul.

6. Blitarkota.go.id., 27 Januari 2020, Jelang Pilwali Dispendukcapil Kota Blitar Kebut Perekaman EI-KTP untuk Pemilih Pemula

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar menargetkan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk 6.072 pemilih pemula. Langkah upaya dinas setempat dalam mendukung pelaksanaan Pilwali September mendatang. Muhaeni, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Blitar mengatakan, 6.072 pemilih pemula itu tersebar di 21 kelurahan di Kota Blitar. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan strategi agar pemilih pemula tersebut segera melakukan perekaman sehingga bisa memanfaatkan hak pilihnya pada Pilwali nanti. Salah satu langkah yang akan ditempuh dinas setempat adalah terjun langsung ke sekolah - sekolah. Muhaeni mengatakan, rencana tersebut akan dilaksanakan Bulan Februari mendatang, bekerja sama dengan dinas terkait. Meski Dispendukcapil mengebut perekaman data, Muhaeni menyebut stok blangko e-KTP masih minim. Sejak Oktober tahun lalu pengiriman blanko e-KTP dari Pemerintah Pusat dibatasi hanya 500 keping perbulan.

7. Blitarkota.go.id., 31 Januari 2020, KPU Kota Blitar Libatkan 3 Duta Pemilih Pemula dan Pemilih Muda di Pilwali 2020

Sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, tiga duta Pemilih Pemula bertugas merangkul pemilih pemula setingkat SMA/SMK dan MA, sedangkan 3 Duta Pemilih Muda bertugas merangkul mahasiswa dan pemuda, agar antusias ikut memilih saat Pilwali 2020 nanti. Rangga Bisma Aditya, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Blitar mengatakan, untuk tahap awal, Else Selviana, Mahira Diffa Rahma Hida dan Achmad Suud Tantowi, yang terpilih menjadi Duta Pemilih Pemula, akan ikut saat sosialisasi KPU *GOES TO SCHOOL* dan *GOES TO CAMPUS* di bulan pebruari 2020. Sesuai jadwal, mereka akan mengunjungi delapan sekolah, diantaranya SMKN 1, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAK Diponegoro, SMK Katolik Santo Yusuf dan MAN Kota Blitar. Khusus untuk 3 Duta Pemilih Muda, Laudya Veny Masito, Lathifa Millati Saifullah dan Natasya Clariska Gustavida, juga akan ikut serta dalam sosialisasi. Sesuai jadwal, mereka akan mengunjungi dua kampus, diantaranya Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Islam Balitar. Selain membantu Komisioner KPU Kota Blitar melakukan sosialisasi Pilwali 2020, masing-masing duta diharapkan juga mampu menjadi sumber informasi kredibel ke teman-teman mereka, sehingga saat pencoblosan, antusias pemilih pemula dan pemilih muda sangat tinggi.

8. Blitarkota.go.id., 04 Februari 2020, Pemkot Blitar Pastikan Seluruh Ormas atau LSM Kota Blitar Sudah Berbadan Hukum Resmi

Berdasarkan data Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, sampai Januari 2020 total Ormas atau LSM di Kota Blitar adalah 119 Organisasi. Semua organisasi tersebut sudah teregistrasi dan berbadan hukum tetap. Sumarno S. Sos, Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol PBD) Kota Blitar mengatakan, sesuai dengan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan Ormas di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, termasuk Permenkumham RI No. 5 dan 6 Tahun 2014 tentang tata cara pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan, Ormas atau LSM harus mendaftar dulu ke pusat. Pemerintah Daerah hanya memberi surat rekomendasi, baru setelah mereka berbadan hukum resmi, Pemerintah Daerah akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Saat ini perkembangan Ormas dan LSM di Kota Blitar sangat pesat. Tetapi semuanya bisa terkontrol dengan sangat baik karena pihaknya melakukan pembinaan setahun sekali terhadap Ormas, termasuk kegiatan jambore Ormas untuk menggalang pembangunan di wilayah Kota Blitar, terutama di bidang keormasan. Untuk memastikan pembinaan Ormas di Kota Blitar berjalan lancar, Pemkot Blitar melalui Bakesbangpol dan PBD rutin menggelar dua jenis pembinaan, dengan sosialisasi dan pembinaan strategi pembangunan Kota Blitar.

9. Blitarkota.go.id., 04 Februari 2020, Tingkatkan Partisipasi, KPU Kota Blitar Jalin Kerja Sama dengan 3 Kampus di Kota Malang

KPU melakukan kerja sama dengan 3 kampus di Malang dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda, terutama mahasiswa asal Kota Blitar yang saat ini kuliah di Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan Universitas Muhammadiyah. Rangga Bisma Aditya, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Blitar saat ditemui di kantornya, Selasa (04/02/2020) siang mengatakan, bentuk kerjasama yang saat ini diusahakan komisioner KPU Kota Blitar diantaranya berupa sosialisasi, *talkshow*, iklan dan izin. Untuk sosialisasi, tim dari KPU Kota Blitar secara langsung akan mengumpulkan seluruh mahasiswa Kota Blitar di masing - masing kampus atas rekomendasi rector untuk menggelar sosialisasi Pilwali 2020, termasuk menggelar talkshow bersama UB TV secara berkala dengan konten Pilwali Kota Blitar 2020 termasuk tahapannya. Untuk memastikan materi sosialisasi dan *talkshow* bisa diterima mahasiswa berkelanjutan, pihaknya

juga memasang iklan sosial media di UB TV. Termasuk berkoordinasi dengan rektor tiga kampus, untuk meminta ijin atau dispensasi karena pelaksanaan ospek di tiga kampus itu bersamaan dengan hari pencoblosan Pilwali 2020, Rabu, (23/09/2020). Sehingga seluruh mahasiswa Kota Blitar bisa pulang dan ikut mencoblos. Empat bentuk kerjasama yang dijalin KPU Kota Blitar bersama tiga kampus di Malang, diharapkan bisa terealisasi antara Bulan Februari sampai Bulan Maret 2020.

10. Blitarkota.go.id., 05 Februari 2020, Bawaslu Buka Posko Layanan Pengaduan Seleksi PPK yang Digelar KPU Kota Blitar

Bawaslu membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terkait selesi PPK yang diadakan KPU Kota Blitar. Pembukaan posko bertujuan untuk mengantisipasi dan menghimpun informasi serta laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran saat proses pembentukan PPK sesuai arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Timur. Bambang Arintoko, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar saat ditemui di kantornya, Rabu, (05/02/2020) siang mengatakan ada beberapa hal yang patut dicermati saat proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berlangsung, diantaranya usia pendaftar, pendidikan, periode keanggotaan menjadi PPK, PPS dan KPPS bagi yang pernah menjabat, termasuk status terkini keanggotaan partai dan tim sukses calon PPK yang lolos tes CAT. Bambang Arintoko menambahkan, pihaknya mempersilahkan warga yang mendapati adanya calon PPK yang dicurigai melanggar ketentuan seperti calon PPK ternyata mantan terpidana, calon PPK yang memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu atau Pilkada, calon PPK yang pernah menjadi penyelenggara Pemilu atau Pilkada tetapi di sanksi bisa langsung datang ke Kantor Bawaslu Kota Blitar di Jalan Tanjung 24 jam non-stop dengan membawa bukti kredibel. Selain membuka posko di Kantor Bawaslu Kota Blitar juga menginstruksikan semua Panwascam untuk membuka posko yang sama di masing - masing kantor kecamatan.

11. Mayangkanews, 06 Februari 2020, 3 Bakal Calon Perseorangan Siap Maju di Pilwali Kota Blitar 2020

Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis, Hernawan Miftakhul Khabib mengatakan sudah ada 3 pasangan bakal calon perseorangan siap maju di Pilwali Kota Blitar 2020. 3 bakal calon itu di antaranya Lisminingsih-Teteng Rukmo Condrono, Sumari-Edi Widodo & Purnawan Buchori-Indri Kuswati. Khabib menegaskan ketiga bakal calon perseorangan itu

sudah menyerahkan surat mandat operator & KPU Kota Blitar sudah memberikan bimtek kepada operator. Khabib menambahkan untuk tahapan berikutnya 3 bakal calon perseorangan itu ditunggu menyerahkan dukungan pada tanggal 19 hingga 23 Februari 2020. 3 bakal calon Walikota & Wakil Walikota Blitar yang akan maju lewat jalur perseorangan itu harus mengumpulkan syarat dukungan sah minimal 11.355. KPU Kota Blitar akan melakukan verifikasi faktual dukungan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya.

12. *Mayangkanews*, 20 Februari 2020, DPRD Rekomendasikan Pemkot Tak Izinkan Pertandingan Sepak Bola yang Berpotensi Ricuh.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi dalam rapat kerja gabungan antara DPRD Kota Blitar & Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, melakukan evaluasi dampak insiden pertandingan semifinal Persebaya melawan Arema pada Selasa 18 Februari 2020. DPRD Kota Blitar pada Kamis, 20 Februari 2020 merekomendasikan Pemkot Blitar untuk tidak mengizinkan adanya pertandingan yang berpotensi menimbulkan kericuhan di Kota Blitar. Nantinya, rekomendasi ini akan dibuat komisi gabungan DPRD Kota Blitar. Menurutnya, dalam pertandingan ini Kota Blitar belum melakukan persiapan matang seperti koordinasi antara OPD terkait, termasuk perizinan pertandingan. Agus mengatakan sebenarnya Pemkot Blitar berhak menolak jika tidak siap sehingga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Blitar ke depannya jika ditunjuk lagi oleh Pemerintah Provinsi Jatim. Agus menegaskan rekomendasi ini tidak hanya untuk menanggapi pertandingan Arema & Persebaya saja, melainkan untuk semua kesebelasan yang berpotensi membuat resah warga Blitar, mengingat pemeliharaan Stadion Supriyadi menggunakan APBD Kota Blitar. Sementara itu, Kepala Bakesbangpol & Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan kerugian akibat kericuhan antar suporter di Kota Blitar pada Selasa lalu mencapai Rp 254 juta. Hakim menjelaskan ada 11 warung yang tidak dibayar, 13 unit sepeda motor rusak, 2 unit mobil rusak & 6,14 hektar sawah rusak akibat kericuhan suporter Bonek & Aremania ini. Selain itu, ada 6 orang terluka & harus dirawat di rumah sakit. Kata Hakim, data kerugian sudah dikirim ke Pemprov Jatim, sehingga pihaknya tinggal menunggu assesment dari Provinsi ke Kota Blitar. Ia menambahkan pendataan ini sudah melalui koordinasi Kelurahan & Polres Blitar Kota. Nantinya, semua kerugian ini akan ditanggung Pemerintah Provinsi Jatim.

13. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id)., 24 Februari 2020, Tiga Paslon Pilwali 2020 Kota Blitar, Sudah Serahkan Syarat Dukungan Perseorangan

Tiga pasangan calon yang sudah menyerahkan syarat dukungan perseorangan sampai batas waktu Minggu, (23/02/2020) diantaranya Lisminingsih dan Teteng Rukmo Condrono, Purnawan Buchori dan Indri Kuswati serta Sumari dan Edi Widodo. Hernawan Miftakhul Khabib, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Blitar, saat ditemui di kantornya, Senin, (24/02/2020) pagi mengatakan, pasangan Lisminingsih dan Teteng Rukmo Condrono menyerahkan 12.500 syarat dukungan dan dokumen pada Jumat, (21/02/2020) dan dinyatakan lengkap dan sesuai, serta sudah mendapat berita acara dari KPU Kota Blitar. Sementara itu pasangan Purnawan Buchori dan Indri Kuswati menyerahkan 13.000 syarat dukungan dan dokumen pada Sabtu, (22/02/2020), tetapi masih dalam proses perbaikan ketidaksesuaian data dukungan KTP. Khusus pasangan Sumari dan Edi Widodo menyerahkan 12.353 syarat dukungan dan dokumen pada Minggu, (23/02/2020) dan saat ini masih dalam proses pengecekan kesesuaian data dukungan KTP. Sesuai dengan tahapan, verifikasi administrasi Syarat Dukungan Perseorangan dijadwalkan tanggal 27 Pebruari sampai 25 Maret 2020 yang dilakukan internal KPU Kota Blitar. Sementara untuk verifikasi faktual digelar 26 Maret 2020 yang dilakukan PPS dengan sistem sensus atau mendatangi rumah warga. Seperti diketahui, sesuai dengan PKPU, bakal calon perseorangan harus menyerahkan dukungan minimal 11.355 KTP ke KPU Kota Blitar agar bisa maju di Pilwali 2020 Kota Blitar.

14. [Noktahmerah.com](http://Noktahmerah.com)., 25 Februari 2020, Peminat PPS Pilwali Kota Blitar 2020 Masih Cukup Tinggi

Pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Kota Blitar sudah ditutup, Senin 24 Februari 2020 pukul 24.00 WIB. Hasilnya, sebanyak 191 orang mendaftarkan diri yang berarti hal ini menunjukkan peminat PPS pada Pilwali 2020 masih cukup tinggi. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan, jumlah itu sudah memenuhi kuota dan sebaran di tiap kelurahan. Sehingga tidak diperlukan perpanjangan waktu pendaftaran PPS. Menurutnya, kuota minimal pendaftar calon PPS di Kota Blitar sebanyak 126 orang dengan sebaran di tiap kelurahan ada enam pendaftar. Dari hasil pendaftaran, di Kecamatan Kepanjenkidul ada 63 pendaftar, Kecamatan Sananwetan ada 68 pendaftar dan Kecamatan Sukorejo ada 60 pendaftar. Dari 191 pendaftar itu 93 orang adalah laki-

laki dan 98 orang adalah perempuan. Dengan jumlah tersebut setiap kelurahan ada sekitar sembilan pendaftar. Pihak KPU melakukan tahap seleksi administrasi calon PPS. Targetnya, akhir Februari 2020 proses rekrutmen calon PPS harus sudah selesai.

15. Blitarkota.go.id., Mayangkaranews, 27 Februari 2020, Menjelang Pilwali Blitar 2020, Polisi Mengajak Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Ikut Jaga Suasana Kondusif

Polres Blitar Kota melakukan silaturahmi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat pada Rabu 26 Februari 2020. Silaturahmi itu bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilwali Blitar 2020. Acara itu diikuti sejumlah Tokoh Agama dari Ormas Islam, pimpinan Pondok Pesantren, pengurus Hindu Darma dan Pendeta Gereja. Acara itu juga dihadiri Danyon 511/DY, Letkol Inf Georgius Luky Ariestya dan Kasdim 0808 Blitar Mayor Inf Leo E Panarukan. Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela mengatakan, acara silaturahmi itu untuk meningkatkan komunikasi antara polisi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjelang Pilwali Blitar 2020. Kapolres mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya, para tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa mengajak masyarakat untuk menyambut pelaksanaan Pilwali Blitar 2020 dengan tertib. Masyarakat boleh beda pilihan tapi harus tetap menjaga kerukunan dan ketertiban. Acara itu juga menggalang tanda tangan pelaksanaan Pilkada Damai di Kota Blitar. Polisi, TNI, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat ikut melaksanakan Pilkada Damai di Kota Blitar.

16. Mayangkaranews, 11 Maret 2020, Jelang pilkada serentak 2020, Kapolres Blitar Kota ajak warga dan Alim Ulama Melaksanakan Deklarasi Damai

Jelang Pilkada Serentak 2020, Kapolres Blitar Kota bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan Deklarasi Damai pada peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah di Masjid Agung Kota Blitar. Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela mengatakan dalam kegiatan peringatan Isra' Mi'raj yang digelar Selasa 10 Maret 2020 juga dilakukan himbuan Kamtibmas & Deklarasi Damai Pilkada Serentak 2020. Pihaknya menghimbau ke masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pilwali 2020 nanti agar target partisipasi tercapai. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat agar sama-sama menjaga

keamanan. Menurutnya, momen Pilkada biasanya terjadi tensi politik memanas sehingga pihaknya meminta masyarakat agar menjaga suasana sejuk. Leonard mengatakan perbedaan pilihan dalam Pilkada merupakan hal biasa, namun harus dilandasi semangat kerukunan & kebersamaan. Dalam kegiatan pengajian akbar Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah & Deklarasi Damai itu dihadiri Forkopimda Kota Blitar & alim ulama Kota Blitar.

#### 17. Blitarkota.go.id., 14 Maret 2020, Bawaslu Temukan Ribuan Data Dukungan Ganda

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar meminta KPU Kota Blitar kembali meneliti data dukungan bakal calon perseorangan Pilwali 2020, setelah melihat adanya potensi data dukungan ganda dari bakal calon. Abdul Azis Al Kaharudin, Komisioner Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Blitar mengatakan, temuan data dukungan ganda bakal calon perseorangan sudah diserahkan ke KPU Kota Blitar. Jenis data ganda dukungan itu diantaranya data ganda identik yaitu data dukungan sama yang ditemukan di antara pasangan bakal calon perseorangan. Data ganda tidak identik, data dukungan yang NIK-nya sama tapi nama, alamat, dan tanggal lahir tidak sama dan ditemukan di antara pasangan bakal calon perseorangan. Sedangkan, data ganda internal, data dukungan sama yang ditemukan di satu pasangan bakal calon. Data Bawaslu Kota Blitar menunjukkan jumlah potensi data dukungan ganda dari tiga pasangan bakal calon perseorangan sebanyak 11.060 dukungan. Rinciannya, data dukungan ganda identik sebanyak 8.937, data dukungan ganda tidak identik ada 2.123, dan data dukungan ganda internal sekitar 60. Sekadar diketahui, di Kota Blitar terdapat tiga pasangan bakal calon perseorangan Pilwali 2020, yaitu Lisminingsih-Teteng Condro Rukmono, Purnawan Buchori-Indri Kuswati, dan Sumari, Edi Widodo.

#### 18. Mayangkanews, 22 Maret 2020, Musrenbang RKPD Kota Blitar 2020, DPRD Meminta Pemerintah Kota Blitar kurangi Angka Pengangguran

DPRD Kota Blitar meminta Pemerintah Kota melakukan upaya maksimal untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Blitar yang di tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar empat persen. Banyak program yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut seperti diantaranya melalui program padat karya dan pelatihan kerja. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto pada 21 Maret



2020, lowongan pekerjaan di bidang formal saat ini semakin minim, harus diupayakan pemberian bantuan modal yang tidak mengikat untuk menumbuhkan UMKM dan usaha non formal. Apabila angka pengangguran tidak segera turun, hal ini bisa berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di kota Blitar. Sementara itu pelaksana tugas Walikota Blitar, Santoso mengatakan, jumlah pengangguran di Kota Blitar sebenarnya mulai mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Namun karena jumlah lulusan setiap tahunnya bertambah, hal ini berdampak pada jumlah pengangguran juga bertambah setiap tahunnya. Menurut Santoso mulai tahun 2020 pihaknya akan melakukan upaya maksimal untuk menurunkan angka pengangguran. Satu diantaranya dengan bekerja sama dengan pihak swasta penyedia lapangan pekerjaan. Namun Santoso memastikan, angka pengangguran di Kota Blitar saat ini dalam taraf wajar, karena tidak terlalu tinggi. Sesuai dengan Data Badan Pusat Statistik, tahun 2018 jumlah pengangguran di Kota Blitar sebanyak 3.000 lebih, dengan kenaikan 4 persen per tahun.

19. Forum Nusantara, 10 Juni 2020, DPRD Kota Blitar Tetapkan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Selasa, 9 Juni 2020, DPRD mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Blitar dan seluruh anggotanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menetapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan. Hal ini perlu dibentuk dengan tujuan untuk mendisiplinkan anggota DPRD Kota Blitar dalam mengadakan kegiatan. Kode etik meliputi tata cara menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, kunjungan kerja dan segala hal yang berkaitan dengan penyampaian pengaduan baik dari masyarakat, anggota atau pun pimpinan DPRD Kota Blitar tentang adanya suatu penyimpangan. Mekanismenya, ketika terdapat surat pengaduan dari masyarakat, surat tersebut akan terlebih dahulu masuk ke DPRD Kota Blitar. Kemudian dalam waktu maksimal satu minggu, surat tersebut harus telah diteruskan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti. Kesalahan terkait peraturan dan kode etik ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

20. Blitarkota.go.id., 12 Juni 2020, KPU Kota Blitar Siapkan Skenario Pemutakhiran Data Pemilih Secara Online

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar menyiapkan scenario pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, mengingat tahapan Pilwali Kota Blitar 2020 akan dimulai pertengahan bulan Juni. Choirul Umam,

Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, sudah menyiapkan dua skenario pemutakhiran data pemilih, yaitu dengan cara konvensional dan online. Saat ini rencana tersebut masih dalam masa uji coba, sambil menunggu PKPU baru terkait tahapan Pilkada serentak. Umam menjelaskan, jika Pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020, maka tahapan pemutakhiran data pemilih sangat krusial dan harus segera dilakukan. Umam menjelaskan, pelaksanaan secara konvensional dan online, sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Pihaknya menyebut, kelebihan cara konvensional yaitu petugas mendapat data dan mengukur capaian pemutakhiran data pemilih, karena langsung terjun ke lapangan secara *door to door*. Namun biaya dan risiko kesehatan juga cukup tinggi ditengah wabah Corona. Sementara, kelebihan pemutakhiran data secara online adalah biaya lebih rendah dan risiko kesehatan kecil. Namun, tingkat capaian pemutakhiran data pemilih kecil karena petugas tidak ketemu langsung dengan pemilih. Selain pemutakhiran data pemilih, tahapan Pilkada yang harus segera dilakukan adalah tahapan pengaktifan kembali badan adhoc (PPK dan PPS) dan verifikasi faktual data dukungan dari calon perseorangan.

#### 21. Blitarkota.go.id., 17 Juni 2020, Panwascam diaktifkan Kembali, Bawaslu Siap Mengawal Pelaksanaan Pilkada 2020

Tahapan Pilkada 2020 telah dimulai per tanggal 15 Juni 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar pun siap mengawal tahapan Pilkada, usai mengaktifkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pilkada. Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar mengatakan, pengaktifan kembali pengawas pemilu Ad hoc sudah dilakukan. Langkah itu sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0197 Tahun 2020 tentang pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pilkada 2020. Bawaslu Kabupaten/Kota agar mengaktifkan kembali Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan-desa sebelum 15 Juni 2020. Bambang menegaskan, pengaktifan kembali pengawas pemilu Ad hoc ini, setelah sebelumnya vakum atau non-aktif karena penundaan pelaksanaan Pilkada. Yang semula dilakukan tanggal 23 September 2020, diundur pada tanggal 9 Desember 2020.

Bambang mengatakan, jumlah pengawas pemilu ad hoc yang diaktifkan sebanyak 30 anggota. Dengan rincian, sembilan anggota Panwas Kecamatan dan 21 anggota Panwaslu Kelurahan. Sebelum diaktifkan, anggota diminta untuk mengisi surat pernyataan kesanggupan bertugas di tengah wabah Corona. Bambang menambahkan, pasca diaktifkan

kembali, tugas terdekat pengawas pemilu Ad Hoc yaitu Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

## 22. Blitarkota.go.id., 24 Juni 2020, KPU Kota Blitar Antisipasi Data Ganda Saat Verifikasi Faktual

Jelang pelaksanaan verifikasi faktual, KPU Kota Blitar mulai mengantisipasi potensi kerawanan saat pelaksanaan verifikasi faktual data dukungan bakal calon perseorangan pada Pilwali Kota Blitar 2020. Selain berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kapolres Blitar Kota, KPU juga memetakan sebaran data ganda yang menjadi salah satu kerawanan kesalahan verifikasi faktual. Hernawan Miftakhul Khabib, Komisioner KPU Kota Blitar divisi Teknis mengatakan, pelaksanaan verifikasi faktual semula direncanakan tanggal 24 Juni 2020. Namun untuk mematangkan persiapan, KPU Kota Blitar akhirnya memutuskan pelaksanaannya tanggal 26 Juni 2020. Hal itu sudah diatur dalam PKPU No 5 Tahun 2020 yang menyebut, verifikasi faktual bisa dilaksanakan 24 Juni sampai 7 Juli, 25 Juni sampai 8 Juli, dan 26 Juli sampai 9 Juli. Khabib menyebut secara teknis sudah melakukan persiapan, dengan melakukan bimtek kepada PPK dan PPS yang akan melakukan verifikasi faktual. Sedangkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan, pihaknya telah memetakan sebaran data ganda dukungan di masing-masing kelurahan. Yang mana, berdasarkan hasil verifikasi administrasi, KPU Kota Blitar menemukan 3.500 data ganda dukungan dari tiga pasangan bakal calon perseorangan Pilwali Kota Blitar. Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi faktual nantinya akan dikawal oleh kepolisian.

Sementara itu, Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar mengatakan akan menerjunkan pengawas kelurahan, pengawas kecamatan, dan staf Bawaslu untuk memantau pelaksanaan verifikasi faktual data dukungan calon perseorangan.

## 23. Forum Nusantara, 30 Juni 2020, DPRD Kota Blitar Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses

DPRD Kota Blitar tetap jalankan jaring aspirasi di masa pandemi Covid-19. Hasil penjarangan aspirasi ini disampaikan dalam Persidangan II tahun 2020 pada 12 Mei 2020. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto dan Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi. Dalam kesempatan ini seluruh anggota DPRD Kota Blitar yang terdiri dari 3 Dapil menyerahkan hasil reses mereka kepada

pimpinan DPRD. Penjarangan aspirasi tahun ini, sedikit lebih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan pandemi Covid-19, maka DPRD Kota Blitar tidak diizinkan untuk mengumpulkan banyak masa sehingga pihak DPRD Kota Blitar turun langsung ke rumah warga, berkunjung ke RT setempat dan mengumpulkan maksimal 5 orang yang mampu mewakili aspirasi masyarakat. Tahun ini, kebanyakan topik keluhan yang disampaikan masyarakat adalah dampak pandemi Covid-19. Dari aksi turun lapangan ini, pihak DPRD Kota Blitar menemukan masih banyak warga yang belum menerima bansos masyarakat terdampak Covid-19. Oleh karena itu, pihak DPRD Kota Blitar meminta Plt Walikota Blitar, Santoso, untuk memberikan perintah kepada lurah daerah setempat untuk melakukan pendataan lanjutan. Menurut Agus, masih banyak masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bansos tersebut, tetapi malah masyarakat yang lebih mampu menerima bansos tersebut lebih dulu. Agus juga menyampaikan bahwa pimpinan DPRD telah menginstruksikan OPD mitra kerjanya untuk membahas lebih lanjut terkait penyaluran bansos bagi warga terdampak Covid-19.

24. Kompas.id., Blitarkota.go.id., 30 Juni 2020, KPU Targetkan Angka Partisipasi dalam Pemilu 2020 Mencapai 80 Persen

KPU berharap partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 tetap tinggi meski dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19. KPU menargetkan angka partisipasi masyarakat mencapai 80%. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Blitar karena menjadi pertama kalinya Pemilu berlangsung ditengah pandemi Covid-19. Pihaknya memastikan penyelenggaraan Pilwali 2020 sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, sebagaimana diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2020. Rangga juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak golput dan memilih tanpa tendensi manapun termasuk money politik, untuk mewujudkan Pilwali 2020 yang bersih dan bermartabat.

### 4.3. Rangkuman Peristiwa bulan Juli hingga Desember 2020

\*Isi berita yang sama di hari yang sama, dijadikan satu.

No.	Tgl*	Aktor	Issue/Aktivitas	Dampak	Sumber	Kaitan IDI
1	04/07/2020	Ketua Bawaslu Kota Blitar, Kepolisian, Petugas PPS, Masyarakat.	Masyarakat merasa takut karena banyaknya anggota kepolisian yang mengawal petugas PPS serta atribut petugas PPS yang menggunakan APD secara lengkap.	Warga merasa bahwa virus corona sangat dekat di sekitar mereka. Ketakutan pada COVID-19 memungkinkan partisipasi masyarakat dalam Pilwali 2020 akan menurun.	Mayangkara, blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
2	09/07/2020	Komisioner KPU Kota Blitar (Mifthakul Khabib)	KPU Kota Blitar memberikan kesempatan bagi para pendukung dan tim pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan berkas dukungan dengan mendatangi PPS di 21 Kelurahan dari tiga Kecamatan yang ada di Kota Blitar.	KPU Kota Blitar sangat kooperatif dalam tugasnya untuk menyukseskan Pilwali 2020 sehingga partisipasi serta hak dipilihnya masyarakat Kota Blitar sebagai pemimpin terealisasi dengan baik	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
3	11/07/2020	KPU Jatim, Komisioner KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar menargetkan partisipasi masyarakat dalam Pilwali 2020 akan mencapai 80%, namun menurut KPU Jatim, bias saja nilai partisipasi masyarakat Kota Blitar mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu Kota Blitar Pada 2019 yaitu sebesar 83,5 persen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi partisipasi politik gencar dilakukan secara online, dimasa pandemi</li> <li>Sosialisasi ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Blitar</li> </ul>	Mayangkara.news	Dukung indikator 14
4	14/07/2020	Komisioner KPU Kota Blitar, KPU Pusat, KPU RI.	Adanya penambahan jumlah DPP pemula di Kota Blitar karena molornya jadwal pilkada serentak	Jumlah partisipasi masyarakat akan meningkat	Mayangkara news	Dukung indikator 14
5	14/07/2020	Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Ninik Solikhah)	KPU Kota Blitar meminta PPDP aktif berkoordinasi dengan RT-RT	Memudahkan petugas serta sebagai bukti transparansi cokolit	blitarkota.go.id	Dukung indikator 13

6	14/07/2020	Ketua KPU Kota Blitar (Choirul Umam)	Tiga calon perseorangan Pilwali 2020 tidak memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>KPU Kota Blitar akan melakukan perbaikan penghitungan verifikasi faktual</li> <li>KPU memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak dipilih dan memilih sesuai peraturan</li> </ul>	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
7	15/07/2020	Warga Blitar Selatan dan mahasiswa PMII, petugas kepolisian	Puluhan massa dari mahasiswa dan warga blitar selatan berunjuk rasa menuntut perhutani tindak para pelaku perusakan hutan	Kebebasan perbendapat masyarakat Kota Blitar terealisasi dengan baik	Mayangkara	Poin indikator 17
8	23/07/2020	Komisioner KPU Kota Blitar (Mifthakul Khabib)	KPU buka perbaikan Bacawali yang tidak memenuhi syarat dukungan	Menjamin keadilan hak dipilih dan memilih	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
9	28/07/2020	Joko Trisno, Santoso, Mukhroji, Samanhuji Anwar, Kapolres Blitar Kota	Samanhuji Anwar melaporkan santoso telah melakukan penipuan uang 600 juta untuk pengurusan administrasi penggantian status dari Akademi mejadi Universitas.	Nama Santoso sebagai Bacawali 2020 menjadi tercoreng. Persaingan elit menuju Kursi Kota Blitar 1.	Mayangkara	Tidak ada
10	28/07/2020	Komisioner KPU Kota Blitar (Mifthakul Khabib)	KPU terima data dukungan bakal calon Pilwali	Partisipasi masyarakat untuk dipilih terealisasi dengan baik sesuai peraturan yang ada	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
11	30/07/2020	Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Ninik Solikhah)	Coklit KPU Kota Blitar mencapai 80% dari total DP4 117 ribu pemilih	Partisipasi masyarakat didata dengan baik dan diusahakan tidak ada yang terlewat	blitarkota.go.id	Dukung indikator 13
12	04/08/2020	Komisioner KPU Kota Blitar, Kepala (BKD) Kota Blitar (Suyoto)	KPU (Mifthakul Khabib), verifikasi administrasi dukungan Bacali 2020 masih mencapai 90%	Proses realisasi pemenuhan hak dipilih dan memilih berjalan baik	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
13	10/08/2020	Komisioner KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar menyediakan TPS Keliling untuk rumah sakit dan lapas	Partisipasi masyarakat dalam Pilwali 2020 sangat diperhatikan	Mayangkara, blitarkota.go.id	Dukung indikator 11 dan 14

14	12/08/2020	Ketua Bawaslu Kota Blitar (Bambang Arintoko)	Bawaslu prediksi adanya kerawanan netralitas ASN karena adanya rekan yang ikut dalam Pilwali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netralitas setiap pihak dalam Pilwali sangat diperhatikan</li> <li>• Meminimalisir <i>black campaign</i> dalam Pilwali 2020</li> </ul>	blitarkota.go.id	Cegah indikator 18 dan 19
15	13/08/2020	Komisioner KPU Provinsi Jatim Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi (Muhammad Arbayanto)	KPU Jatim berpendapat bahwa Petahana tidak perlu mundur dari jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petahana di instansi pemerintahan Kota Blitar tidak perlu mengundurkan diri</li> <li>• Petahana diberi kesempatan menyelesaikan tanggung jawab dan tugasnya sebelum beralih tugas</li> </ul>	blitarkota.go.id	Cegah indikator 18 dan 19
16	15/08/2020	Samanhudi Anwar, Santoso, Mukhroji, Joko Trisno, Kasat Reskrim Polres Blitar,	Samanhudi Anwar sudah dimintai keterangan terkait aduan yang disampaikan Joko Sutrisno tentang pengaduan terhadap Santoso yang diduga telah melakukan penipuan sebesar 600 juta	Kasus ditanggihkan untuk menjaga kondusifitas masyarakat	Mayang-kara	Tidak ada
17	18/08/2020	Polres Blitar Kota	Ancaman penjara dan denda 1 milyar untuk pelaku penyebar hoaks di Pilwali 2020	Hoaks jelas Pilwali 2020 dapat diminimalisir	Mayang-kara	Cegah indikator 11 dan 16
18	20/08/2020	Ketua KPU Kota Blitar (Choirul Ummam)	KPU konfirmasi bahwa dua Bacali tidak dapat ikut dalam Pilwali 2020	Bacali Lisminingsih - Teteng Rukmo Condrono dan Purnawan Buchori - Indri Kuswati tidak dapat maju dalam Pilwali 2020 karena tidak memenuhi syarat	blitarkota.go.id	Muncul Potensi Gugatan, indikator 25
19	22/08/2020	Ketua Bawaslu Kota Blitar (Bambang Arintoko)	Bawaslu Kota Blitar Awasi Politisasi Bansos oleh calon Petahana	Bansos dalam rangka kampanye tersembunyi dapat diminimalisir	blitarkota.go.id	Cegah indikator 18 dan 19
20	26/08/2020	Ketua KPU Kota Blitar (Choirul Ummam)	KPU lakukan persiapan jelang pencalonan Pilwali 2020	Sosialisasi partisipasi politik dapat menaikkan nilai partisipasi masyarakat	blitarkota.go.id	Dukung indikator 14

21	27/08/2020	Komisiner KPU Kota Blitar	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM (Rangga Bisma Aditya) KPU temukan data pemilih baru pada pelaksanaan coklit	Data pemilih yang bertambah akan menaikkan angka partisipasi masyarakat	blitarkota.go.id	Dukung indikator 14
22	28/08/2020	Sekretaris Daerah Kota Blitar, Bakes-bangpol-Konsultan	Skor IDI Kota Blitar pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 82,98 dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu mencapai 80,34	Kehidupan demokrasi di Kota Blitar berjalan lebih baik.	Bhirawa	Tidak ada
23	02/09/2020	Komisiner KPU Kota Blitar	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM (Rangga Bisma Aditya) KPU himbau Bapaslon tidak membawa massa pendukung saat daftar Pilwali	Partisipasi masyarakat sangat digencarkan namun beberapa harus dibatasi untuk menjaga keselamatan di masa pandemi	blitarkota.go.id	Cegah Indikator 16; Dukung indikator 14
24	03/09/2020	Warga Kel. Ngegong, Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Dishub Kota Blitar	Informasi palsu terkait penutupan jalan perlintasan KA di gedog yang menyebabkan salah paham antara warga yang tinggal di sekitar perlintasan KA dengan PT KAI Madiun serta petugas Dishub	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga kemukakan pendapat secara demokratis</li> <li>Warga harus disadarkan bahwa tidak semua informasi yang mereka dapatkan adalah benar</li> </ul>	Mayangkara, surya, Jawa Pos, Surabaya Pagi	point indikator 17
25	04/09/2020	Wakil Ketua DPRD Kota Blitar (Agus Junaidi)	DPRD minta masyarakat lebih teliti dalam memilih pemimpin	Masyarakat harus lebih cerdas, selektif dan tidak mudah tergiur senang sesaat karena suara rakyat akan menentukan masa depan bangsa	blitarkota.go.id	Cegah indikator 18,19
26	05/09/2020	Bapaslon Henry Pradipta Anwar - Yasin Hermanto, (Choirul Umam) Ketua KPU Kota Blitar	KPU terima berkas pendaftaran Bapaslon Henry-Yasin, Partai Politik pengusung (PKB, Golkar, dan PKS)	KPU Kota Blitar menyambut hangat partisipasi masyarakat yang menjadi Bapaslon Pilwali 2020	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11



27	05/09/2020	KPU Kota Blitar, Santoso, Tjujuk, Sri Rahayu, PDIP, Gerindra, PPP, Demokrat, Hanura, PSI, Garuda, Bulan Bintang, dan Perindo.	Santoso dan Tjujuk menggelar deklarasi dan mengaku siap menang	Jalan Sumatra sisi utara ditutup sementara karena banyaknya massa yang mengikuti deklarasi yang diadakan paslon Santoso dan Tjujuk	Mayang-kara	Tidak ada ricuh
28	05/09/2020	Siswa, Sekretaris GTPP covid19 Kota Blitar, PIt Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Santoso	Rencana pembelajaran tatap muka tahap dua gagal karena Kota Blitar masuk zona merah, pemerintah Kota Blitar memberikan bantuan kuota internet bagi siswa dengan anggaran Rp 4 miliar lebih.	Anggaran pendidikan meningkat.	Jawa Pos, Koran Memo	Dukung indikator 20
29	08/09/2020	KPU Kota Blitar, Lisminingsih, Teteng, Bawaslu.	Tidak puas dengan hasil verifikasi faktual di masa perbaikan, Bapason Lisminingsih – Teteng melayangkan gugatan ke KPU Kota Blitar melalui Bawaslu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat berani mengemukakan pendapat</li> <li>KPU Kota Blitar melakukan tugasnya dengan baik</li> </ul>	Mayang-kara	Poin indikator 17. Potensi poin indikator 25
30	09/09/2020	Lisminingsih-Teteng, Ogyk, Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar,	Tim relawan Bapason independen Lis-Teng siapkan materi laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait sengketa data dukungan ganda bapason.	Dugaan adanya kecurangan pada proses pelaksanaan Pilwali 2020 yang berpotensi menimbulkan konflik. .	Jawa Pos	Potensi poin indikator 25 dan indikator 18
31	11/10/2020	Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar,	Bawaslu kembali menemukan 464 pemilih baru yang belum masuk DPS.	Kinerja Bawaslu menjamin hak pilih masyarakat (pemilih baru) pada Pilwali 2020.	Jawa Pos	Dukung indikator 14
32	12/09/2020	Ketua KPU Kota Blitar (Choirul Umam),	DPS Pilwali Kota Blitar mencapai 114 ribu	Partisipasi masyarakat diperkirakan tinggi	blitarkota.go.id	Dukung indikator 13 dan 14

33	12/09/2020	Komisiner KPU Kota, Ketua KPU Kota, Polres Blitar Kota, sopir KPU,	KPU Kota Blitar mendapat kiriman bunga setaman dan boneka dari kertas yang ditusuk jarum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamanan Pilkada harus diperketat</li> <li>Masyarakat harus selektif dan tidak boleh sembarang mempercayai hal-hal yang berbau mistis</li> </ul>	Mayangkara, blitarkota.go.id, Koran Memo, Surya	Tidak ada
34	12/09/2020	KPU Kota Blitar, Polres Blitar Kota Blitar,	Terlihat dari Rekaman CCTV Kantor KPU Kota Blitar, seseorang berbaju putih yang melemparkan sesuatu ke kantor KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar dan Polres Blitar Kota bisa segera menyelidiki kasus kiriman bunga setama dan boneka yang ditusuk jarum kemudian membuat klarifikasi agar masyarakat kembali tenang dan terlepas dari ketakutan	Mayangkara, blitarkota.go.id	Tidak ada
35	12/09/2020	Satpol PP Kota Blitar	Penertiban 51 Baliho dukungan Bapaslon Pilwali 2020 yang dilakukan oleh Satpol PP karena masa izinnya sudah habis dan tempat pemasangan yang tidak sesuai dengan aturan.	Peraturan pemasangan APK berhasil ditegaskan	Mayangkara, blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
36	12/09/2020	Koordinanor Lapangan, Bawaslu Kota Blitar, TNI, Polri & Satpol PP Kota Blitar.	Aksi demo dari relawan yang memberikan dukungan moral bagi Bapaslon Lismingsih-Teteng di depan kantor Bawaslu Kota Blitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat berani menyuarakan pendapat</li> <li>Pihak terkait harus segera memberikan klarifikasi dan keputusan yang jelas agar tidak menyebabkan konflik berkelanjutan</li> </ul>	Mayangkara	Tidak ricuh, Poin indikator 17
37	13/09/2020	Sudarmanto, Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar, TNI – Polri & Satpol PP Kota Blitar	Ketidakpuasan relawan Bapaslon Lismingsih – Teteng terhadap pembacaan hasil keputusan musyawarah sengketa.	Dugaan adanya kecurangan pada proses pelaksanaan Pilwali 2020 yang berpotensi menimbulkan konflik. .	Jawa Pos	Tidak ricuh, Poin indikator 17
38	13/09/2020	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, Siti Aisyah	Pedagang mengadu sangat merasakan dampak dari kebijakan pembatasan jumlah pengunjung di tempat Wisata Makam Bung Karno	Dampak kebijakan pemerintah terhadap kelompok rentan.	Jawa Pos	Poin indikator 17

39	14/09/2020	Ketua Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar, KPU RI, Teteng.	Bawaslu Kota Blitar menolak seluruh gugatan Lisminingsih-Teteng	Peraturan persyaratan Bapaslon dapat ditegakan	Mayangkara, blitarkota.go.id	Potensi indikator 18
40	14/09/2020	Bawaslu Kota Blitar, Lisminingsih-Teteng, KPU Kota Blitar	Pasca pembacaan hasil penolakan gugatan dari Bawaslu Kota Blitar, pasangan Lisminingsih-Teteng masih memikirkan langkah yang akan diambil selanjutnya terkait masalah hasil gugatan tersebut.	Dugaan adanya kecurangan pada proses pelaksanaan Pilwali 2020 yang berpotensi menimbulkan konflik.	Jawa Pos	Potensi indikator 16 dan 25
41	14/09/2020	Komisiner KPU Kota Blitar Divisi Teknis (Hernawan Miftakhul Habib)	KPU Kota Blitar mengatakan bahwa berkas pendaftaran Bapaslon Pilwali 2020 tidak ada yang memiliki kesalahan fatal	Bapaslon bisa memperbaiki kesalahan berkas pendaftaran sesuai waktu yang ditentukan serta berhak maju untuk Pilwali 2020	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
42	16/09/2020	Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, Pemkot Blitar, KPU	Pemkot Blitar mengalokasikan dana sebesar Rp. 3 Milyar untuk kebutuhan APD dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di Pilwali Kota Blitar.	Pilwali tetap bisa diselenggarakan secara aman meskipun berada dalam masa pandemi	Mayangkara	Dukung indikator 14 dan 20
43	19/09/2020	Ketua KPU Kota Blitar (Choirul Umam), TNI-Polri	KPU bersama TNI-Polri amankan kampanye di tengah covid	Kampanye di tengah pandemi berjalan aman dan lancar	blitarkota.go.id	Dukung indikator 17
44	19/09/2020	Komisiner KPU Kota Blitar	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM (Rangga Bisma Aditya): Peserta rapat terbuka dan terbatas dibatasi saat kampanye Pilwali	Rapat terbuka dan terbatas di tengah pandemi berjalan aman dan lancar	blitarkota.go.id	Cegah indikator 16, dukung indikator 17
45	21/09/2020	Kapolres Blitar Kota Wali Kota Blitar KPU, Bawaslu, Dandim-Camat dan Lurah	Pemkot adakan rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pilwali pilkada serentak	Seluruh pihak diminta kooperatif serta membantu ciptakan jalannya pilkada serentak dengan damai	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11, cegah indikator 16

46	22/09/2020	Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Blitar (Hakim Sisworo), Komisioner KPU Kota Blitar	GGTP Covid-19 Kota Blitar minta kampanye Pilwali 2020 dilakukan secara daring	Mengingat Kota Blitar sedang alami pandemi covid-19, kampanye daring dapat kurangi kerumunan. Jika kampanye dilakukan di tempat umum, maka timses paslon harus menjamin penerapan protokol kesehatan	blitarkota.go.id Koran Memo, Jawa Pos	Dukung indikator 11 dan 14
47	23/09/2020	Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Blitar (Rudy Wijonarko)	Petugas percepatan penanganan covid-19 Kota Blitar memaparkan aturan pelaksanaan Pilwali	Pilwali di tengah pandemi dapat berjalan dengan aman dan lancar	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11 dan 14
48	23/09/2020	Bawaslu Kota Blitar. KPU Kota Blitar, ASN, Kepolisian	Bawaslu Kota Blitar memberikan rekomendasi kepada KPU agar pada proses pengundian nomor urut tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.	Proses pelaksanaan Pilwali 2020 tetap berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.	Jawa Pos	Dukung indikator 11 dan 14
49	23/09/2020	Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis (Hernawan Miftakhul Habib)	Timses harus segera membuat rekening dana kampanye	Alokasi bantuan dana kampanye benar tersalurkan	blitarkota.go.id	Tidak ada
50	23/09/2020	(Choirul Umam) Ketua KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar tetapkan Santoso-Tjujuk dan Henry-Yasin sebagai Paslon Pilwali 2020	Dua calon berhak dipilih dan memberikan kinerja terbaik	blitarkota.go.id	Dukung indikator 11
51	25/09/2020	Bakesbangpol, FKUB kota Blitar, FKUB Jatim, Sekda Kota Blitar, Zainal Abidin	Bakesbangpol aktif menciptakan suasana kondusif jelang Pilwali 2020 dengan melibatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum komunikasi para tokoh agama di Kota Blitar.	Toleransi keagamaan di Kota Blitar mendapat apresiasi dari sejumlah daerah salah satunya FKUB Provinsi Jawa Timur. Pilwali 2020 berlangsung dengan damai dan kondusif	Koran Memo,	Dukung indikator 11 dan 14
52	26/09/2020	Komisioner KPU Kota Blitar, Bawaslu	Larangan adanya konser musik dalam kegiatan kampanye Pilwali Blitar 2020 yang melibatkan perkumpulan massa.	Kampanye dukungan tetap boleh teralaksana namun tidak boleh menciptakan kerumunan yang besar	Mayangkara, blitarkota.go.id, Koran Memo	Dukung indikator 11

53	26/09/2020	Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar, Satpol PP,	Penertiban APK yang melanggar peraturan pemasangan, tim paslon diberi waktu 2 hari untuk melepas sendiri	Proses Pilwali berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	Jawa Pos	Dukung indikator 11
54	26/09/2020	Dinas Perhubungan Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar segera merencanakan peraturan daerah khusus untuk pesepeda.	Diterbitkan Perda khusus bagi pengguna sepeda.	Jawa Pos	Tidak ada
55	28/09/2020	Komisioner Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar	Setelah total DPS ditetapkan oleh KPU Kota Blitar ternyata masih ditemukan data pemilih ganda sebanyak 87 orang. Data pemilih ganda ditemukan saat dilakuakn pengecekan NIK, tanggal lahir maupun nama pemilih.	KPU Kota blitar harus menindak lanjuti data pemilih ganda.	Mayang-kara	Dukung indikator 14
56	29/9/2020	Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar	Larangan untuk tampilkan foto presiden dan wakil presiden dalam APK.	Proses kampanye Pilwali berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	Jawa Pos	Cegah indikator 16
57	29/09/2020	Ketua DPRD kota Blitar Syahrul Alim	Agenda penyampaian ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah tahun 1989 tentang pendirian PDAM dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2004 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemkot Blitar.	Terbitnya Perda tentang Pendirian PDAM dan BPR di Kota Blitar	birawa, Jawa Pos, Bhirawa	Poin indikator 21
58	30/09/2020	Anggota Bapem Perda DPRD Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar.	Pemkot Blitar sedang menyiapkan beberapa tahapan termasuk kajian dalam menyusun sejumlah regulasi atau aturan tata tertib bagi pesepeda.	Terbitnya Perda pengguna sepeda untuk tingkatkan keamanan dan ketertiban bagi pengguna sepeda.	Jawa Pos	Tidak ada

59	30/09/2020	Polres Blitar Kota, Divisi Cyber Crime	Tim Cyber Polres Blitar Kota terus memantau 4 akun yang karena postingannya yang mengarah ke <i>black campaign</i> di Pilkada Serentak 2020.	<i>Black campaign</i> dapat diminimalisir	Mayangkara	Dukung indikator 11
60	01/10/2020	Anggota Bapem Perda DPRD Kota Blitar, Pemerintah Kota	DPRD Kota Blitar akan menyetujui semua raperda yang diusulkan Pemkot selama raperda tersebut untuk kebaikan masyarakat termasuk raperda tentang pesepeda	DPRD dan Pemkot bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat	Mayangkara	Tidak ada
61	01/10/2020	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dispendik Kota Blitar, Dispendukapil, Gubernur	Pengajuan subsidi kuota internet bagi seluruh siswa di kota Blitar baik negeri maupun swasta dengan anggaran dana 3 milyar.	Anggaran pendidikan meningkat.	Jawa Pos	Poin indikator 20
62	03/10/2020	Ketua RW 9 Kelurahan Bendogerit, Dispora, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar	Warga menuntut DPRD Kota Blitar untuk segera mengambil tindakan terkait dengan pengambil alihan arena sirkuit tanpa pelibatan warga	Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan meningkat.	Jawa Pos, Koran Memo	Poin indikator 17
63	05/10/2020	Komisioner KPU Kota Blitar,	KPU memfasilitasi dan berikan kelonggaran kepada Tim Sukses Paslon Pilwali Blitar 2020 untuk mencetak sendiri Alat Peraga Kampanye (APK)	Timses diizinkan untuk menyebarkan dukungan ke berbagai daerah di Kota Blitar	Mayangkara	Dukung indikator 14
64	05/10/2020	Polda Jawa Timur, Influencer, Polres Blitar kota	Mengantisipasi adanya kampanye hitam, libatkan influencer untuk memantau aktifitas tim paslon pada saat kampanye.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat (Influencer) dalam memantau kampanye melalui media sosial meningkat.</li> <li>Pilwali 2020 berlangsung secara jurdil dan damai.</li> </ul>	Jawa Pos	Dukung indikator 11

65	7/10/2020	Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim bersama dengan wakilnya Agus Zunaedi, Pjs. Walikota Blitar Jumadi, Sekda Rudy Wijanarko, dan kepala OPD se-Kota Blitar	Rapat paripurna dengan 3 agenda yaitu penyampaian pandangan umum fraksi DPRD tentang rancangan peraturan daerah perumda air minum, bank perkreditan rakyat dan dan tanggapan Walikota Blitar soal pandangan umum fraksi DPRD disertai penjelasan dalam ranperda tentang APBD tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disahkan Ranperda terkait Perumda air minum dan BPR.</li> </ul>	Koran Memo, Bhirawa,	Poin indikator 21 dan 22
66	07/10/2020	DPRD kota Blitar, Buruh, Tani	Kelompok forum peduli buruh dan tani mendatangi kantor DPRD kota Blitar untuk meletakkan karangan bunga di depan kantor wakil rakyat sebagai bentuk rasa prihatin dan kekecewaan atas penetapan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Masyarakat mendesak DPRD Kota Blitar segera menyampaikan tuntutan penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan meningkat.</li> <li>Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan meningkat.</li> </ul>	Jawa Pos, Koran Memo, Harian Bangsa	Tanpa ricuh, poin indikator 17
67	08/10/2020	Mahasiswa, Masyarakat, DPRD Kota Blitar, Kabag Ops Polres Blitar Kota,	Mahasiswa dan elemen masyarakat Blitar menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Kota Blitar dengan massa sebanyak 250 orang.	Masyarakat berani menyuarakannya pendapatnya	Mayangkara	Tanpa ricuh, Poin indikator 17
68	08/10/2020	Aliansi Cipayang Plus Blitar Raya, Mahasiswa Kota Blitar, DPRD Kota Blitar	Penolakan UU Omnibus Law oleh DPR secara cepat & tergesa-gesa	Memancing adanya unjuk rasa dari beberapa komunitas di Kota Blitar	Mayangkara	Tanpa ricuh, Poin indikator 17
69	08/10/2020	Siswa Kota Blitar, Pemerintah Provinsi Jatim.	Keluhan siswa tentang pemberian subsidi kuota internet yang kurang efektif.	Jumlah pengaduan masyarakat meningkat.	Jawa Pos	Poin indikator 17

70	09/10/2020	Cipayung Plus Blitar Raya, Mahasiswa Kota Blitar, DPRD Kota Blitar.	Penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh Cipayung Plus Blitar Raya dan Mahasiswa Kota Blitar. Aksi unjuk rasa Masyarakat mendesak DPRD Kota Blitar segera menyampaikan tuntutan penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan meningkat.</li> <li>Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan meningkat.</li> </ul>	Jawa Pos	Tanpa ricuh, Poin indikator 17
71	12/10/2020	Ketua Bapemperda DPRD Kota Blitar.	Badan Pembentuk Perda DPRD Kota Blitar memastikan hanya 4 Ranperda saja yang bisa dibahas dan ditetapkan pada tahun ini dari total keseluruhan ada 10 Ranperda. Ranperda tentang ketenagakerjaan yang termasuk ranperda inisiatif akan ditunda terlebih dahulu karena masih menunggu kejelasan tentang UU Cipta kerja dari pusat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Ranperda tenaga kerja terkendala UU Cipta kerja dari pusat.</li> </ul>	Jawa Pos	Poin indikator 21
72	14/10/2020	Kapolres Blitar kota, para alim ulama, takmir Masjid, Ormas Islam Kota Blitar. Ketua MUI Kota Blitar	Polres Blitar kota melakukan doa bersama dan deklarasi Pilkada damai untuk menjaga kondusifitas wilayah kota Blitar selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Deklarasi ditandai dengan penandatanganan Pilkada damai oleh peserta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat menjaga kondusifitas sehingga Pilwali 2020 berjalan dengan tertib dan damai.</li> </ul>	Koran Memo	Tanpa ricuh, Cegah indikator 16
73	16/10/2020	KPU Kota Blitar,	Ditemukan 571 indikasi data pemilih baru yang belum masuk DPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat</li> <li>Jumlah surat suara harus ditambah</li> </ul>	Mayang-kara	Dukung indikator 13



74	16-31/10/2020	Ketua DPRD kota Syahrul Alim, Pjs Walikota Blitar Jumadi, Sekda Kota Blitar Rudy Wjjanarko, Forkopimda dan sejumlah kepala OPD Pemkot Blitar	Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap ranperda tentang APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 dan tanggapan atau jawaban Walikota Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.	Penetapan ranperda tentang APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021.	forum nusantara	Dukung indikator 22
75	17/10/2020	Komisioner Bawaslu Kota Blitar, BKD, ASN, Bawaslu, Tim Cyber.	Himbauan kepada para ASN di Kota Blitar untuk netral, tidak menyukai atau mengomentari postingan dari tim paslon.	ASN menjaga netralitas dan kondusifitas untuk tidak berpartisipasi dalam kampanye Pilwali 2020.	Koran Memo, Jawa Pos	Cegah indikator 18
76	18/10/2020	Kepala SMKN 2 Kota Blitar, Pelajar, Gubernur	Subsidi kuota internet selama 4 bulan dari Kemendikbud kurang efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebebasan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat.</li> <li>Jumlah pengaduan masyarakat meningkat.</li> </ul>	Koran Memo	Poin indikator 17
77	19/10/2020	KPU Kota, Bawaslu, Dispenduk capil	DPT sudah ditetapkan oleh KPU Kota Blitar, tetapi ada indikasi 571 pemilih belum masuk DPT.	Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih belum terjamin dan terlindungi.	Jawa Pos	Dukung indikator 13
78	20/10/2020	Dispenduk capil Kota Blitar	Menjelang Pilwali Blitar 2020 banyak warga yang belum memiliki KTP elektronik	Perekaman E-KTP harus digencarkan	Mayangkara, blitarkota.go.id	Dukung indikator 11 dan 14
79	21/10/2020	Pelajar dan Kabid Dispendik Kota Blitar	Pelajar mengadu Penyaluran bantuan subsidi kuota internet dari kemendikbud masih belum maksimal	Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan meningkat.	Jawa Pos	Poin indikator 17
80	22/10/2020	Orangtua pelajar, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar,	Hak masyarakat untuk mendapatkan seragam gratis tertunda karena spesifikasi tidak sesuai dengan perwali nomor 39 tahun 2020 tentang pakaian seragam.	Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan meningkat.	Koran Memo	Poin indikator 17

81	04/11/2020	TNI, Polisi, Linmas, dan Satpol PP	Pengamanan Pilwali Blitar 2020 tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polisi, tetapi juga melibatkan Linmas dan Satpol PP.	Partisipasi Anggota Linmas dan Satpol PP dalam Pilwali 2020 turut menjamin berjalannya Pilwali yang jurdil dan damai.	Jawa Pos	Cegah indikator 16
82	5/11/2020	Masyarakat, aktivis dan Bawaslu	APK paslon Pilwali Kota Blitar 2020 yang dipasang di pohon pinggir jalan menjadi sorotan masyarakat.	Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan meningkat.	Koran Memo	Poin indikator 17
83	10/11/2020	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dispendik Kota Blitar, Walikota Blitar.	Usulan pembatalan subsidi kuota internet karena tumpang tindih dengan subsidi yang diberikan Kemendikbud. Pemkot akan melakukan pengusulan ulang dalam anggaran APBD 2021.	Anggaran pendidikan mengalami revisi.	Jawa Pos	Poin indikator 20
84	11/11/2020	Bakesbangpol dan PBD, KNPI Kota Blitar, pemuda dan mahasiswa. Komisiner KPU	Blitar Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar (Hakim Sisworo), Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU (Rangga Bisma Aditya) tentang Partisipasi perempuan dalam pesta demokrasi	Meningkatnya pengetahuan sekaligus penguatan peran perempuan terutama jelang Pilkada 2020.	blitarkota.go.id	Dukung indikator 14
85	11/11/2020	Dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKP 2) Kota Blitar, DPRD Kota Blitar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar mengusulkan pengadaan dua barang yaitu blast freezer atau lemari es pembeku dan restraining box atau alat untuk merobohkan sapi dengan mesin hidrolik. DPRD Kota Blitar hanya menyetujui satu usulan pengadaan barang dalam APBD 2021.	Kinerja birokrasi	Jawa Pos	Tidak ada

86	11/11/2020	Ketua dan Wakil DPRD Kota Blitar, PIt Walikota Blitar Jumadi, Sekda Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Dandim 0808/ Blitar, Danyonif 511/ Blitar, Pengadilan Negri Blitar, Kajari beserta Kepala OPD Pemkot.	Rapat paripurna penetapan Peromperda 2021, dan Persetujuan Bersama Atas Raperda Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.	Salah satu hasil dari paripurna ini adalah sejumlah rekomendasi	Jawa Pos	Poin indikator 22
87	14/11/2020	Ketua KPU Kota Blitar, PPS, PPK, KPPS.	Ketua KPU Kota Blitar mengadakan bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara untuk memberikan pemahaman awal kepada PPS dan PPK tentang pemungutan dan perhitungan suara.	Kualitas PPS dan PPK pada Pilwali Blitar 2020 meningkat sehingga proses Pilwali yang jujur dan damai tercapai.	Koran Memo	Dukung indikator 11, cegah indikator 19
88	16/11/2020	KPU Kota Blitar	Penetapan hasil rekapitulasi Pilwali Blitar 2020 menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Blitar melebihi target nasional.	Partisipasi politik masyarakat dalam Pilwali 2020 yang tinggi meningkatkan kehidupan demokrasi di Kota Blitar.	Memo X	Poin indikator 14
89	17/11/2020	Ketua dan Wakil DPRD Kota Blitar, Pjs Walikota Blitar, Sekda Kota Blitar, Kepala OPD, Polres Blitar Kota, Dandim 0808/Blitar, Danyonif511/ Blitar, PN, dan Kajari Blitar	Hasil rapat Penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) dan Persetujuan Bersama Atas Ranperda tentang APBD Kota Blitar 2021 disetujui oleh semua pihak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propemperda menghasilkan perda-perda baru.</li> <li>• Penetapan Ranperda tentang APBD Kota Blitar 2021.</li> </ul>	Koran Memo, Jawa Pos	Poin indikator 21
90	18/11/2020	KPU Kota Blitar, PPK, PPS.	Logistik sudah tiba di KPU diantaranya kotak suara, kabel ties, segel dan tinta. Demi keamanan surat suara, pelipatan surat suara tidak melibatkan pihak luar, tapi melibatkan sekitar 40 orang dari PPK dan PPS.	Kecurangan Pilwali yang berkaitan dengan logistik dan surat suara dapat dicegah dan diminalisir.	Koran Memo	Dukung indikator 19

91	18/11/2020	Pemkot Blitar, Bakesbangpol Kota Blitar.	Mewujudkan Pilkada yang aman, sehat dan damai, Pemkot Blitar memberikan total anggaran 5 miliar untuk kebutuhan APD lengkap dan Rapid Test KPPS.	Pilwali Blitar 2020 berlangsung aman, sehat dan damai.	Koran Memo	Dukung indikator 14
92	20/11/2020	KPU Kota Blitar.	Tingginya tingkat antusiasme masyarakat pada debat Pilwali Blitar 2020.	Partisipasi politik masyarakat dalam Pilwali 2020 meningkat.	Koran Memo	Dukung indikator 14
93	27/11/2020	Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat (Gogot Cahyo Baskoro)	KPU Kota mendapat apresiasi dari KPU Jatim berkat inovasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilwali 2020	Nama KPU Kota Blitar menjadi harum dan partisipasi masyarakat dalam Pilwali 2020 meningkat	blitarkota.go.id	Poin indikator 14
94	29/11/2020	Kasubag Umum Sekretariat KPU Kota Blitar.	Mendekati pelaksanaan Pilwali Blitar pada 9 Desember 2020 ditemukan surat suara rusak sebanyak 134 lembar.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk ketersediaan surat suara.	Koran Memo, Jawa Pos	Cegah indikator 11
95	30/11/2020	Kepala Diskominfo	Himbauan untuk tetap mematuhi proses dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.	Pilwali 2020 berjalan aman, sehat dan damai.	Jawa Pos	Cegah indikator 11
96	01/12/2020	Kasubag Umum Sekretariat KPU Kota Blitar	Menjelang pemungutan suara Pilwali Kota Blitar, kekurangan surat suara masih cukup banyak yaitu sekitar 1.893 lembar.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk ketersediaan surat suara.	Harian bangsa	Cegah indikator 11
97	3/12/2020	Kapolres Blitar Kota, Tokoh Agama	Kunjungan Kapolres ke kantor cabang Nahdhatul Ulama dan kantor cabang Muhammadiyah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi gunakan hak pilih namun tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.	Masyarakat berpartisipasi untuk mewujudkan Pilwali yang sehat, aman dan damai dengan menerapkan Proses.	Koran Memo	Dukung indikator 14

98	3/12/2020	DPRD Kota Blitar.	Warga menuntut DPRD menindaklanjuti kasus pendirian Tower BTS di Jl. Melati gang 2. DPRD Kota Blitar melakukan sidak ke lokasi tower.	Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan meningkat.	Koran Memo	Poin indikator 17
99	08/12/2020	Ketua KPU Kota Blitar, PPK, PPS.	Menjelang pemungutan suara Pilwali Blitar semua logistik sudah lengkap dan sudah siap untuk didistribusikan ke TPS di seluruh Kota Blitar.	Pelaksanaan Pilwali Kota Blitar 2020 berjalan jurdil, sehat, aman dan damai.	Koran Memo	Cegah indikator 11
100	09/12/2020	Ketua Bawaslu Kota Blitar (Bambang Arintoko)	Bawaslu Kota Blitar tidak menemukan adanya praktik <i>money politic</i> di masyarakat	Masyarakat yang sadar bahwa <i>money politic</i> <b>tidak menguntungkan</b>	blitarkota.go.id	Cegah indikator 19
101	09/12/2020	Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Rangga Bisma Aditya)	Hak suara pasien covid-19 tetap terpenuhi	Partisipasi masyarakat yang merupakan pasien covid-19 tidak terlupakan	blitarkota.go.id	Cegah indikator 11
102	10/12/2020	TNI, Polri, Petugas TPS, Camat, Warga, Yulia Sri Wulandari dan Bibit Santoso, Sekda Kota Blitar	Antusiasme warga penyandang disabilitas menyalurkan hak suaranya. Datang ke lokasi TPS yang berjarak sekitar 500 m dengan menggunakan kursi roda.	Partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas pada Pilwali Blitar 2020 tinggi.	Jawa Pos	Cegah indikator 12. Dukung indikator 14
103	12/12/2020	Ketua dan Wakil DPRD, Walikota dan Sekda Kota Blitar, Forkopimda dan dan sejumlah kepala OPD.	Rapat paripurna dengan agenda penetapan persetujuan bersama atas 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Kota Blitar tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelenggaraan program Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.	Penetapan Raperda inisiatif DPRD Kota Blitar tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan dan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.	Jawa Pos	Poin indikator 21

104	17/12/2020	TNI, Polri, Ketua MUI Kota Blitar, Ketua Forum Umat Beragama.	Tokoh Agama mendukung TNI dan Polri menindak tegas oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama, dengan model dakwah menyampaikan ujaran kebencian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radikalisme agama dapat dicegah.</li> <li>• Kebebasan berkeyakinan dan toleransi beragama di Kota Blitar terjamin dan terlindungi.</li> </ul>	Koran Memo	Cegah indika-tor 17
105	24/11/2020	Warga Jl. Melati, DPRD Kota, Pemerintah Kota.	Warga melakukan aksi unjuk rasa menuntut DPRD Kota Blitar untuk menindak lanjuti kasus pendirian tower BTS di Jl. Melati Gang 2 Kepanjen Kidul. Warga meminta Izin Mendirikan Bangunan Tower tersebut dicabut karena diduga IMB dimanipulasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat diakomodir.</li> <li>• Jumlah pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan meningkat.</li> </ul>	Harian Bangsa, Koran Memo, Jawa Pos, Memo X	Poin indika-tor 17
106	30/12/2020	Kapolres Blitar Kota	Laporan tindak pidana dan penuntasan kasus yang meningkat selama tahun 2020	Pihak kepolisian berpartisipasi dalam menindak lanjuti kasus pidana di Kota Blitar	Memo-randum, Harian Bangsa	Cegah indika-tor 28

#### 4.3.1. Analisis Isi Berita Media Massa pada Semester II (Juli-Desember 2020)

##### 1. Mayangkara, 04 Juli 2020, Masyarakat Keluhkan Banyaknya Polisi Yang Kawal Petugas Pps Pilwali Blitar 2020 Di Lapangan

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko mengatakan masyarakat mengeluhkan pengamanan dari pihak kepolisian pada saat pelaksanaan proses verifikasi faktual yang dilakukan petugas PPS dari rumah ke rumah. Ada sebanyak 4 personil dari pihak kepolisian yang mengawal satu petugas PPS, Masyarakat merasa takut dengan banyaknya 4 personil kepolisian yang mengawal petugas. Sebenarnya hasil rapat koordinasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian Blitar Kota sudah disepakati bahwasanya petugas PPS didampingi oleh seorang pihak kepolisian, itu pun hanya memantau dari jauh dan tidak masuk ke dalam rumah. Permintaan untuk pengawalan kondisional seperti ini sesuai permintaan kawasan yang diverifikasi faktual. Pasangan bakal calon perseorangan juga merasa keberatan dengan pengamanan yang dilakukan pada proses verifikasi faktual yang mengunjungi rumah pendukungnya. Bawaslu Kota Blitar sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Blitar untuk menangani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis, Hernawan Miftakhul Khabib menjelaskan memang benar masyarakat mengeluhkan hal tersebut, tetapi ketakutan itu muncul bukan

karena pengamanan dari pihak kepolisian namun atribut yang digunakan petugas PPS pada saat melakukan verifikasi faktual menggunakan APD lengkap. Menurutnya rasa ketakutan masyarakat terjadi pada saat awal pelaksanaan saja, dan saat ini masyarakat sudah memahami jika ada pengawasan yang ketat dari pihak kepolisian untuk memantau petugas PPS. Proses verifikasi faktual data dukungan bakal calon perseorangan pada Pilwali Blitar 2020 ditargetkan selesai selama 14 hari dimulai sejak 26 Juni 2020 lalu.

## 2. Blitarkota.go.id., 09 Juli 2020, Kesempatan Terakhir Verifikasi Faktual Kpu Kota Blitar

Hari terakhir verifikasi faktual berkas dukungan calon perseorangan 9 Juli 2020, KPU Kota Blitar memberikan kesempatan bagi para pendukung dan tim pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan berkas dukungan dengan mendatangi PPS di 21 Kelurahan dari tiga Kecamatan yang ada di Kota Blitar. Mifthakul Khabib, Komisioner KPU kota Blitar mengatakan, terdapat 35 ribu lebih berkas dukungan untuk tiga pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. PPS sudah mendatangi rumah di masing-masing pendukung sesuai alamat, namun 40 persen dari 35 ribu orang tidak ada di rumah atau tidak dapat ditemui. Khabib juga menjelaskan, KPU Kota Blitar memberikan kesempatan untuk warga yang mendukung pasangan calon menyerahkan berkas dukungannya hingga pukul 12 malam di kantor PPS. Khabib menambahkan, dari 40 persen warga yang tidak dapat ditemui akan berkurang pada hari terakhir verifikasi faktual. Namun untuk rekapitulasi ditingkat PPK akan dilakukan pada 13 hingga 19 Juli 2020.

## 3. Mayangkara, 11 Juli 2020, KPU Jatim targetkan jumlah partisipasi pemilih pilkada serentak 2020 sebesar 77,5 persen

KPU Jatim menargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen dalam pilkada serentak 2020 di Jawa Timur. Pada rapat koordinasi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang diadakan pada hari Kamis, 09 Juli 2020, Choirul Anam (Ketua KPU Jatim) mengatakan target yang ditetapkan pada Pilkada serentak di Jatim ini sudah diturunkan dari target semula yaitu 80 persen menjadi 77,5 persen, seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 saat ini. KPU Jatim meminta KPU Kota/ Kabupaten yang melaksanakan Pilkada untuk mengoptimalkan sosialisasinya secara daring yaitu melalui webinar atau media sosial dimana bisa mengumpulkan massa sebanyak 400-500 orang.

Selain itu sosialisasi tatap muka juga akan dilakukan, mengingat larangan berkerumun sudah dicabut oleh Kapolri. Cara ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih sehingga optimis bisa mencapai target yang ditentukan. Komisioner KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya mengatakan untuk Kota Blitar target partisipasi pemilih sebesar 80 persen di atas target yang diberikan oleh KPU Jatim. Namun target ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu Kota Blitar Pada 2019 yaitu sebesar 83,5 persen.

#### 4. Mayangkara, 14 Juli 2020, Jumlah Pemilih Pemula Di Pilwali Blitar Bertambah 500 Orang Lebih

Komisioner Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Blitar, Ninik Sholikhah mengatakan jumlah data pemilih pemula di Kota Blitar bertambah sebanyak 543 orang, data ini didapatkan dari KPU Pusat untuk pemilih pemula dari KPU RI. Menurutnya tambahan ini berasal dari warga sudah memiliki umur 17 tahun pada saat nanti pemilihan pada bulan Desember 2020, selain itu juga ada warga yang beralih status dari TNI/Polri ke Sipil. Penambahan ini juga disebabkan karena molornya jadwal pilkada serentak yang semula dilaksanakan pada tanggal Rabu 23 September 2020 menjadi Rabu 9 Desember 2020. Awalnya data pemilih pemula di Kota Blitar sebanyak 3.589 karena dilaksanakan pada bulan desember 2020 totalnya mencapai 4.132 orang.

#### 5. Blitarkota.go.id 14/07/2020, KPU Kota Blitar Minta PPDP Aktif Berkoordinasi Dengan RT-RW

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar siap melanjutkan tahapan Pilwali 2020 yaitu pemutakhiran data pemilih, yang akan dilaksanakan mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Berbagai persiapan sudah dilakukan KPU Kota Blitar, mulai dari perekrutan Petugas Pemutakhir Data Pemilih (PPDP), rapid test petugas, pelantikan dan bimbingan teknis. Ninik Solikhah-Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengatakan, PPDP yang akan terjun melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilwali 2020 sebanyak 259 orang. Seluruhnya dilantik Senin 13 Juli 2020 dimasing-masing kecamatan Kota Blitar, dan langsung menerima bimbingan teknis. Ninik mengatakan pelaksanaan coklit berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Setiap petugas sudah menerima APD, berupa 4 masker, 4 botol *hand sanitizer* dan *face shield*. Disinggung mengenai perlakuan petugas saat melakukan coklit data pemilih yang berstatus PDP



dan konfirmasi Covid-19, Ninik meminta petugas agar selalu berkoordinasi dengan RT-RW dan anggota PPS. Apakah cokolit dilakukan cukup melalui RT-RW, atau melalui strategi lainnya. Sementara itu, terdapat 117 .175 data pemilih yang harus dicoklit oleh PPDP selama 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.

6. Mayangkara, 15 Juli 2020, Puluhan Massa Dari Mahasiswa Dan Warga Blitar Selatan Berunjuk Rasa Tuntut Perhutani Tindak Para Pelaku Perusakan Hutan

Pada hari kamis 16 Juli 2020 puluhan massa gabungan yang berasal dari warga Blitar Selatan dan mahasiswa PMII meggelar aksi unjuk rasa didepan kantor KPH Perhutani Blitar. Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menuntut perhutani untuk menindak lanjuti para pelaku yang merusak hutan jati di wilayah Blitar selatan. Fathur Rochman perwakilan mahasiswa PMII menyampaikan kerusakan hutan diwilayah Blitar Selatan dapat berdampak dan menimbulkan masalah bahkan bencana alam. Dalam orasi tersebut massa meminta untuk menindaklanjuti oknum yang terlibat dalam pengrusakan hutan dan memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan pribadi. Perwakilan dari perhutani menyampaikan kepada massa bahwasanya pihaknya sudah berkoordinasidengan pihak kepolisian terkait dengan adanya pelaku pengrusakan hutan. Selain itu pihak perhutani juga sudah beberapa kali lapor polisi terkait dengan oknum pengrusakan hutan. Aksi unuk rasa atau demo ini juga diwarnai aksi teatrikal yang dilakukan para mahasiswa PMII yang bertemakan dampak pengrusakan hutan. Beruntungnya aksi unjuk rasa ini berjalan dengan kondusif dengan pengawalan dan pengamanan dari petugas kepolisian.

7. Blitarkota.go.id,. 20 Juli 2020, Tiga Pasangan Calon Perseorangan Pilwali Tidak Penuhi Syarat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar melakukan rekapitulasi verifikasi faktual tingkat kota di salah satu rumah makan Jl. Kalimantan Senin 20 Juli 2020. Dalam kegiatan ini KPU Kota Blitar membacakan hasil rekapitulasi verifikasi faktual ditingkat kecamatan. Hasilnya dari tiga calon bakal perseorangan Pilwali 2020 tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan. Choirul Umam-Ketua KPU Kota Blitar mengatakan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi bakal calon perseorangan sebanyak 11.355 dukungan. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi dari tiga bakal calon perseorangan tidak ada yang memenuhi syarat tersebut.

Umam menyebut bakal calon perseorangan Pilwali 2020 masing-masing Sumari-Edi Widodo mengumpulkan 1.987 dukungan. Purnawan Buchori-Indri Kuswati mengumpulkan 5.883 dukungan. Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono mengumpulkan 5.469 dukungan. Umam menyebut hasil rekapitulasi tahap pertama ini masih belum bisa dijadikan acuan karena masih ada proses perbaikan yang akan dilakukan setelah hasil rekapitulasi di tingkat KPU diumumkan 22 Juli 2020 nanti. Proses perbaikan dilakukan seperti sebelumnya calon perseorangan mengumpulkan data dukungan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dalam proses perbaikan calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan dua kali lipat dari jumlah kekurangan syarat minimal. Jika pada proses perbaikan tetap tidak bisa memenuhi syarat minimal dukungan maka ketiga calon perseorangan Pilwali dipastikan gagal mendaftar di Pilwali Kota Blitar 2020.

8. Blitarkota.go.id, 23 Juli 2020, KPU Buka Perbaikan Bacali Yang Tidak Penuhi Syarat Dukungan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar membuka masa perbaikan bagi Bakal Calon Perseorangan Pilwali (Bacali) 2020, yang gagal memenuhi syarat minimal dukungan pada verifikasi faktual tahap pertama. Masa perbaikan secara resmi dimulai tanggal 22 Juli 2020. Miftakhul Khabib-Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Blitar mengatakan, pada masa perbaikan ini bacali diminta mengumpulkan dukungan dua kali lipat dari kekurangan pada verifikasi faktual tahap pertama. Jumlah dukungan masing-masing bacali berbeda, ada yang 18rb bahkan 20rb dukungan. Tim bacali harus mengumpulkan syarat dukungan ini tanggal 25 sampai 27 Juli 2020. Khabib menegaskan, pelaksanaan verifikasi faktual tahap kedua ini hampir sama dengan sebelumnya. Dimulai dengan pengumpulan dukungan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan tanggal 08 -16 Agustus 2020. Pelaksanaan verifikasi faktual pada masa perbaikan ini tidak dilakukan door to door, namun petugas mendatangi warga pendukung yang sudah dikumpulkan tim bacali di satu lokasi terbuka. Sementara itu, syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi bacali 2020 sebanyak 11.355 dukungan. Namun pada rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual tingkat Kota ke tiga bacali Kota Blitar tidak memenuhi syarat. Dengan rincian bacali Sumari - Edi Widodo mengumpulkan 1.987 dukungan, Purnawan Buchori - Indri Kuswati mengumpulkan 5.883 dukungan, dan Lisminingsih - Teteng Rukmocondrono mengumpulkan 5.469 dukungan

9. Mayangkara, 28 Juli 2020, Walikota Blitar Santoso Diadukan Mantan Walikota Blitar Samanhudi Anwar Ke Polres Blitar Kota Terkait Dugaan Penipuan Dana Rp 600 Juta.

Kuasa Hukum Samanhudi Anwar, Joko Trisno mengatakan pengaduan resmi dengan surat tanda terima pengaduan atau STTP nomor : STTP/185/VII/2020/JATIM/Polres Blitar Kota itu diadukan pada Selasa 14 Juli 2020 & diberikan tanda terima pada Kamis 23 Juli 2020. Dirinya, melaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp 600 juta untuk pengurusan administrasi kampus Universitas Sang Fajar pada tahun 2016 lalu. Selain Santoso, kliennya juga mengadukan Mukhroji warga Blitar yang juga mantan pengajar atau dosen di salah kampus di Kota Blitar. Menurut penjelasan Joko kejadian tersebut bermula pada saat Samanhudi Anwar masih menjabat sebagai walikota dan Santoso masih menjadi wakil walikota. Pada saat itu pihaknya ingin sekali menaikkan status dari akademi mejadi universitas. Kemudian santoso mempertemukan samanhudi Anwar dengan Mukhroji sebagai seseorang yang mampu mewujudkan keinginan Samanhudi Anwar. Pada pertemuan tersebut telah disepakai untuk perubahan status kampus memerlukan dana sebesar Rp 800 juta dengan perjanjian ketika perubahan status tersebut tidak berhasil maka dana tersebut akan dikembalikan. Merasa yakin dengan pembicaraan tersebut samanhudi memberikan uang pribadinya sebesar Rp 600 juta yang di transfer ke rekening atas nama Mukhroji, untuk kekurangannya akan dilunasi ketika SK perubahan status kampus tersebut diterima. Setelah dana di transfer, ternyata proses perubahan status kampus Putra Sang Fajar tidak terealisasikan, meskipun sudah sering kali ditanyakan namun tidak ada tanggapan yang lebih lanjut. Setelah menerima kuasa dari Samanhudi Anwar, beberapa upaya sudah dilakukannya untuk menyelesaikan masalah ini, mulai musyawarah yang tidak direspon, kemudian somasi pertama & kedua juga tidak dijawab. Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela membenarkan adanya pengaduan dari Joko Trisno terkait dugaan penipuan & penggelapan yang dilakukan Santoso dan Mukhroji, selain itu joko juga membawa bukti foto kopi transfer uang. Dalam aduannya, Joko juga membawa bukti fotokopi transfer uang. Namun Walikota Blitar, Santoso membantah kabar yang beredar itu.

#### 10. Blitarkota.go.id, 28 Juli 2020, KPU terima data dukungan bakal calon pilwali

Setelah menerima data dukungan bakal calon Pilwali 2020, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar tengah melakukan verifikasi administrasi yang dimulai tanggal 28 Juli sampai 04 Agustus 2020. Miftakhul Khabib, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis, mengatakan, total ada 24.000 lebih data dukungan bakal calon Pilwali yang masuk

tahap verifikasi administrasi. Data itu berasal dari dua bakal calon Pilwali 2020, yaitu Purnawan Buchori-Indri Kuswati dan Lisminingsih - Teteng Rukmocondrono. Sedangkan pasangan Sumari - Edi Widodo telah mengundurkan diri dari tahapan Pilwali 2020. Pada masa perbaikan ini pasangan Purnawan Buchori-Indri Kuswati menyerahkan 11.334 dukungan, dan Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono menyerahkan 13.732 dukungan. Pada verifikasi administrasi ini, terdapat 3 tahapan yang akan dilalui petugas, mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi data ganda, dan verifikasi data pendukung yang masuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Khabib menambahkan, jika hasil verifikasi administrasi ditambah hasil rekapitulasi verifikasi faktual tahap pertama memenuhi syarat minimal dukungan, maka bakal calon bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi faktual tahap ke dua. Syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi bakal calon sebanyak 11.355 dukungan

#### 11. Blitarkota.go.id, 30 Juli 2020, Coklit KPU Kota Blitar Mencapai 80% Dari Total DP4 117 Ribu Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilwali 2020, sejak pertengahan bulan lalu. 2 pekan berjalan, progres coklit KPU Kota Blitar mencapai 80%. Ninik Solikhah, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, saat dikonfirmasi mengatakan, sampai saat ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah mencoklit 100 ribu pemilih, atau sekitar 80 persen dari total Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) sebanyak 117.175 orang. Ninik menegaskan, untuk memaksimalkan tahapan coklit, minggu ini pihaknya akan melakukan *monitoring* dan evaluasi. Mengingat hingga saat ini masih ada beberapa petugas yang gagal menemui warga yang akan dicoklit. Ada juga petugas yang progres coklitnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan belum memisahkan antara data coklit sesuai A-KWK dan data pemilih baru. Sementara itu, pelaksanaan tahapan coklit data pemilih Pilwali 2020 sudah berlangsung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.

#### 12. Mayangkara 04/08/2020, Polres Blitar Kota Gelar Simulasi Sistem Pengamanan Jelang Pilwali Blitar 2020

Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Ahmad Rochan mengatakan dalam latihan simulasi sistem pengamanan menjelang Pilwali Blitar 2020, ada sejumlah personil melakukan simulasi pengendalian aksi unjuk rasa yang dilakukan salah satu pendukung calon di Pilwali. Latihan simulasi

pengamanan kota dilaksanakan di Jl. Panglima Sudirman depan Mapolres Bliatr Kota. Terlihat sejumlah polisi berdiri berjajar mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh salah satu pendukung salah satu calon yang merasa kecewa dengan hasil Pilwali Blitar 2020 di Kantor KPU. Pada awalnya massa menggelar aksi unjuk rasa dengan tertib dan terkendali, selang beberapa waktu kemudian suasana menjadi memanas, massa memaksa masuk dan berusaha menerobos barisan polisi yang berjaga di depan Kantor KPU Kota Blitar.aksi dorong antara massa debgab polisi pun terjadi. Bahkan ada sebagian dari merka yang melempari barisan polisi yang berjaga ketat di depan kantor KPU Kota Blitar. Aksi massa semakin tidak terkendali akhirnya polisi berusaha mengendalikan aksi unjuk rasa dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon. Setelah usaha untuk membubarkan massa berhasil beberapa anggota kepolisian menyisir sejumlah tempat untuk memastikan suasana sudah kondusif. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan untuk mempersiapkan anggota kepolisian dalam Pilwali Blitar 2020. Massa lari semburat membubarkan diri. Sejumlah berusaha anggota menyisir lokasi untuk memastikan suasana sudah kondusif.

### 13. Blitarkota.go.id, 04/08/2020, KPU Verifikasi Administrasi Dukungan Bacali 2020 Masih Mencapai 90%

Selasa, (04/08/2020) merupakan hari terakhir pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi (vermin), data dukungan bakal calon Wali Kota Blitar 2020. Namun progres yang dicapai KPU Kota Blitar masih 90%. Miftakhul Khabib, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis menginformasikan, hingga Selasa siang proses vermin masih 90%, karena pihaknya masih melaksanakan pendataan potensi kegandaan dan pencocokan data pendukung yang tidak masuk DPT atau DP4. Sementara pencocokan surat pernyataan dukungan dengan KTP sudah rampung sejak Minggu 02 Agustus 2020. Khabib menegaskan, tidak menemui kendala selama pelaksanaan vermin, namun rentan waktu yang relatif singkat membuat petugas harus bekerja ekstra. Sementara jumlah dukungan bakal calon Pilwali 2020 pada masa perbaikan ini mencapai 25.000 data. Disinggung mengenai perkiraan jumlah dukungan yang tidak masuk DPT dan potensi kegandaan, Khabib mengaku belum mengetahui karena proses masih berlangsung. Namun pihaknya optimis, proses vermin rampung sebelum jam 12 malam. Selanjutnya pihaknya akan mengeluarkan berita acara, dan tahapan dilanjutkan ke verifikasi faktual yang dilaksanakan tanggal 08-16 Agustus 2020. Seperti diberitakan sebelumnya, dua bakal

calon perseorangan Pilwali 2020, masing-masing Purnawan Buchori - Indri Kuswati dan Lisminingsih - Teteng Rukmo Condrono, harus mengikuti masa perbaikan. Dikarenakan data dukungan pada verifikasi faktual tahap pertama tidak memenuhi syarat minimal untuk maju ke Pilwali 2020.

#### 14. Mayangkara 10/08/2020, Pilwali Blitar 2020: KPU Blitar Kota Sediakan Tps Keliling Di Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Sakit

Komisioner KPU Kota Blitar, Ninik Sholikhah mengatakan akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara secara keliling di beberapa tempat seperti rumahsakit dan lapas, baik itu lapas anak maupun lapas lapas dewasa. Layanan TPS keliling ini dilakukan untuk memudahkan pemilih yang ada dilokasi tersebut untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilwali Blitar 2020, mengingat jumlah pemilihnya juga juga tidak banyak di lokasi itu. Pada tahun sebelumnya lapas menggunakan TPS khusus namun saat ini TPS khusus tidak diijinkan provinsi sehingga menggunakan TPS keliling. TPS keliling ini hanya diperuntukkan oleh mereka yang sedang berada dirumah sakit dan lapas saja, tidak diperbolehkan untuk umum.

#### 15. Blitarkota.go.id 12/08/2020, Bawaslu Prediksi Kerawanan Netralisasi ASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar memprediksi potensi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul adanya petahana yang ikut berpartisipasi pada Pilwali Kota Blitar 2020 saat diwawancara pada Rabu (12/08/2020). Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar mengatakan, ASN menjadi sorotan ketika ada petahana ikut maju di Pilwali Desember. Oleh karena itu, Bawaslu membentuk tim *cyber* untuk mengawasi kegiatan para ASN di media sosial menjelang Pilwali. Menurut Bambang, ASN yang menyukai unggahan gambar maupun video calon wali kota di media sosial, sudah bisa dikategorikan pelanggaran. Sebab dari menyukai unggahan itu, menunjukkan sikap tidak netral, apalagi ASN juga punya hak pilih di Pilwali. Menurut Bambang, sejauh ini Bawaslu belum menemukan pelanggaran soal netralitas ASN. Jika ada temuan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan melayangkan surat peringatan. Bambang menambahkan, terkait netralitas ASN, pihaknya juga sudah mengeluarkan surat himbauan ke Pemerintah Kota Blitar. Sementara itu, Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar mengaku sudah membuat surat himbauan soal

netralitas ASN di Pilwali Kota Blitar 2020, yang diserahkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala OPD juga diminta untuk mengawasi kegiatan pegawainya menjelang Pilwali Desember mendatang.

16. Blitarkota.go.id 13/08/2020, KPU Jatim, Petahana Tidak Perlu Mundur Dari Jabatan

Muhammad Arbayanto-Komisioner KPU Provinsi Jatim Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi, menyatakan bahwa Petahana tidak perlu turun dari jabatannya jika pihaknya turut serta dalam pemilihan. Hal ini disampaikan pada Kamis (13/08/2020) usai melakukan sosialisasi pencalonan Pilwali Kota Blitar 2020, di salah satu hotel Jl. Anjasmoro Kota Blitar. Arbuyanto mengatakan petahana tidak perlu mundur dari jabatan saat ikut Pilkada, namun wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara saat memasuki masa kampanye. Namun jika petaha berasal dari luar daerah, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala daerah. Pihaknya mencontohkan, saat Bupati Tulungagung mendaftar di Pilwali Kota Blitar, maka harus mundur dari jabatannya. Terkait sosialisasi pencalonan pada Pilwali Kota Blitar 2020, Arbayanto meminta para pemimpin partai politik untuk menyiapkan perlengkapan dokumen sejak jauh hari. Mulai dari surat rekomendasi dari partai politik yang harus ditandatangani ketua dan sekretaris. Kemudian surat keputusan (SK) kepengurusan partai politik yang juga harus disiapkan. Sedangkan syarat dari calon yang harus dilengkapi, mulai dari KTP, surat keterangan dari Pengadilan Negeri, dan surat keterangan dari kepolisian. Sementara itu, sesuai jadwal pendaftaran pencalonan Pilwali Kota Blitar dilaksanakan 4-6 September 2020.

17. Mayangkara 15/08/2020, Samanhudi Anwar Sudah Dimintai Keterangan Polisi Terkait Aduan Penipuan Yang Diduga Dilakukan Walikota Blitar

Kuasa Hukum Samanhudi Anwar, Joko Trisno mengatakan terkait aduannya ke polisi terhadap Walikota Blitar Santoso & Mukhroji tentang dugaan penipuan & penggelapan dana Rp 600 juta untuk pengurusan administrasi Kampus Putera Sang Fajar pada tahun 2016 lalu, kliennya Samanhudi Anwar sudah dimintai keterangan atau klarifikasi pihak penyidik Reskrim Polres Blitar Kota pada Kamis 13 Agustus 2020 siang. Ada 15 pertanyaan yang diajukan tim penyidik ke kliennya, seperti benarkah Samanhudi Anwar melakukan pengaduan & memberikan kuasa kepada

Joko Trisno untuk menindaklanjuti kasus ini atau bukan. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Ardi Purboyo membenarkan bahwa pihak penyidik sudah mengklarifikasi kepada samanhudi pada hari kamis 13 Agustus 2020. Penyidikan ini bertujuan untuk memastikan pengaduan Samanhudi. Namun kasus ini masih ditangguhkan karena kasus tersebut berhubungan dengan calon Pilwali Blitar 2020. Sesuai dengan STR Kapolri, apabila ada kasus yang berhubungan dengan calon yang maju pada Pilkada Serentak harus ditangguhkan untuk menjaga kondusifitas daerah.

18. Mayangkara 18/08/2020, Jelang Pilkada Serentak 2020 : Pelaku Penyebar Hoax Di Sosmed Diancam 6 Tahun Penjara Dan Denda 1 Miliar

Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Iptu Ahmad Rochan mengatakan kegiatan kampanye Pemilu atau Pilkada baik itu Pilwali atau Pilbup biasanya muncul berita-berita yang tidak benar atau hoax serta bernada provokatif yang dianggap meresahkan warga sosial media. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik atau UU ITE menyebutkan penyebar berita tidak benar atau hoaks dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) UU 19/2016, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun & atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Menurut Rochan pasal tersebut dikenakan para penyebar hoax di sosial media. Pelanggaran ITE saat ini memang sering terjadi. Berita hoax paling mudah disebarkan melalui sosial media seperti Facebook dan pesan berantai melalui WhatsApp misalnya. Polisi Polres Blitar Kota menghimbau untuk tidak mudah meneruskan pesan berantai yang tidak tahu kebenarannya, dan menjelang Pilwali dan Pilbud 2020 supaya masyarakat lebih bijak dalam menggunakan akun media sosialnya.

19. Blitarkota.go.id 20/08/2020, KPU Konfirmasi Dua Bakal Tidak Bisa Daftar Pilwali

Dua bakal calon perseorangan Pilwali Kota Blitar dipastikan tidak bisa maju ke tahap pencalonan, karena gagal memenuhi syarat minimal dukungan pada verifikasi faktual tahap ke dua. Hal ini dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar saat melakukan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan pada Kamis, (20/08/2020). Choirul Ummam, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, dua bakal calon perseorangan yang gagal maju ke tahap pencalonan yaitu Lisminingsih - Teteng Rukmo Condrono dan Purnawan Buchori - Indri Kuswati. Sesuai aturan bakal calon perseorangan harus memenuhi syarat minimal 11.355



dukungan. Namun keduanya tidak bisa memenuhi syarat tersebut, padahal KPU Kota Blitar sudah memberikan waktu perbaikan pada verifikasi faktual tahap dua. Umam menegaskan, dalam rapat pleno ini memang ada keberatan dari tim sukses pasangan Lisminingsih - Teteng. Tapi keberatan itu hanya berupa pendapat tanpa ada bukti-bukti data. Sementara pasangan Purnawan-Indri tidak nampak hadir, dan menerima hasil akhir verifikasi faktual tahap dua. Ummam menambahkan setelah ini KPU akan memulai tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang diusung partai mulai 4 September mendatang

#### 20. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id) 22/08/2020, Jelang Pemilu, Bawslu Kota Blitar Awasi Politisasi Bansos Oleh Calon Petahana

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar pada Sabtu,(22/08/2020) menyatakan telah mengantisipasi praktik politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilwali 2020. Hal ini menjadi perhatian Bawaslu karena masih banyak program bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, dan rawan menjadi ajang politisasi calon petahana Pilwali Kota Blitar 2020. Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar menjelaskan bahwa sudah menjalin koordinasi dengan Pemkot Blitar untuk mengantisipasi terjadinya praktik politisasi bansos. Langkah itu sesuai dengan yang diinstruksikan Bawaslu RI ke Bawaslu kota/kabupaten untuk mengawal program bansos jelang Pilkada serentak Desember mendatang. Bambang mengatakan Bawaslu RI memberikan beberapa elemen atau unsur politisasi program bansos dari pemerintah yang dilakukan calon petahana. Misalnya, bantuan beras yang kemasannya terdapat foto atau gambar calon petahana. Namun sejauh ini, pihaknya belum menemukan politisasi bansos di Kota Blitar. Selain politisasi bansos, Bawaslu juga mengantisipasi kerawanan netralisasi ASN untuk mendukung calon petahana. Untuk itu Bawaslu meluncurkan tim *cyber* untuk memantau aktivitas ASN di media sosial. Menurut Bambang hal ini juga telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Blitar, ASN yang diketahui melanggar kode etik dan aturan yang berlaku, akan dikenai sanksi ringan hingga pencopotan jabatan.

#### 21. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id) 26/08/2020, Kpu Lakukan Persiapan Jelang Pencalonan Pilwali 2020

Tahap pencalonan Pilwali Kota Blitar akan bergulir awal September mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mulai melakukan berbagai persiapan, diantaranya sosialisasi syarat pencalonan pada partai politik. Choirul Ummam, Ketua KPU Kota Blitar, dikonfirmasi

Selasa 25 Agustus 2020 mengatakan, sudah melakukan sosialisasi serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Blitar tentang syarat pencalonan. Diantaranya berkaitan dengan perolehan kursi dan suara partai politik saat Pemilu 2019. Selain diserahkan ke partai politik, SK ini juga diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DPRD Kota Blitar. Umam menyebut, penyerahan SK itu dilaksanakan Selasa 25 Agustus 2020. Tidak hanya itu, kepada pimpinan dewan Umam mengaku juga menyampaikan beberapa syarat calon yang akan diusung partai. Diantaranya jika calon adalah anggota DPRD, maka harus mundur dari jabatannya. Namun tidak serta merta meninggalkan kursi sebagai anggota dewan, karena ada proses sampai SK Gubernur tentang pemberhentian calon sebagai anggota dewan turun. Saat mendaftar yang bersangkutan cukup mengisi surat pernyataan mundur dari kursi dewan, dan melampirkan surat keterangan yang menyatakan SK Gubernur masih dalam proses. Sementara itu Sobat, KPU Kota Blitar akan mengumumkan tahap pencalonan Pilwali mulai tanggal 28 Agustus sampai 03 September 2020. Sedangkan pendaftaran pencalonan akan dibuka tanggal 04-06 September, dan penetapan calon pada tanggal 23 September 2020.

## 22. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id) 27/08/2020, KPU Temukan Data Pemilih Baru Pada Pelaksanaan Coklit

Pelaksanaan pencocokan dan penilitian (Coklit) data pemilih Pilwali Kota Blitar, sudah berlangsung 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada Kamis, (27/08/2020), menyebut berdasarkan data sementara, pelaksanaan coklit kemarin menemukan data pemilih baru sebanyak 6.000 pemilih. Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, data itu hasil rapat kerja bersama badan ad hoc beberapa waktu lalu. Total ada 115 ribu data pemilih yang berhasil dicoklit petugas, 6.000 diantaranya merupakan pemilih baru. Rangga menjelaskan, data pemilih baru itu tidak hanya berasal dari kalangan pemilih pemula, namun juga pendatang yang menetap di Kota Blitar. Rangga mengaku tidak bisa merinci data tersebut, karena lebih lanjut akan dilaksanakan rekapitulasi tingkat PPS, tanggal 30 Agustus 2020, dan rekapitulasi tingkat PPK akan dilaksanakan tanggal 03 September 2020. Selain data pemilih baru, juga terdapat 7.000 data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena yang bersangkutan telah meninggal atau sudah tidak tinggal di Kota Blitar. Data pemilih TMS ini langsung dicoret. Sedangkan data pemilih baru dan lainnya saat ini dalam proses input ke Sidalih atau Sistem Informasi Data Pemilih, untuk mengetahui potensi kegandaan data.

23. Bhirawa, 28/08/2020, Tahun 2019 IDI Kota Blitar Meningkatkan Capai 82,98

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu mencapai 82,98. Kondisi demokrasi di Kota Blitar sangat baik bahkan mengalami peningkatan. Mengacu pada IDI Kota Blitar 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang semula 80,34 naik menjadi 82,98. Menurut kondisi saat ini kehidupan sosial politik di Kota Blitar sangat dinamis dan demokrasi. Meskipun ada dinamika tapi tetap dalam kerangka yang konstruktif, saling membangun dan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, merunut Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Wijanarko, Kamis 28/8/2020. Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan kegiatan penilaian IDI Kota Blitar dilakukan rutin setiap tahunnya, sampai saat ini sudah berjalan tiga periode. Dosen FISIP yang melakukan penelitian IDI Blitar, Zainal Abidin mengatakan Mulai dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan yang sangat baik secara umum mencapai nilai 82,98, di mana adanya IDI Kota Blitar ini merupakan skoring indeks demokrasi Indonesia yang pertama kali dilakukan sebuah daerah tingkat II di Indonesia. Adanya indeks demokrasi Indonesia sangat penting untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan politik dan demokrasi pada tahun berikutnya. Angka IDI Kota Blitar paling tinggi 82,98, angka ini sudah berada di atas IDI Provinsi Jawa Timur sebesar 77,68 dan IDI Nasional mencapai 74,92.

24. Blitarkota.go.id 02/09/2020, KPU Himbau Bapaslon Tidak Bawa Massa Pendukung Saat Daftar Di Pilwali 2020

Tahap pencalonan Pilwali 2020 akan dibuka mulai tanggal 04-06 September 2020. KPU Kota Blitar telah menetapkan beberapa aturan untuk bakal pasangan calon (Bapaslon) yang akan mendaftar, diantaranya tidak boleh membawa massa pendukung. Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Partisipasi Masyarakat dan SDM menjelaskan, sesuai PKPU No. 06 Tahun 2020, Bapaslon tidak diperkenankan membawa massa pendukung saat melakukan pendaftaran. Bapaslon hanya didampingi ketua dan sekretaris partai pengusung dan satu orang liaison officier (LO). Sementara pendukung diminta tidak datang ke kantor KPU. Mereka dihimbau untuk tetap berada di posko pemenangan masing-masing. Nantinya KPU Kota Blitar akan menayangkan proses pendaftaran bapaslon melalui streaming youtube dan facebook, sehingga pendukung bisa menyaksikan di posko

pemenangan. Terkait pengamanan, Rangga menegaskan akan mendapat pengawasan ketat dari kepolisian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota terkait skema pengamanan di kantor KPU saat pendaftaran pencalonan Pilwali 2020 dibuka.

#### 25. Blitarkota.go.id 03/09/2020, Dua Bapaslon Pilwali Blitar Diperkirakan Daftar Hari Pertama Pencalonan

Pendaftaran Bakal Calon Pasangan (Bapaslon) Pilwali Kota Blitar akan dibuka 04 sampai 06 September 2020. Berdasarkan informasi sementara, dua bapaslon Kota Blitar akan mendaftar dihari pertama. Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, dua bapaslon itu adalah Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto dan Santoso-Tjutjuk Sunario. Sampai Kamis sore, keduanya diketahui akan mendaftar Jumat 04 Agustus 2020. Pasangan Henry Pradipta Anwar - Yasin Hermanto akan mendaftar Jumat pagi jam 09.00 WIB. Sedangkan pasangan Santoso - Tjutjuk Sunario akan mendaftar usai sholat Jum'at jam 13.00 WIB. Namun demikian, informasi ini masih sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu. Rangga juga memastikan saat proses pendaftaran nanti, tidak ada massa pendukung yang mengawal bapaslon ke kantor KPU. Bapaslon hanya akan didampingi ketua dan sekretaris partai pengusung serta satu orang LO. Nantinya KPU Kota Blitar akan menyiarkan langsung proses pendaftaran melalui facebook dan youtube, sehingga pendukung bisa menyaksikan di posko pemenangan masing-masing. Rangga menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kelancaran, proses pendaftaran bapaslon Pilwali Kota Blitar tahun 2020, akan dikawal ketat oleh jajaran TNI/Polri.

#### 26. Mayangkara 03/09/2020, Warga Tolak Penutupan Perlintasan Kereta Api Sebidang Tanpa Palang Pintu Di Gedok Yang Beberapa Kali Sebabkan Kecelakaan

Penutupan pertintasan kereta api tanpa palang yang berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono Kota Blitar ditolak oleh warga Kelurahan Ngegong Gedog Kota Blitar. Hari Rabu 2 September 2020 beberapa warga berkumpul di lokasi tersebut dan meminta pemerintah untuk tidak menutup akses perlintasan sebidang ini. Informasi rencana penutupan perlintasan sebidang ini terdengar sampai ke telinga warga gedog yang bernama Ismini, sehingga dirinya dan warga lainnya menolak jika perlintasan tersebut ditutup karena menurut mereka jika perlintasan tersebut ditutup akan mempersulit akses masyarakat sekitar. Jika perlintasan ditutup maka

masyarakat harus berputar arah dengan jarak yang cukup jauh, sehingga warga meminta pemerintah untuk memberikan solusi lain supaya perlintasan kereta api di Jl. Kolonel Sugiono tidak jadi ditutup. Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko mengatakan, terjadi salah paham antara warga dan PT KAI, kedatangan petugas PT KAI dan Dishub Kota Blitar tidak untuk melakukan penutupan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Melainkan untuk mengecek kondisi perlintasan pasca terjadinya kecelakaan mobil dan kereta api yang terjadi pada minggu 30 Agustus 2020. Kepala Dishub Kota Blitar Priyo Suhartono memastikan, berkomitmen untuk meningkatkan keamanan di perlintasan sebidang. Dishub Kota Blitar berencana memasang palang pintu di perlintasan namun masih menunggu rekomendasi dari pusat.

#### 27. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id) 04/09/2020, DPRD Kota Blitar Minta Masyarakat Teliti Calon Pemimpin

Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada 2020 telah dibuka. Ini merupakan bagian dari tahap pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya akan digelar 9 Desember 2020. Agus Junaidi, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan, setelah dibukanya proses pendaftaran calon, ini saat yang tepat untuk warga Kota Blitar mulai menilai dan memperhatikan calon pemimpin yang akan dipilih dalam Pilwali nanti. Agus juga menghimbau pada warga Kota Blitar untuk hati-hati dalam memilih calon pemimpin, terlebih pada saat kampanye dimulai, Agus berharap warga Kota Blitar tidak mudah tergiur dengan janji-janji. Pihaknya juga mengharapkan warga Kota Blitar kritis dalam memilih calon pemimpin, serta cerdas menilai seluruh kandidat, dengan cara mempertimbangan seluruh aspek. Selain itu Agus juga mengimbau kepada seluruh warga Kota Blitar untuk menggunakan hak pilihnya saat pilwali Desember nanti, mengingat satu suara akan menentukan nasib Kota Blitar selanjutnya.

#### 28. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id) 05/09/2020, KPU Kota Blitar Terima Berkas Pendaftaran Bapaslon Henry-Yasin

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto, dihari ke dua pendaftaran. Choirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, bapaslon Henry-Yasin menyerahkan berkas pendaftaran Sabtu pagi, didampingi partai politik pengusung, yaitu PKB, Golkar, dan PKS. Seluruh proses yang berjalan pada hari ke dua ini, sama

dengan bapaslon sebelumnya yaitu Santoso-Tjujuk Sunario. Bapaslon Herny-Yasin menyerahkan berkas pencalonan dan berkas calon untuk maju ke Pilwali Kota Blitar tahun 2020. Berkas pencalonan meliputi surat keputusan dari partai politik, B1-KWK dan lainnya. Sedangkan berkas calon terdiri dari ijazah, surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan lain-lain. Umam menegaskan, seluruh berkas yang diserahkan bapaslon ini selanjutnya akan diverifikasi oleh tim KPU Kota Blitar, dengan melibatkan Bawaslu Kota Blitar. Jika sudah rampung, hasil verifikasi akan diumumkan tanggal 13 dan 14 September 2020. Bapaslon yang berkas pendaftarannya perlu perbaikan, nantinya akan diberikan waktu selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai 16 September 2020. Dalam waktu dekat dua bapaslon yang telah mendaftar ke KPU Kota Blitar akan mengikuti tes kesehatan. Pelaksanaannya tanggal 07 September 2020 di RSUD dr. Saiful Anwar Malang.

#### 29. Mayangkara 05/09/2020, Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Santoso – Tjujuk Gelar Deklarasi Sebelum Ke KPU

Bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Blitar Santoso dan Tjujuk menggelar deklarasi di Jl.Sumatra Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan sekitar jam 2 siang. Bakal calon walikota dan wakil walikota mendeklarasikan diri bahwa dirinya dan tim siap menang sebelum pihaknya mendaftarkan diri ke KPU Kota Blitar pada tanggal 4 September 2020. Deklarasi ini diikuti sekitar 2000 massa yang terdiri dari dari partai pengusung, partai pendukung, relawan dan dihadiri juga oleh anggota DPR RI Sri Rahayu. Santoso – Tjujuk diusung 5 partai politik seperti PDIP, Gerindra, PPP, Demokrat, dan Hanura. Serta diusung oleh 4 partai non parlemen seperti PSI, Garuda, Bulan Bintang, dan Perindo.

#### 30. Jawa Pos, Koran Memo, 05/09/2020, RENCANA BELAJAR TATAP MUKA GAGAL

Pelaksanaan uji coba belajar tatap muka bagi siswa SMA sederajat yang ada di Kota Blitar akan diberhentikan sementara dengan alasan wilayah kota Blitar kembali memasuki zona merah penyebaran kasus covid-19. Keputusan tersebut akan dimulai pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Pembelajaran daring akan kembali ditetapkan untuk mencegah terjadinya penyebaran di lingkungan sekolah. rencananya kegiatan uji coba belajar tatap muka tahap kedua akan digelar hingga 12 September mendatang. Sekretaris GTPP covid19 Kota Blitar Hakim

sisworo mengatakan pelaksanaan uji coba belajar tatap muka di SMA sederajat akan dihentikan sementara. Sementara Walikota Blitar Santoso dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Suhartono mengungkapkan Belum ada rencana membuka sekolah tatap muka bagi siswa PAUD hingga SMP. Priyo mengaku di satu sisi Pemerintah Kota Blitar juga memberikan bantuan kuota internet bagi siswa dengan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 4 miliar lebih.

### 31. Mayangkara 08/09/2020 BAPASLON INDEPENDEN LISMININGSIH–TETENG LAYANGKAN GUGATAN KE KPU KOTA BLITAR MELALUI BAWASLU KOTA BLITAR

Bapaslon Lisminingsih – Teteng melayangkan gugatan ke KPU Kota Blitar melalui Bawaslu. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan yang menjadi faktor gugatan tersebut diantaranya karena merasa tidak puas dengan hasil verifikasi faktual di masa perbaikan beberapa waktu lalu. Sebenarnya ketikpuasan itu bisa diajukan pada saat rapat pleno hasil verifikasi masa perbaikan pada 20 Agustus 2020, namun pada saat itu tim Bapaslon tidak bisa membuktikannya. Sampai saat ini pihaknya masih mengikuti seluruh proses gugatan paslon dan memenuhi apa yang menjadi keputusan Bawaslu.

KPU juga menghadiri musyawarah tertutup yang dilaksanakan pada tangga; 4-5 September 2020 namun hasilnya deadlock atau mengalami jalan buntu, sehingga musyawarah sengketa terbuka digelar pada tanggal 6 September, sampai berita ini diturunkan pada tanggal 8 September jam 12 siang masih terus berlanjut, dengan mendatangkan saksi baik dari pihak KPU maupun pihak Liminingsih – Teteng.

### 32. Blitarkota.go.id 09/09/2020, KPU KOTA BLITAR MINTA TIM PENGAMANAN TINGKATKAN PENGAWALAN PILKADA

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai persiapan. Di antaranya dengan mengadakan Rapat Koordinasi Penanganan dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Pilkada Serentak 2020, di Ruang Integrated System Centre (ISC), Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar. Rakor ini dilaksanakan melalui video conference di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM ini juga memaparkan beberapa daerah

yang mengalami rawan Covid-19, diantaranya provinsi Jambi, Bengkulu, Sulawesi, dan Kalimantan Utara. Choirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar usai rakor mengatakan, meski Kota Blitar masuk dalam kategori sedang dalam urusan Covid-19, pihaknya tetap meminta tim pengamanan pilkada untuk mengawal ketat setiap tahapan Pilwali 2020. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari ketimpangan sekaligus transparansi kepada masyarakat. Sementara Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan, pihaknya siap untuk menjalin koordinasi bersama tim pengamanan lain untuk mengawal pentahapan Pilwali 2020. Leonard juga telah menyiapkan anggota untuk melakukan pengawalan setiap tahapan setiap pelaksanaan Pilkada. Peserta yang mengikuti rakor melalui zoom meeting antar lain, Bawaslu, BNPB, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung RI.

### 33. Jawa Pos, 09/09/2020, SIAPKAN MATERI LAPORAN DKPP

Hasil rekapitulasi KPU Kota Blitar terkait dukungan Bapaslon independen Lis–Teng terus bergulir hingga 8 september 2020. Koordinator tim relawan, sudarmanto mengatakan keberatan dari tim ini tidak berhenti sampai proses musyawarah sengketa karena akan diteruskan dengan melaporkan ke pihak dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Berkaitan dengan adanya beberapa tahapan dan transparansi data pendukung ganda yang dimasukkan dalam pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Musyawarah kemarin sejumlah saksi dihadirkan para saksi diantaranya KPU Kota Blitar memberikan jawaban terkait sejumlah pertanyaan tentang dukungan yang TMS, formulir B5 KWK, formulir B1.2 KWK. Namun terdapat hal menarik yang menjadi pertanyaan kuasa hukum yaitu tidak diberikannya formulir B1.2 KWK tentang penarikan dukungan kepada PPS ketika melakukan verifikasi sesuai dengan pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota serta Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Kuasa hukum paslon Lis-Teng, ketika ditanya terkait formulir tersebut mayoritas mereka menjawab tidak diberikan formulir itu, namun ada satu PPS dari Kelurahan pakunden menyatakan pernah menerima. Menurut dia ada tahapan yang tidak dilalui KPU Kota Blitar dalam masa pengumpulan dukungan bapak calon independen pilwali Kota Blitar 2020. tahapan yang dilewati yaitu pembekalan tentang formulir B1.2 KWK. Pada saat musyawarah sengketa tersebut menginginkan jawaban dari KPU Kota Blitar terkait kekurangan dukungan paslon independen Lis-Teng dan adanya dukungan ganda dalam daftar pendukung. Komisioner



KPU Kota Blitar Edi Saputra menjawab terkait formulir B1.2 KWK tentang penarikan dukungan, formulir tersebut diperuntukkan kepada paslon yang Berhalangan tetap misalnya meninggal dunia atau Ada yang sakit sehingga bakal calon diganti dengan yang lainnya maka saat itulah formulir B1.2 tik KWK di gunakan untuk memastikan Apakah pendukung menarik dukungannya terhadap calon yang diganti atau tidak. Di tidak ada yang berhalangan tetap sehingga formulir tersebut tidak digunakan. Beliau juga mengatakan mungkin kuasa hukum pemohon harus lebih banyak membaca tentang formulir B1.2 KWK.

#### 34. Blitarkota.go.id 12/09/2020, DPS PILWALI 2020 KOTA BLLITAR MENCAPAI 114 RIBU

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilwali Kota Blitar, diketahui usai rapat pleno hasil pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan KPU Kota Blitar pada hari Jumat, 11 September 2020. Choirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, total DPS yang berhasil dicoklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 114.895 orang. Dengan rincian, 56.028 pemilih laki-laki dan 58.867 pemilih perempuan. Umam menyebut, data terbaru ini nantinya akan dicetak dan diumumkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar. Nantinya hardcopy DPS akan dipasang di beberapa tempat strategis, agar masyarakat bisa ikut cross check, apakah data yang dimuat dalam DPS sudah benar. Jika terdapat elemen data yang kurang tepat, masyarakat bisa melapor ke anggota PPS. Misalnya NIK salah, yang bersangkutan sudah meninggal atau pindah domisili, serta lainnya. Umam menegaskan, DPS ini bisa berkembang sampai tiba hari pemilihan, 09 Desember 2020. Penambahan daftar pemilih dimungkinkan datang dari kalangan pemilih pemula, yang memasuki usia 17 tahun pada rentang waktu September hingga 09 Desember 2020. Nantinya KPU Kota Blitar akan mengupdate perkembangan data pemilih setiap bulannya. Sementara itu, pemutakhiran data pemilih KPU Kota Blitar dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.

#### 35. Mayangkara, Koran Memo, Surya 12/09/2020, KPU KOTA BLITAR LAPORKAN KIRIMAN ANEH BERUPA KIRIMAN BUNGA SETAMAN DAN BONEKA DARI KERTAS YANG DITUSUK JARUM

Mendapatkan kiriman berupa bunga setaman dan boneka dari kertas yang ditusuk jarum KPU Kota Blitar melaporkan kejadian ini ke Polres Blitar Kota. Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam mengatakan bahwa kiriman tersebut diketahui sekitar pukul 1 pada tanggal 7 September

2020. Kiriman aneh itu pertama kali diketahui oleh Aris yang berkerja sebagai sopir KPU, pada saat itu Aris baru saja mengantarkan Hernawan Miftakhul Khabib selaku komisioner KPU Kota Blitar divisi teknis, pulang ke rumah setelah agenda rapat pembahasan tahapan Pilwali tahap tiga di Joglo Jatalmalang. Kiriman aneh berupa bunga setaman dan boneka dari kertas itu terletak sekitar 3 meter dari gerbang KPU. Mengetahui kejadian tersebut aris langsung melaporkan ke anggota KPU lainnya, namun kiriman tersebut dibiarkan hingga pukul 07.07 WIB kemudian kiriman tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan abunya dibuang di sawah yang lokasinya dekat dengan Kantor KPU Kota Blitar. KPU ingin konsentrasi mengawal tahapan Pilwali Kota Blitar dengan lancar. Namun pihaknya tidak mau menduga duga siapa pengirim bunga dan boneka kertas yang ditusuk jarum ini. Laporan ini sudah di terima dan akan segera di tindak lanjuti oleh Kasat Intel Polres Blitar Kota AKP Son Haji.

#### 36. Mayangkara 12/09/2020, POLISI PELAJARI REKAMAN CCTV DI ANTOR KPU KOTA BLITAR, SESEORANG YANG MELMPAR SESUATU DI HALAMAN KANTOR KPU

Hasil rekaman CCTV di Kantor KPU Kota Blitar masih dipelajari oleh Polres Blitar Kota, di dalam rekaman tersebut menunjukkan ada seseorang mengenkaan baju putih yang melemparkan sesuatu di Kantor KPU Koa Blitar tepat pada hari ditemukannya bunga setaman dan boneka kertas yang ditusuk jarum pada tanggal 7 September 2020. Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela mengatakan rekaman CCTV merupakan bagian dari petunjuk dan bukti adanya seseorang yang mengirim bunga setaman. Potongan rekaman kamera CCTV yang berdurasi 51 detik melihatkan ada seseorang berbaju putih melempar sesuatu dari luar gerbang ke dalam halaman kantor KPU Kota Blitar. Melalui rekaman CCTV tersebut polisi mengidentivikasi apakah ada unsur pidana atau tidak dan untuk mengetahui siapa pelaku pelemparan tersebut, serta untuk mengetahui apa tujuan dari pelemparan tersebut. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian Polres Blitar Kota dalam pengamanan menjelang Pilwali yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2020.

#### 37. Mayangkara 12/09/2020, SATPOL PP KOTA BLITAR COPOT PULUHAN BALIHO LIAR BAPASLON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA PADA PILWALI BLITAR 2020

51 baliho liar Bapaslon walikota dan wakil walikota yang berada di beberapa titik di Kota Blitar khususnya di jalan protokol dicopti oleh Satpol PP Kota Blitar Karena masa izinnya sudah habis. Menurut Hadi

Maskun, Plt Kasatpol PP Kota Blitar mengatakan bahwa penertiban ini dilakukan berdasarkan Perwali Nomor 24 Tahun 2013 tentang aturan pemasangan baliko di Kota Blitar. Baliho yang dicopot itu masa izin pemasangannya sudah habis selain itu tempat pemasangannya tidak sesuai dengan aturan. Pihaknya tidak akan mempermasalahakan jika ada bapaslون yang ingin mensosialisasikan di publik, namun harus mengikuti aturan dan ketentuan yang sedang berlaku. Jika ada tim pemenangan ingin mengambil baliho Bapaslون bisa langsung menuju ke Kantor Satpol PP Kota Blitar. Kegiatan ini masih berlanjut sampai tanggal 13 September 2020, sehingga masih ada kemungkinan penambahan jumlah baliho yang akan di copot.

38. Mayangkara 12/09/2020. RATUSAN RELAWAN KEMBALI MELAKUKAN AKSI DEMO MEMBERI DUKUNGAN MORAL PADA BAPASLON JALUR PERSEORANGAN PILWALI BLITAR 2020

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demo, Sudarmanto mengatakan kejadian unjuk rasa kedua pada tanggal 12 September 2020 sekitar jam 10 pagi dengan jumlah massa kurang lebih 100 orang di depan Kantor Bawaslu Kota Blitar. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memeberikan dukungan moral kepada Bapaslون jalur perseorangan Lisminingsih–Teteng dalam rangka pembacaan hasil keputusan musyawarah sengketa. Aksi unjuk rasa ini juga sebagai wadah ketidakpuasan relawan Bapaslون Lisminingsih–Teteng yang sudah mendukung. Dalam aksi demo ini dilakukan secara bergantian & ada teatrical menggendong satu orang, digambarkan orang yang digendong itu sebagai penipu, sehingga penipu itu diadili masyarakat. Para relawan membawa beberapa poster bertuliskan Pasangan Lismingsih–Teteng harus lolos & lain-lain. Para relawan tetap memakai masker & aksi ini mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan, di antaranya TNI – Polri & Satpol PP Kota Blitar.

39. Jawa Pos, 13/09/2020, PASANGAN LIS-TENG TERUS MENCARI KEADILAN

Korlap Aksi Demo, Sudarmanto mengatakan kejadian unjuk rasa kedua pada tanggal 12 September 2020 sekitar jam 10 pagi di depan Kantor Bawaslu Kota Blitar. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memeberikan dukungan moral kepada Bapaslون jalur perseorangan Lisminingsih – Teteng dalam rangka pembacaan hasil keputusan musyawarah sengketa. Aksi unjuk rasa ini juga sebagai wadah ketidakpuasan relawan Bapaslون Lisminingsih – Teteng yang sudah mendukung. Para relawan membawa

beberapa poster bertuliskan Pasangan Lismingsih – Teteng harus lolos & lain-lain. Koordinator divisi organisasi dan SDM Bawaslu Kota Blitar Muhammad Ridwan menerangkan bahwa pemohon menyampaikan 6 tingkatan beberapa diantaranya adanya daftar pemilih tetap yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh pasangan KPU. Hasil musyawarah terbuka pemohon dapat menyampaikan keberatan terhadap 189 angka yang tidak masuk ke dalam DPT, untuk dilakukan klarifikasi kepada dispendukcapil. Pada prinsipnya dari angka tersebut hanya ada 162 dukungan data yang dinyatakan benar oleh dispendukcapil. Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko mengatakan hasil putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Bawaslu Kota Blitar menolak seluruh gugatan pemohon, karena pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi keberatan pemohon satu diantaranya terkait 189 pendukung yang masuk data TMS tidak dapat dibuktikan. Beda dengan termohon, KPU Kota Blitar bisa melakukan klasifikasi sesuai prosedur yang diatur baik di PKPU maupun keputusan yang diturunkan KPU RI.

#### 40. Jawa Pos, 13/09/2020, PEDAGANG KELUHKAN KEBIJAKAN KLOTER

Nampak seorang wanita yang bernama Siti Aisyah duduk menunggu dagangannya di salah satu toko kawasan city walk Makam Bung Karno pada 12 september 2020. Kebijakan pembatasan jumlah pengunjung atau menggunakan sistem kloter memberikan dampak kepada para pedagang yang ada di sekitar makam Bung Karno (MBK). Siti Aisyah mengatakan kondisinya normal ini belum sepenuhnya membuat wisatawan ramai dan ini berdampak pada ada pedagang yang ada di sekitar makam Bung Karno. Sebagai gambaran dalam kondisi normal dirinya mengaku mengantongi uang hingga Rp1.000.000 per hari, Namun untuk saat ini rata-rata hanya bisa meraup Rp Rp500.000 rupiah per hari, hal ini diakibatkan dari turunnya jumlah pengunjung. Pedagang lainnya, Aprilia Wulandari megatakna, jumlah pengunjung juga terus menurun untuk tiga bulan terakhir ini, bahkan liburan akhir pekan terasa sepi seperti hari-hari biasa. Kepala Bidang pengelola kawasan wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Heru bahwa sebenarnya pihaknya sudah mempersiapkan beberapa kebijakan fisik maupun non fisik guna untuk meningkatkan masyarakat luas untuk berwisata ke makam Bung Karno.

#### 41. Mayangkara 14/09/2020, BAWASLU KOTA BLITAR TOLAK PERMOHONAN SENGKETA BAPASLON JALUR INDEPENDEN LISMININGSIH – TETENG KE KPU KOTA BLITAR

Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko mengatakan hasil putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Bawaslu Kota Blitar menolak seluruh gugatan pemohon, karena pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi keberatan pemohon satu diantaranya terkait 189 pendukung yang masuk data TMS tidak dapat dibuktikan. Beda dengan termohon, KPU Kota Blitar bisa melakukan klasifikasi sesuai prosedur yang diatur baik di PKPU maupun keputusan yang diturunkan KPU RI. Sebagai calon Wakil Walikota Blitar Teteng Rukmocondrono mengaku tidak puas dengan hasil putusan musyawarah sengketa ini, dirinya menganggap KPU tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi ke Tim pwnghubung dan Koordinasi lapangan Bpaslon sehingga timbul ketidaksepahaman. Sementara untuk tindak lanjut atas putusan ini, Teteng mengatakan harus berkoodinasi dengan pasangannya, Lisminingsih sebagai calon Walikota jalur perseorangan untuk langkah selanjutnya atas putusan itu.

#### 42. Blitarkota.go.id 14/09/2020, KPU KOTA BLITAR, BERKAS PENDAFTARN BAPASLON PILWALI TIDAK ADA KESALAHAN FATAL

KPU Kota Blitar sebut tidak ada kesalahan fatal pada berkas pendaftaran Bapaslon Pilwali 2020. Hasil ini diketahui usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar menyampaikan hasil verifikasi administrasi berkas pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Pilwali. Hernawan Miftakhul Habib, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis mengatakan verifikasi administrasi berkas pendaftaran bapaslon yang dilakukan pada tanggal 06 - 12 September 2020. Secara keseluruhan syarat pendaftaran calon sudah lengkap namun terdapat beberapa berkas atau dokumen yang perlu diperbaiki. Menurut Habib, tidak ada kesalahan fatal pada berkas pendaftaran bapaslon. Beberapa berkas hanya mengalami kesalahan ketik atau penulisannya menggunakan singkatan sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut. Khabib menegaskan masa perbaikan berkas pendaftaran bagi bapaslon waktunya singkat, berkas perbaikan harus diserahkan ke KPU pada tanggal 14 sampai 16 September 2020. Selanjutnya pihak KPU akan melakukan verifikasi pada tanggal 16-22 September 2020. Puncaknya KPU akan mengumumkan penetapan calon Pilwali pada tanggal 23 September 2020. Sementara itu, selanjutnya KPU Kota Blitar memberitahukan hasil verifikasi berkas pendaftaran ke LO dan Ketua Tim Kampanye Bapaslon Pilwali 2020

#### 43. Jawa Pos, 14/09/2020, LIS-TENG PELAJARI PUTUSAN SENGKETA

Pasca pembacaan hasil penolakan gugatan dari Bawaslu Kota Blitar, pasangan Lisminingsih-Teteng masih memikirkan langkah yang akan

diambil selanjutnya terkait masalah hasil gugatan tersebut. Pasangan ini akan mempelajari hasil keputusan sengketa bersama dengan Kuasa hukumnya untuk mempersiapkan diri ke langkah selanjutnya. Pada 13 September 2020 Lisminingsih mengatakan sampai saat ini ini Dirinya belum menerima hasil putusan dari Bawaslu Katanya Senin baru akan diberikan. Dirinya ingin mengetahui hasil keputusannya secara rinci. Diakuihnya memang ada rasa kecewa dengan hasil putusan tersebut tetapi pihaknya harus menghargai keputusan dari Bawaslu Kota Blitar yang sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mencari keadilan. Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang arintoko mengatakan pembacaan putusan sengketa tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian musyawarah sengketa dan pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Blitar karena tahapan ini sudah termasuk tahapan akhir. KPU juga akan berjanji untuk bekerja secara profesional.

#### 44. Mayangkara 16/09/2020, PEMKOT BLITAR SEDIAKAN ANGGARAN RP 3 MILIAR UNTUK PENGADAAN APD SAAT PEMUNGUTAN SUARA PILWALI 2020 NANTI

Kepala Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) untuk penyelenggaraan Pilwali Blitar 2020 ini cukup tinggi. Pemkot Blitar mengalokasikan dana sebesar Rp. 3 Milyar untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Rinciannya Rp. 1,6 Milyar lebih digunakan untuk menyiapkan pengadaan APD bagi KPPS, anggaran tersebut berada di Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, sedangkan untuk sisanya sebanyak Rp. 1,3 Milyar digunakan untuk Anggota Linmas dan anggaran tersebut berada di Satpol PP Kota Blitar. Anggaran ini sudah disetujui di Perubahan APBD 2020, namun anggaran ini disiapkan sebagai antisipasi jika anggaran APD dari pusat kepada KPU tidak cair. Persoalannya sampai saat ini.

#### 45. Blitarkota.go.id 19/09/2020, KPU BERSAMA TNI-POLRI AMANKAN KAMPANYE DI TENGAH COVID

Menjelang masa kampanye Pilkada tahun 2020 yang dimulai tanggal 26 September 2020, KPU Kota Blitar menjalin sinergi bersama jajaran TNI/Polri dalam rapat koordinasi penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19. Berlangsung di Ruang Integrated System Center Diskominfotik Kota Blitar. Choirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, dalam rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dimasa Pandemi

Covid-19 akan segera dirumuskan beberapa hal terkait penindakan yang tidak mengindahkan kampanye dengan protokol pencegahan Covid-19. Rapat koordinasi bersama jajaran TNI/Polri membahas beberapa point krusial, diantaranya sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020, sosialisasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, pencegahan dan deteksi kerawanan penularan Covid-19. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Bernomor 440/ 5113/ SJ Tanggal 14 September 2020 perihal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Umam berharap, setelah diadakan rapat koordinasi ini kedepan baik dari Jajaran TNI/Polri maupun KPU dapat membangun kesadaran masyarakat dalam berkampanye yang sehat di masa Pandemi.

#### 46. Blitarkota.go.id 19/09/2020, PESERTA RAPAT TERBUKA DAN TERBATAS DIBATASI SAAT KAMPANYE PILWALI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mulai mensosialisasikan aturan masa kampanye Pilwali 2020. Salah satunya terkait jumlah peserta rapat terbuka dan terbatas yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2020 seluruh tahapan Pilwali 2020 harus menganut protokol kesehatan Covid-19. Pelaksanaan harus menggunakan APD, menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan, dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu, saat memasuki masa kampanye, bapaslون bersama tim kampanye harus paham betul aturan tersebut. Yang mana untuk pelaksanaan rapat terbuka dan terbatas, jumlah pesertanya dibatasi. Untuk rapat terbatas, jumlah peserta tidak boleh lebih dari 50 orang. Sedangkan rapat terbuka, peserta yang diizinkan hanya 100 orang. Disinggung mengenai kampanye melalui konser musik dan gebyar memang belum ada larangan. Namun pihaknya berharap ada kesepahaman dari peserta Pilwali 2020, agar seluruh tahapan tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Sementara itu, 17 September 2020 KPU Kota Blitar menyelenggarakan sosialisasi tahapan kampanye dengan melibatkan Bawaslu, LO bapaslون dan lainnya.

#### 47. Blitarkota.go.id 21/09/2020, PEMKOT ADAKAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN TAHAPAN PILWALI JELANG PILKADA SERENTAK

Pemerintah Kota Blitar mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 bersama dengan

forkopimda, tim pengawas dan tim desk di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Rapat ini bagian dari persiapan pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang. AKBP Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota usai rakor mengatakan, pihaknya siap untuk mengawal setiap pelaksanaan tahapan Pilwali Kota Blitar. Leonard menambahkan, pihaknya siap untuk meningkatkan koordinasi bersama TNI dan tim pengamanan lainnya, terlebih pelaksanaan Pilwali semakin dekat. Pihaknya mengaku pengamanan Pilwali tidak hanya menghindari terjadinya kamtibmas, namun juga menjaga masyarakat dari penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan Pilkada. Bahkan pihaknya juga telah siap menerjunkan personil di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara Santoso, Wali Kota Blitar yang juga membuka rakor mengatakan, pelaksanaan Pilwali Kota Blitar ini akan berlangsung ditengah pandemi Covid-19, untuk itu Santoso meminta pengamanan ditingkatkan. Santoso mengimbau seluruh instansi meningkatkan koordinasi untuk mewujudkan Pilwali yang damai, aman, lancar meski ditengah Covid-19. Pihaknya menambahkan, keamanan masyarakat harus menjadi prioritas dari seluruh pelaksanaan tahapan Pilwali. Rencananya Pilwali akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember mendatang. Peserta yang hadir dalam rakor ini adalah KPU, Bawaslu, Dandim 0808, Camat dan Lurah.

48. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id), Kortan Memo, Jawa Pos 22/09/2020, GGTP COVID-19 KOTA BLITAR MINTA KAMPANYE PILWALI 2020 DILAKUKAN SECARA DARING

Masa Kampanye Pilwali Kota Blitar 2020 akan bergulir dalam waktu dekat. Sesuai rencana, masa kampanye akan dimulai dimulai pada tanggal 26 September mendatang. Karena berlangsung ditengah pandemi Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) Covid-19 Kota Blitar pun merekomendasikan agar kampanye pasangan calon (paslon) dilakukan secara daring atau online. Hakim Sisworo, Sekretaris GTTP Covid-19 Kota Blitar, dikonfirmasi di kantor Wali Kota Blitar mengatakan, kampanye Pilwali di masa pandemi sebisa mungkin dilakukan secara online. Tim sukses (timses) paslon tidak perlu mendatangkan massa dalam jumlah banyak untuk mencegah kerumunan massa. Menurut Hakim, jika kampanye tidak bisa dilakukan secara daring maka timses paslon bisa melangsungkan di tempat umum. Namun dengan ketentuan harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Misalnya membatasi jumlah tamu undangan atau masyarakat yang hadir, dan jika ada panggung maka harus disediakan tempat duduk untuk memudahkan gugus tugas



dalam memantau dan mengawasi. Sementara itu Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2020 seluruh tahapan Pilwali 202 harus sesuai protokol kesehatan Covid-19. Pelaksana harus menggunakan APD, menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan, dan menghindari kerumunan.

49. Blitarkota.go.id 23/09/2020, GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BLITAR PAPARKAN ATURAN PELAKSANAAN PILWALI

Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang rencananya dilaksanakan 9 Desember, tahapannya sudah mencapai penetapan calon dan pengundian nomor paslon. Namun sedikit berbeda dengan tahun lalu yang biasanya pilkada digelar serempak, namun tahun ini berada ditengah pandemi Covid-19. Rudy Wijonarko, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Blitar saat mengatakan, pelaksanaan Pilkada harus menerapkan 3m,yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di setiap tempat pelaksanaan Pilkada wajib menyediakan fasilitas wastafel, thermo gun dan penyemprotan disinfektan. Selain itu Rudy juga menegaskan, setiap pelaksanaan Pilkada peserta harus dibatasi, diantaranya bila di dalam ruangan tertutup peserta hanya 50 orang saja, sementara untuk ruangan terbuka peserta maksimal 100 orang. Jika dalam pelaksanaan pemungutan suara ditemukan suhu yang mencapai 37.3 derajat pemeriksaan dua kali dalam 5 menit, maka yang bersangkutan tidak diizinkan untuk memasuki ruangan. Rudy juga menegaskan, di setiap tempat pelaksanaan Pilkada harus ada petugas yang menjaga lokasi guna untuk mengontrol jalannya penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, guna untuk menekan penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan Pilkada, seluruh pelaksana Pilkada wajib memasang aturan atau media informasi di lokasi strategis. Rudy juga meminta agar seluruh kegiatan pentahapan Pilwali berlangsung dengan menggunakan tempat duduk, hal ini bertujuan untuk menjaga jarak agar tetap terkontrol.

50. Blitarkota.go.id 23/09/2020, KPU MINTA TIMSES SEGERA BUAT REKENING DANA KAMPANYE

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, mulai mempersiapkan teknis pelaksanaan tahapan kampanye dengan melakukan sosialisasi dan bimtek dengan timses paslon Pilwali 2020. KPU Kota Blitar menggelar Bimtek dana kampanye di salah satu hotel Jl. Anjasmoro. Hernawan Miftakhul Khabib,

Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis mengatakan, Bimtek dilaksanakan karena sesuai PKPU No. 05 Tahun 2017, timses paslon harus segera membuat rekening dana kampanye usai penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar. Yang mana penetapan paslon dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Namun jika sewaktu-waktu keluar regulasi baru dari pusat maka batas waktu pembuatan rekening sampai H+1 penetapan. Rekening dana kampanye tidak boleh jadi satu dengan rekening paslon atau parpol. Disinggung mengenai batasan sumbangan dana kampanye Khabib menyebut, sumbangan dari parpol maksimal Rp. 750 juta dan perseorangan Rp. 75 juta. Khabib menambahkan selama bimtek tidak ada timses yang mengeluhkan kesulitan dan kendala. Bimtek difokuskan untuk sinkronisasi PKPU No. 05 Tahun 2017 dengan draf PKPU baru.

#### 51. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id) 23/09/2020, KPU KOTA BLITAR TETAPKAN SANTOSO-TJUJUK DAN HENRY-YASIN SEBAGAI PASLON PILWALI 2020

Setelah melalui beberapa tahapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar akhirnya menetapkan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota. Pasangan Santoso-Tjutjuk Sunario dan Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto secara resmi ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Blitar. Choirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, penetapan calon dilakukan secara tertutup di Kantor KPU Kota Blitar untuk menghindari kerumunan massa. Hal ini sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi Covid-19. Menurut Umam, jika penetapan dilaksanakan secara terbuka maka harus mengundang bapaslon. Pendukung masing-masing bapaslon diperkirakan mengiringi sehingga akan terjadi kerumunan. Oleh karena itu KPU melakukan penetapan secara tertutup, hanya diikuti internal komisioner KPU dan LO. Umam menegaskan, dalam penetapan kali ini dua bapaslon dinyatakan memenuhi syarat dan bisa maju ke tahapan berikutnya yaitu pengundian nomor urut Kamis 24 September 2020. Pada tahapan ini, KPU Kota Blitar akan mengundang kedua calon, karena pengambilan nomor urut dilakukan oleh masing-masing calon. Sementara itu, meski dilaksanakan secara tertutup penetapan pasangan calon di Pilwali 2020 mendapat pengawalan ketat dari jajaran TNI/Polri.

#### 52. Jawa Pos 23/09/2020. BAWA MASA, BATAL DIBUBARKAN APARAT

Komisioner Bawaslu Kota Blitar, Abdul Aziz Al kaharudin mengatakan bahwa Bawaslu Kota Blitar memberikan rekomendasi kepada KPU agar pada proses pengundian nomor urut tetap mematuhi protokol

kesehatan secara ketat. Selain adanya larangan membawa massa dalam jumlah banyak paslon juga tidak diperbolehkan membawa pihak yang dilarang misalnya membawa ASN. Jika Nanti ada yang melanggar dan berpotensi menyebabkan kerumunan maka kepolisian berwenang untuk membubarkan. Komisioner KPU Kota Blitar, Purnawan Miftahul Khabib mengatakan penetapan Pasangan calon hanya dilakukan secara internal KPU dan tidak mengundang paslon. Sedangkan untuk pengundian nomor akan dilakukan secara terbuka, KPU menghimbau kepada paslon supaya tidak membawa massa.

### 53. Koran Memo, 25/09/2020. TOLERANSI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA TERJAGA

Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar Hakim Sisworo mengatakan saat ini Bakesbangpol aktif menciptakan suasana kondusif di bidang toleransi Agama, gentar turun lapangan agar kerukunan agama tetap terjaga. Peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) sangat diperlukan karena FKUB menjadi wadah Forum Komunikasi bagi tokoh agama di Kota Blitar. Toleransi keagamaan di Kota Blitar mendapat apresiasi dari sejumlah daerah salah satunya FKUB Provinsi Jawa Timur yang beberapa waktu lalu sempat berkunjung ke Kota Blitar. Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur, Ahmad Hamid Syarif menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya ingin memantau kinerja FKUB Kota Blitar dan ternyata bagus dalam rangka menjaga kondusivitas utamanya soal kerukunan agama. Selain itu Bakesbangpol dan PBD juga ikut berperan dalam peningkatan indeks demokrasi Indonesia yang ada di Kota Blitar. Dapat dilihat pada IDI Kota Blitar tahun 2019 skornya mencapai 82,98, angka ini naik dibandingkan pada tahun 2018 dengan skor 80,34. Sekda Kota Blitar Rudi Wijanarko menyampaikan pada saat rilis IDI di Sasana pRaja 27 Agustus 2020 mengatakan hal ini membuktikan bahwa tanya kehidupan demokrasi di Kota Blitar sudah cukup bagus terutama menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota Blitar. Menurutnya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi politik dan gagasan dengan transparan dan mudah. Komunikasi antar lembaga pemerintah dan warga juga terjalin dengan baik. Sisworo mengatakan masuk dalam sasaran utama pada pelaksanaan rpjmd tahun 2016-2021. Zainal Abidin Ahmad, Surabaya menyampaikan bahwa Kota Blitar merupakan kota yang pertama menggelar scoring dibandingkan dengan daerah tingkat 2 lainnya dan ternyata skor dari tahun ke tahun meningkat, ini membuktikan bahwasanya potret kondisi demokrasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### 54. Jawa Pos, 26/09/ 2020, SIAPKAN PERDA KHUSUS PESEPEDA

Dinas Perhubungan Kota Blitar segera merencanakan peraturan daerah khusus untuk pesepeda. Peraturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan para pengendara, sebagai contoh Sepeda harus dilengkapi dengan perlengkapan yang standar. peraturan ini akan dirancang dalam waktu dekat oleh Dishub Kota Blitar. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan Jalan dapat menjadi dasar pembentukan Perda tersebut. kepala Dishub Kota Blitar Priyo Suhartono mengatakan Perda mengenai pesepeda akan disiapkan untuk mengatur pengendara sepeda. Perda tersebut diatur sebagai dasar aturan untuk menjaga ketertiban bagi pengendara sepeda Selain itu untuk menjadi acuan dalam pemberian sanksi bagi yang melanggar tata tertib bersepeda.

#### 55. Jawa Pos 26/09/2020, BELUM SEMUA APK BAKAL CALON DITERTIBKAN

Komisioner Bawaslu Kota Blitar, Abdul Aziz Al Fakhruddin mengatakan APK bergambar bakal calon yang dipasang di pinggir jalan dan tempat umum harus mulai dilepas. Bawaslu memberikan tenggang waktu selama 2 hari kepada pemasang untuk melepas secara mandiri, jika dalam kurun waktu tersebut tidak segera dilepas maka Satpol PP yang akan menindaklanjuti. Bawaslu beserta pihak terkait sudah menyepakati bahwa APK yang ditertibkan tidak ada ketentuannya jadi semua APK bakal calon dalam bentuk apapun wajib ditertibkan. Bawaslu akan mengawal proses penertiban yang akan dilakukan oleh Satpol PP . APK untuk paslon difasilitasi oleh KPU Kota Blitar, untuk tim dari paslon tidak diperbolehkan memasang APK di luar ketentuan. Kabid penegak Perda Satpol PP Kota Blitar Agus suherli mengatakan sudah mulai menertibkan sejumlah APK bergambar bakal calon dan penertiban tersebut dilakukan secara bertahap.

#### 56. Mayangkara 26/09/2020, KPU KOTA BLITAR LARANG KONSER MUSIK SAAT KAMPANYE PILWALI BLITAR 2020

Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan KPU melarang adanya konser musik dalam kegiatan kampanye Pilwali Blitar 2020 yang melibatkan perkumpulan massa. Larangan itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020. PKPU baru mengatur Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid19. Tim Paslon yang melanggar, Bawaslu bisa memberikan sanksi peringatan tertulis, namun jika tim Paslon tidak mengindahkan sanksi peringatan tertulis dalam kurun waktu satu jam, maka pembubaran kegiatan bisa dilakukan pihak berwajib sesuai rekomendasi dari Bawaslu. Selain konser musik, rapat umum, kegiatan perlombaan, dan peringatan hari ulang tahun partai juga dilarang.

57. Mayangkara 28/09/2020, BAWASLU KOTA BLITAR TEMUKAN PULUHAN DATA GANDA PADA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PILWALI KOTA BLITAR 2020

Abdul Aziz Al Kaharudin, Komisioner Bawaslu Kota Blitar mengatakan total DPS yang ditetapkan KPU Kota Blitar pada senin 14 September 2020 sebanyak 114,895, tetapi diantara data tersebut ditemukan data pemilih ganda sebanyak 87. Bawaslu mengetahui adanya data pemilih ganda pada saat dilakukan pengecekan terhadap NIK, tanggal lahir maupun nama pemilih. Temuan itu langsung diinformasikan ke KPU Kota Blitar untuk ditindaklanjuti. Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan sebanyak 114.885 warga dalam Pilwali Kota Blitar 2020. 114.895 pemilih itu tersebar di 3 Kecamatan & 21 Kelurahan di Kota Blitar meliputi 56.028 data pemilih laki-laki & 58.867 data pemilih perempuan.

58. Mayangkara 29/09/2020, AGAR PESEPEDATERTIB DI JALAN, PEMKOT BLITAR SIAPKAN SEJUMLAH ATURAN BERSEPEDA YANG DIATUR MELALUI PERDA

Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono mengatakan menindaklanjuti Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang aturan bagi pesepeda yang terbit beberapa waktu lalu, saat ini pemkot sedang menyiapkan beberapa tahapan termasuk kajian dalam menyusun sejumlah regulasi atau aturan tata tertib bagi pesepeda. Aturan ini nantinya akan dituangkan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini berkaitan dengan jalur sepeda & infrastruktur pendukungnya, alat kelengkapan & keamanan sepeda, seperti rem & lampu penerang, serta tata cara bersepeda seperti pesepeda di jalan dilarang bergandengan atau ditarik kendaraan bermotor, berdampingan dengan kendaraan lain & menggunakan perangkat seluler saat bersepeda. Perda ini memang diperlukan supaya pengguna sepeda lebih tertib, mengingat saat ini trend bersepeda semakin meningkat, rencanya perda

ini akan direalisasikan tahun depan. Beberapa jalan untuk jalur pesepeda yang ada di kota Blitar sudah memenuhi syarat, diantaranya Jl, Jendral Sudirman, Jl. A. Yani, Jl. Supriyadi dan Jl. Merdeka.

#### 59. Jawa Pos, 29/9/2020, LARANG APK CATUT GAMBAR PRESIDEN

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko mengatakan bahwa ada sebanyak 220 APK yang dicopot oleh Bawaslu karena melanggar aturan kampanye. Mayoritas pelanggaran yaitu lokasi pemasangan yang tidak sesuai ketentuan diantaranya tiang listrik dan tiang kabel telepon. Sudah ada aturan dan ketentuannya tersendiri dalam pemasangan APK, jadi memang sudah ada zona sendiri dimana lokasi yang boleh dipasang APK dan yang dilarang dipasang APK. Sudah dijelaskan juga bahwa APK dilarang dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, tiang lampu, lembaga pendidikan hingga tempat ibadah. Komisioner Bawaslu Kota Blitar Abdul Aziz Al-kaharudin jelaskan, APK yang dipasang di masa kampanye harus sesuai dengan ketentuan peraturan KPU, Ada sejumlah ketentuan APK yang harus dipenuhi oleh KPU Sebagai penyelenggara pemilu, tidak boleh menampilkan foto presiden dan wakil presiden, Selain itu dihimbau juga tidak menampilkan lambang partai pendukung tidak menampilkan pihak-pihak Yang dilarang. Apabila terdapat Apk yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan KPU maka bisa diterbitkan melalui rekomendasi Bawaslu.

#### 60. Bhirawa, Jawa Pos, 29/09/ 2020, DPRD KOTA BLITAR BAHAS DUA PERDA

Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD kota Blitar dengan dihadiri 22 anggota dewan terkait dengan agenda penyampaian ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah tahun 1000 1989 tentang pendirian PDAM dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2004 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat Pemkot Blitar. Ketua DPRD kota Blitar Syahrul Alim mengatakan karena sudah menjadi tahapan sebelum ranperda di tetapkan menjadi Perda. pihaknya bakal menjadwalkan sejumlah agenda diantaranya rapat komisi pembekalan anggota yang duduk di 5 pansus pada tanggal 1 Oktober, selanjutnya Rapat Pansus dan penyusunan pandangan umum fraksi dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober, Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi soal dua ranperda dilaksanakan pada 6 Oktober. Selain itu pada tanggal 7 sampai 9 Oktober dilaksanakan rapat Pansus inventarisasi permasalahan soal ranperda pada tanggal 12

Oktober dilaksanakan rapat Pansus bersama untuk pemecahan masalah, 13 Oktober dilaksanakan rapat pansus bersama eksekutif soal finalisasi dan persetujuan bersama, pada 14 -23 Oktober proses memfasilitasi gubernur soal Raperda dan Pemkot, 15 Oktober rapat Bapemperda bersama eksekutif soal dua Ranperda dan yang terakhir pada 19 Oktober rapat penyampaian laporan pansus. Rapat ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan dihadiri oleh PJS Walikota Blitar Jumadi, Sekda Kota Blitar Rudy Wijonarko, serta para kepala OPD. Jumadi mengatakan usulan perubahan ranperda itu sudah melalui proses pendalaman. Seperti usulan perubahan nomenklatur PDAM. Semula merupakan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

61. Mayangkara 30/09/2020, 4 AKUN SOSMED DIPANTAU TIM CYBER POLRES BLITAR KOTA KARENA POSTINGANNYA MENGARAH KE BLACK CAMPAIGN

Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Iptu Ahmad Rochan mengatakan Tim Cyber Polres Blitar Kota menggencarkan patroli di sosial media menjelang pelaksanaan Pilwali Blitar 2020. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kampanye hitam. Menjelang Pilwali Kota Blitar banyak ditemukan akun baru di sosial media, sejumlah akun baru itu dipakai untuk kampanye masing-masing tim pasangan calon. Munculnya akun sosmed baru yang diduga berisi postingan yang mengarah mengarah ke kampanye hitam atau black campaign di Pilkada Serentak 2020 terdapat 4 akun yang di pantau secara intensif dari Tim Cyber Polres Blitar Kota. Isi postingan di beberapa akun itu bernada ujaran kebencian atau hate speech & menyerang pasangan calon lain. Saat ini aktifitas 4 akun sosial media tersebut hanya dipantau oleh Tim Cyber Polres Blitar Kota, jika ditemukan unsur pidana maka akan diberi tindakan lebih lanjut dan kasus tersebut akan dilimpahkan kepada ke Divisi Cyber Crime untuk ditindak lanjuti apakah akun tersebut digerakkan oleh mesin atau orang. untuk kepentingan kampanye, setiap tim pasangan calon seharusnya sudah membuat akun sosial media yang didaftarkan ke KPU Kota Blitar dan yang terdaftar tersebut akan menjadi akun resmi paslon untuk kegiatan kampanye.

62. Jawa Pos, 30/09/2020, BELUM ADA USULAN RANPERDA PESEPEDA

Pemkot Blitar akan menuangkan aturan tata tertib bagi pesepeda di Peraturan Daerah (Perda) beberapa waktu lalu, pihaknya tidak mempermasalahkan, mengingat demi keselamatan pesepeda. Anggota

Bapem Perda DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi meminta Pemkot Blitar saat ini fokus dengan beberapa usulan raperda yang telah diusulkan. Sebelumnya ada 2 raperda yang diusulkan untuk dibahas bersama DPRD Kota Blitar. Nuhan juga mengatakan untuk segera menuntaskan usulan raperda tersebut sebelum beralih fokus ke raperda yang lainnya. DPRD Kota Blitar pasti akan menyetujui semua raperda yang diusulkan Pemkot selama raperda tersebut untuk kebaikan masyarakat. Mekanisme raperda membutuhkan waktu yang tidak singkat, harus melalui beberapa tahapan dan uji publik untuk bisa ditetapkan menjadi Perda, nantinya juga diatur untuk jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar perda. Sebelumnya, menindaklanjuti Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang aturan bagi pesepeda yang terbit beberapa waktu lalu, saat ini Pemkot Blitar sedang menyiapkan beberapa tahapan termasuk kajian dalam menyusun sejumlah regulasi atau aturan tata tertib bagi pesepeda. Nantinya aturan itu akan dituangkan melalui Perda terkait jalur sepeda & infrastruktur pendukungnya, alat kelengkapan & keamanan bersepeda.

63. Mayangkara, 01/10/2020, SEBELUM AJUKAN RAPERDA BARU, DPRD MINTA PEMKOT BLITAR FOKUS DENGAN RAPERDA YANG TELAH DIUSULKAN

Anggota Bapem Perda DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi mengatakan terkait rencana Pemkot Blitar akan menuangkan aturan tata tertib bagi pesepeda di Peraturan Daerah (Perda) beberapa waktu lalu, pihaknya tidak mempermasalahkan, mengingat demi keselamatan pesepeda. Namun Nuhan meminta Pemkot Blitar saat ini fokus dengan beberapa usulan raperda yang telah diusulkan. Sebelumnya ada 2 raperda yang diusulkan untuk dibahas bersama DPRD Kota Blitar. Nuhan juga mengatakan untuk segera menuntaskan usulan raperda tersebut sebelum beralih fokus ke raperda yang lainnya. DPRD Kota Blitar pasti akan menyetujui semua raperda yang diusulkan Pemkot selama raperda tersebut untuk kebaikan masyarakat. Mekanisme raperda membutuhkan waktu yang tidak singkat, harus melalui beberapa tahapan dan uji publik untuk bisa ditetapkan menjadi Perda, nantinya juga diatur untuk jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar perda. Sebelumnya, menindaklanjuti Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang aturan bagi pesepeda yang terbit beberapa waktu lalu, saat ini Pemkot Blitar sedang menyiapkan beberapa tahapan termasuk kajian dalam menyusun sejumlah regulasi



atau aturan tata tertib bagi pesepeda. Nantinya aturan itu akan dituangkan melalui Perda terkait jalur sepeda & infrastruktur pendukungnya, alat kelengkapan & keamanan bersepeda.

64. Mayangkara, 01/10/2020, PENGELOLAAN SIRKUIT SENTUL DIAMBIL ALIH PEMKOT BLITAR, WARGA MENGADU KE DPRD

Ketua RW 9 Kelurahan Bendogerit Kecamatan sananwetan Subandi saat hearing bersama komisi dua DPRD Kota Blitar Kamis 1 Oktober 2020 pagi mengatakan pengelolaan sirkuit sentul di Kelurahan Bendogerit tahun ini telah diambil alih pihak Dispora tanpa melibatkan komunikasi warga. Sementara, sejak 2009 – 2013 warga Kelurahan Bendogerit ikut mengelola sirkuit sentul itu dan mendapat pemasukan dari pengelolaan itu. Namun untuk sekarang ini tidak lagi mendapatkan pemasukan uang kas dari pengelolaan sirkuit. Sebelumnya setiap satu minggu sekali pihaknya mendapatkan 50 ribu untuk dimasukkan ke kas RW dan 35 ribu dimasukkan ke dalam kas RT, sedangkan yang disetorkan ke Dispora sebesar 250 ribu perbulan. Selain itu, masyarakat sekitar yang terkena dampak bising dari arena sirkuit juga mendapatkan bantuan berupa sembako yang diberikan sekitar 3 bulan sekali. Harapannya warga masih bisa terlibat dalam pengelolaan sirkuit, namun jika tidak pendapatan dari pengelolaan sirkuit sebagian bisa diberikan kepada warga sekitar, mengingat warga sekitar arena sirkuit terdampaknya. Selain itu, untuk membantu kegiatan warga seperti kampung tangguh ditengah pandemi. Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo mengatakan pihaknya akan memanggil Dispora terkait hal ini. Sehingga Komisi dua bisa segera menemukan solusi terkait pengelolaan antara pihak warga dan Pemkot Blitar.

65. Jawa Pos, 01/10/2020, Kembali Siapkan Anggaran COVID-19

Pemerintah Kota Blitar kembali siapkan anggaran khusus untuk penanggulangan covid-19 dan anggaran itu sudah masuk dalam P-APBD 2020. Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Sapto Johannes mengatakan 19 tersebut masuk ke dalam anggaran tidak terduga dengan besaran Rp 11 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan dampak dari covid-19 baik itu di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Anggaran tersebut sifat antisipatif jadi jika nanti ada kejadian di luar dugaan maka Pemkot sudah siap dengan anggarannya, namun mereka berharap hal itu tidak terjadi. Bagian dari anggaran tersebut sudah terbagi di semua OPD. BPKAD meminta, OPD untuk menyalurkan ke Kelurahan, hingga

Kecamatan, supaya lebih memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak dari covid-19. sebelumnya pemkot juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 62 Miliar untuk penanganan covid 19 titik anggaran itu untuk bidang kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.

66. Koran Memo, 01/10/2020, COVID-19 DIANGGARKAN RP 11 MILIAR

Pemerintah Kota Blitar menyiapkan anggaran sekitar 11 miliar untuk penanganan covid 19. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Blitar, Widodo saptono menyatakan sesuai dengan prosedur anggaran covid-19 itu masuk dana tak terduga. Penggunaan anggaran itu mulai dari bantuan sosial kepada warga yang terdampak hingga untuk penanganan kesehatan warga, di sektor ekonomi juga bisa sebagai stimulan soalnya dampak dari 19 banyak menghantam sektor perekonomian yang ada di Indonesia, jadi anggaran tersebut bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan bagi warga yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, selain itu juga bisa digunakan untuk bantuan modal usaha dan bantuan sosial. Pada pertengahan tahun alokasi dana mencapai 60 miliar lebih yang digunakan untuk pemulihan ekonomi, kesehatan hingga bantuan sosial dan dan dana tersebut berasal dari refocusing APBD 2020.

67. Jawa Pos, 01 /10/2020, GELONTOR 3 MILIAR UNTUK BANTUAN INTERNET SISWA

Subsidi kuota internet diberikan kepada pelajar guna terus mendukung kegiatan belajar mengajar termasuk pembelajaran jarak jauh, sehingga siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Kabid pembinaan pendidikan dasar dispendik Kota Blitar Didit Rahman Hidayat pihaknya mengajukan subsidi kuota internet kepada seluruh siswa yang ada di kota Blitar baik negeri maupun swasta, mulai dari PAUD sampai dengan SMP dan pusat kegiatan belajar masyarakat dengan anggaran 3 miliar. Anggaran tersebut diperoleh dari perubahan APBD 2020 dialokasikan untuk pengadaan bantuan internet. data yang didapat dari Dispenduk Kota Blitar jumlah pelajar yang telah diusulkan untuk menerima bantuan kuota internet sebanyak 20199 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan bantuan selama tiga bulan mulai dari Oktober sampai dengan Desember tahun ini dengan besaran Rp50.000. Selain subsidi kuota internet dari APBD siswa juga mendapatkan dari APBN dengan besaran 35 GB selama 4 bulan mulai dari September sampai dengan Desember 2020. anggaran 3 miliar tersebut sudah disetujui dalam perubahan APBD 2020 Tapi saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari gubernur.

68. Jawa Pos, Koran Memo 03/10/2020, WARGA SEKITAR SIRKUIT MINTA KOMPENSASI

Sejumlah warga sekitar sirkuit mendatangi kantor DPRD Kota Blitar untuk mengadukan terkait pengelolaan sirkuit. Ketua RW 9 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Subandi saat hearing bersama komisi dua DPRD Kota Blitar Kamis 1 Oktober 2020 pagi mengatakan pengelolaan sirkuit sentul di Kelurahan Bendogerit tahun ini telah diambil alih pihak Dispora tanpa melibatkan komunikasi warga. Sementara, sejak 2009 – 2013 warga Kelurahan Bendogerit ikut mengelola sirkuit sentul itu dan mendapat pemasukan dari pengelolaan itu. namun untuk sekarang ini tidak lagi mendapatkan pemasukan uang kas dari pengelolaan sirkuit. Sebelumnya setiap satu minggu sekali pihaknya mendapatkan 50 ribu untuk dimasukkan ke kas RW dan 35 ribu dimasukkan ke dalam kas RT, sedangkan yang disetorkan ke Dispora sebesar 250 ribu perbulan. Selain itu, masyarakat sekitar yang terkena dampak bising dari arena sirkuit juga mendapatkan bantuan berupa sembako yang diberikan sekitar 3 bulan sekali. Harapannya warga masih bisa terlibat dalam pengelolaan sirkuit, namun jika tidak pendapatan dari pengelolaan sirkuit sebagian bisa diberikan kepada warga sekitar, mengingat warga sekitar arena sirkuit terkeada dampaknya. Selain itu, untuk membantu kegiatan warga seperti kampung tangguh ditengah pandemi. Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo mengatakan pihaknya akan memanggil Dispora terkait hal ini. Sehingga Komisi dua bisa segera menemukan solusi terkait pengelolaan antara pihak warga dan Pemkot Blitar.

69. Mayangkara 05/10/2020, PARA PASLON PILWALI BLITAR 2020 DIBERIKAN HAK MENCETAK APK MAKSIMAL 200 PERSEN DARI JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU

Komisioner KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya mengatakan selain memfasilitasi pihaknya juga memberikan kelonggaran kepada Tim Sukses Paslon Pilwali Blitar 2020 untuk mencetak sendiri tambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang mereka pakai. Berkaitan dengan ketentuan jumlah APK, Tim sukses Paslon Pilwali Kota Blitar 2020 bisa menambahkan 200 persen dari jumlahnya yang difasilitasi oleh KPU Kota Blitar. Tahapan kampanye dilakukan selama 71 hari, untuk tambahan APK yang di cetak oleh Paslon itu sudah bisa dipasang sejak tanggal 26 September 2020. Jadi tidak akan mengurangi masa kampanye yang telah ditentukan. Rangga juga mengatakan bahwa ada larangan yang harus dipatuhi oleh para paslon terkait dengan pemasangan APK yaitu diberberapa tempat

seperti di tempat ibadah, instansi pemerintah, sekolahan dan jalan protokol. Sebelumnya KPU Kota Blitar sudah memberikan APK kepada masing-masing Paslon sebanyak 27 APK yang meliputi baliho dengan ukuran 4×7 meter sebanyak 5 buah, umbul-umbul dengan ukuran 5×1,5 meter sebanyak 20 buah dipasang di tiap Kecamatan di Kota Blitar & menyediakan spanduk yang berukuran 1,5×7 meter sebanyak 2 buah dipasang di masing-masing Kelurahan di Kota Blitar.

70. Jawa Pos, 05/10/2020 ANTISIPASI KAMPANYE HITAM, LIBATKAN INFLUENCER

Berkampanye di Media Sosial para Paslon diawasi dengan ketat oleh Influencer. Polda Jawa Timur menggelar pertemuan secara virtual dengan perwakilan influencer di masing-masing kota atau Kabupaten di wilayah Jawa Timur dengan tujuan untuk mengawasi tim Paslon dalam melaksanakan kampanye di media sosial. Acara tersebut berlangsung pada 30/9/2020, dengan total ada 8 influencer mewakili dari Kota Blitar yang diundang dalam pembahasan tersebut. Sebagai influencer mereka harus berperan sebagai pendingin suasana pada gelaran pesta demokrasi tahun 2020. Sesuai rekomendasi pemerintah untuk melakukan kampanye secara online dengan memanfaatkan media sosial sebagai mediana, untuk itu influencer akan memonitor kegiatan kampanye para paslon bersama dengan Polres Blitar kota. Apabila ditemukan postingan dengan ujaran kebencian dalam pelaksanaan kampanye secara online, maka influencer akan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat dan memverifikasi berita bila ditemukan unsur pidana polisi akan Menindaklanjuti kasus tersebut. Akun media sosial yang dimonitoring ini merupakan akun resmi dari paslon yang sudah terdaftar di KPU serta relawan atau pendukung paslon. Kampanye daring memang sangat rawan dengan Black Campaign.

71. Koran Memo, Bhirawa, 7/10/2020, MINTA UTAMAKAN LAYANAN DIBANDINGKAN LABA PERUSAHAAN.

Dewan meminta kepada Perumda di lingkungan Pemkot untuk lebih mengutamakan layanan dari pada laba. Karena saat ini warga sedang membutuhkan pelayanan yang maksimal. DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda yaitu penyampaian pandangan umum fraksi DPRD tentang Rancangan peraturan daerah perumda air minum, bank perkreditan rakyat dan tanggapan Walikota Blitar soal pandangan umum fraksi DPRD disertai penjelasan dalam ranperda tentang APBD tahun 2021. Pada rapat ini dihadiri oleh ketua DPRD Kota Blitar,

dr Syahrul Alim bersama dengan wakilnya Agus Zunaedi, Pjs.Walikota Blitar Jumadi, Sekda Rudy Wijanarko, beserta kepala opd se-Kota Blitar. Pelayanan harus nomor satu baru disusul dengan laba, akan lebih baik lagi apabila pelayanannya bagus begitupun dengan labanya. Pelayanan yang harus diutamakan perumda air minum yaitu meningkatkan kualitas air bersih. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat harapannya mampu menjadi solusi ditengah kebutuhan modal masyarakat yang ada di kota Blitar utamanya dalam memerangi rentenir yang kerap memberatkan masyarakat. Fraksi PDIP, fraksi KB, fraksi PPP, dan fraksi Indonesia bersatu menyetujui ranperda perumda air minum dan BPR. Jumadi juga mengatakan akan memaksimalkan perumda air minum dan DPR.

#### 72. Jawa Pos, Koran Memo, Harian Bangsa 07/10/2020, KECEWA UU CIPTAKER, KIRIM KARANGAN BUNGA

Unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa 6/10/2020, sejumlah massa yang terdiri dari gabungan kelompok Forum Peduli Buruh dan Tani mendatangi kantor DPRD kota Blitar untuk meletakkan karangan bunga di depan kantor wakil rakyat sebagai bentuk rasa prihatin dan kekecewaan. Pada karangan bunga tersebut terlihat ada tulisan " Tolak UU Omnibus Law, Turut Berduka Cita Atas Matinya Nurani Para Wakil Rakyat" . Massa menyampaikan dengan tetap konsisten menolak UU Omnibus Law, menurut mereka di dalam undang-undang tersebut banyak melahirkan ketidak berpihakan dengan petani, buruh serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka juga mengungkapkan terkait dengan hak guna usaha sebuah tanah atau lahan yang diperpanjang secara tidak wajar mereka berpikir bahwa hal itu tidak realistis. Mengacu pada pasal 33 UUD 1945 bahwa penguasaan sumber daya alam dan isinya dipegang oleh negara untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan investor. Adapun salah satu poin yang dinilai merugikan buruh maupun pekerja adalah soal lembur dan cuti dihilangkan. menganggap bahwa undang-undang tersebut akan berpengaruh sampai ke daerah, karena undang-undang akan menjadi payung hukum dari peraturan daerah. Masa juga menuntut DPRD Kota Blitar segera menyampaikan darf tuntutan kepada DPR RI sebagai bentuk penolakan. Sebelumnya draft tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak antara DPRD Kota Blitar dengan Massa.

#### 73. Jawa Pos, 08/10/2020, SISWA KELUHKAN PEMBAGIAN KUOTA INTERNET TAK EFEKTIF

Siswa SMA/SMK di Kota Blitar mengeluhkan subsidi kuota internet 4 bulan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Siswi SMA, Sukma

Nur Indah mengaku telah menerima kartu perdana dari Pemerintah Provinsi sejak awal September. Menurutnya jumlah pembagian kuota internet yang diberikan kurang efektif untuk menunjang pembelajaran daring. Kartu tersebut berisi kuota belajar sebanyak 10 Gb dan 100 Mb kuota umum, dan hanya berlaku satu bulan pertama, untuk bulan berikutnya harus melakukan isi ulang sebesar Rp. 5 ribu untuk bisa mendapatkan kuota. Tadi disini yang menjadi masalah para pelajar adalah pembagian kuotanya, dimana kuota umum lebih sedikit, sedangkan tidak semua pelajaran menggunakan aplikasi yang terhubung dengan kuota belajar. Pelajar lainnya, Cindy Saputri juga mengeluhkan hal yang sama. Selain itu pihaknya juga menegaskan, jika pemberian kuota tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan siswa akan menjadi kurang efektif saat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Sementara, Jokowi mengaku belum mendapat Laporan terkait tidak maksimalnya subsidi dari Pemerintah Provinsi, beliau akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila ada laporan dari siswa, maka akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait.

#### 74. Jawa Pos, Mayangkara 09/10/2020, RATUSAN MAHASISWA GELAR AKSI UNJUK RASA TOLAK OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA DI KANTOR DPRD KOTA BLITAR

Mahasiswa dan elemen masyarakat Blitar menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Kota Blitar dengan massa sebanyak 250 orang. Kompol Hari Sutrisno, Kabag Ops Polres Blitar Kota mengatakan ada sekitar 175 personil kepolisian yang diterjunkan ke lapangan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari Kamis 8 Oktober 2020. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Polres Blitar Kota. Sebagian personil disiagakan di halaman Kantor DPRD Kota Blitar. Sedang sebagian lagi berjaga di depan Kantor DPRD Kota Blitar. Selain itu Polisi juga membuat rekayasa lalu lintas di jalan depan Kantor DPRD Kota Blitar. Jalan di depan Kantor DPRD Kota Blitar ditutup separuh jalan. Pengunjuk rasa yang kedatangan tidak menggunakan masker akan diberikan sanksi secara tertulis. Polwan juga ikut berjaga dalam aksi unjuk rasa terlihat membawa bunga, masker, dan poster himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ratusan massa dari Aliansi Cipayung Plus Blitar Raya & Mahasiswa Kota Blitar berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Blitar menuntut DPRD Kota Blitar mengawal penolakan Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai tidak tepat ke DPR.

Koordinasi Lapangan Unjuk Rasa dari Aliansi Cipayung Plus Blitar Raya, Ardan Abadan mengatakan aksi unjuk rasa pada Kamis 8 Oktober

2020 siang ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa & elemen masyarakat atas ditetapkannya UU Omnibus Law oleh DPR secara cepat & tergesa-gesa pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. Selain itu, menurut Ardan, kebijakan itu merugikan rakyat terutama bagi buruh & petani. Sebab Omnibus Law dinilai lebih memihak investor. Artinya, tegas dia, DPR melakukan penindasan kepada rakyat. Dalam aksi unjuk rasa itu, juga dilakukan Sidang Majelis Peradilan Rakyat antara mahasiswa & anggota DPRD Kota Blitar menyampaikan draft tuntutan rakyat untuk disampaikan ke DPR RI. Ardan meminta anggota DPRD Kota Blitar bisa merespon aksi mahasiswa ini. Jika tidak, maka aliansi mahasiswa & elemen masyarakat akan mengerahkan lebih banyak lagi mahasiswa untuk turun ke jalan agar ditindaklanjuti.

Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto didampingi anggotanya, Nuhan Eko Wahyudi & Ridho Handoko mengaku menerima aspirasi atas aksi demo atau unjuk rasa ini dan akan meneruskan draft tuntutan ke DPR melalui email. Sampai saat ini, DPRD Kota Blitar diakuinya belum menerima salinan Omnibus Law UU Cipta Kerja dari pusat. Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law ini diikuti sekitar 300 lebih massa mahasiswa dari GMNI, PMII, HMI & IMM serta beberapa elemen masyarakat.

#### 75. Jawa Pos, 11/10/2020, 464 PEMILIK BARU BELUM MASUK DPS

Bawaslu kembali menemukan 464 pemilih baru yang belum masuk DPS. Penemuan data pemilih ditemukan secara berkala mulai dari tanggal 6 oktober 2020. Temuan tersebut langsung disampaikan kepada KPU Kota Blitar agar diperbaiki. Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pengecekan data pemilih baru untuk memastikan kejelasan data, menurut Bawaslu Kota Blitar, Abdul Aziz Al-Kaharudin saat ditemui awak media Sabtu, 9/10/2020. Data pemilih baru tersebar di tiga kecamatan yaitu, kepanjenkidul, Sananwetan dan Sukorejo. Penemuan data baru disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya perpindahan penduduk baik keluar maupun masuk, data orang yang meninggal dunia dan kelewatan pada saat kegiatan coklit. Komisioner KPU kota Blitar, Ninik solikhah mengatakan sudah menerima saran perbaikan yang diberikan Bawaslu dan sudah dilakukan pengecekan data baru yang belum masuk DPS.

#### 76. Jawa Pos, 12/10/2020, TUNDA BAHAS RANPERDA TENAGA KERJA

Sepuluh rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk program pembedakan perda (Promperda) 2020 dipastikan tidak semua bisa di bahas pada tahun ini. Badan Pembentuk Perda DPRD Kota Blitar

memastikan hanya 4 ranperda saja yang bisa dibahas dan ditetapkan pada tahun ini dari total keseluruhan ada 10 ranperda. Sementara untuk 6 ranperda akan dilanjutkan pada tahun depan. Satu dari enam ranperda tersebut dipastikan belum bisa dimasukkan ke dalam propemperda 2021 untuk dibahas. Ranperda yang akan dibahas berkaitan tentang ketenagakerjaan, ini termasuk ranperda inisiatif. Namun ditunda untuk sementara waktu karena masih menunggu kejelasan tentang UU Cipta kerja dari pusat. Dodik mengatakan Perda tentang tenaga kerja akan mengatur tentang hak hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Hal ini tentu sangat penting untuk menjamin hak pekerjaan sekaligus kewajiban perusahaan. Sementara untuk saat ini hanya 4 ranperda yang ditargetkan selesai dibahas dan ditetapkan tahun ini diantaranya adalah ranperda tentang PDAM, ranperda tentang Bank Artha Praja, ranperda tentang kesehatan Lanjut Usia, dan ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

#### 77. Jawa Pos, 14/10/2020, TAK SESUAI ATURAN BAWASLU COPOT 220 APK

Sebanyak 220 Alat Peraga Kampanye (APK) harus dicopot karena tidak sesuai dengan aturan pemasangan. Penertiban APK dilakukan Bawaslu sejak Senin 12/10/2020. Mayoritas pelanggaran yaitu lokasi pemasangan yang tidak sesuai ketentuan. Sudah ada aturan dan ketentuannya dalam pemasangan APK , jadi memang sudah ada lokasinya sendiri dimana APK boleh dipasang dan yang dilarang, menurut Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko, Selasa 13/10/2020. Sudah dijelaskan juga bahwa APK dilarang dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, tiang lampu, lembaga pendidikan hingga tempat ibadah. Dari sekian itu yang paling sering ditemukan yaitu APK yang dipasang di tiang listrik, tiang lampu PJU, hingga tiang jaringan kabel telepon. Bawaslu melakukan penertiban APK di tiga kecamatan yang ada di kota Blitar dan yang paling banyak ditemukan yaitu di wilayah kecamatan sukorejo. Pengawasan APK akan terus dilakukan hingga masa kampanye berakhir.

#### 78. Koran Memo, 14/10/2020, DOA BERSAMA DAN DEKLARASI PILKADA DAMAI

Guna menjaga kondusifitas dan cipta kondisi menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar, Polres Blitar kota melakukan doa bersama dan deklarasi Pilkada damai di Masjid Agung. Acara dihadiri oleh Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela, para alim ulama,



takmir Masjid, Ormas Islam Kota Blitar. Ketua MUI Kota Blitar Subakir mengatakan tujuan dari diadakan kegiatan doa bersama malam hari itu adalah untuk menjaga kondusifitas wilayah kota Blitar selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Pada acara tersebut Leonard menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bergesekan antara pihak satu dengan pihak lainnya karena masalah perbedaan pilihan, Selain itu pihaknya menegaskan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan Pilkada tahun 2020 dengan menerapkan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Pilkada merupakan salah satu hajat besar yang melibatkan puluhan ribu pemilih dari berbagai elemen seperti KPU Bawaslu, aparat keamanan, aparat pemerintah, tim pendukung dan lain sebagainya. Maka dalam pilkada ini kuncinya yaitu menerapkan 3 K, koordinasi, komunikasi dan komitmen. Acara selanjutnya yaitu dengan deklarasi dan penandatanganan Pilkada damai oleh peserta yang hadir dan diakhiri dengan doa penutup.

#### 79. Koran Memo, 15/10/2020, LEBIHI TARGET, PENDAFTARAN KPPS DIBATALKAN

Rencana perpanjangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan diabatalkan karena kuota pendaftar sudah melebihi target. Komisioner KPU Kota Blitar mengatakan tidak akan melakukan perpanjangan pendaftaran untuk petugas KPPS. Pasalnya sampai Selasa 13/10/2020 sudah ada 1.957 peserta yang mendaftar menjadi petugas KPPS. Sedangkan yang dibutuhkan pada pilkada Blitar 2020 sebanyak 1.813 peserta. Dikarenakan peserta KPPS sudah terpenuhi maka akan dilaksanakan seleksi, setelah seleksi dilakukan akan menuju tahap selanjutnya yakni penetapan dan pelantikan. Setelah semua tahapan sudah dilaksnakan maka petugas KPPS akan menjalani Rapid Test yang dijadwalkan pada 26 November 2020. Memasuki hari kelima pendaftaran, kuotanya baru terpenuhi 55 persen atau sekitar 993 pendaftar. Pada total kebutuhannya sebanyak 1.813 petugas.

#### 80. Mayangkara 15/10/2020, 16 HARI MASA KAMPANYE, BAWASLU KOTA BLITAR TERTIBKAN RATUSAN APK KARENA LANGGAR KETENTUAN

Komisioner Bawaslu Kota Blitar Divisi Pengawasan, Humas & Hubungan Antar Lembaga, Abdul Azis Al Kaharudin, hari pertama kampanye pada hari sabtu 26 September 2020 sampai dengan senin 12 oktober 2020 sudah ada 251 alat peraga kampanye yang diturunkan oleh Bawaslu Kota Blitar bersama dengan Satpol PP Kota Blitar. Alat

peraga kampanye tersebut di turunkan dengan alasan sudah melanggar cara pemasangan, seperti dipasang di tiang listrik, di rambu-rambu lalu lintas, dan aja juga yang di paku di pohon. APK yang diturunkan oleh pihak berwajib tersebut tersebar di 3 Kecamatan meliputi ada 41 APK di Kecamatan Kepanjenkidul, 49 APK di Kecamatan Sananwetan, dan yang paling banyak di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yaitu sebanyak 161 APK. Alat Peraga yang dicopot tidak akan dimusnahkan, sehingga tim paslon bisa mengambil lagi di Kantor bawaslu Kota Blitar, namun sampai saat ini tidak ada tim paslon yang mengambilnya. Kegiatan penertiban APK ini dilakukan 10 hari sekali dan akan terus dilaksanakan hingga masa kampanye berakhir.

#### 81. Mayangkara 16/10/2020, KPU KOTA BLITAR MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PILWALI KOTA BLITAR 2020

Ninik Solikah, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengatakan Daftar Pemilih Tetap pada Pilwali Blitar 2020 sebanyak 114.890 warga yang tersebar di tiga kecamatan, 21 Kelurahan dan 259 TPS di Kota Blitar. Adapun datanya rinciannya meliputi 56.024 data pemilih laki-laki dan 58.866 data pemilih perempuan. Jumlah DPT yang ditetapkan ini mengalami kenaikan sebanyak 60 orang dari DPS yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya saran perbaikan Bawaslu, Uji Publik DPS, dan KPU yang telah mengaudit data secara internal. Namun dari ribuan data yang diserahkan tidak lebih dari 60 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih baru. Jumlah DPT yang ditetapkan pada Pilwali Blitar 2020 ini meningkat lebih banyak yaitu sekitar 1.346 pemilih dibandingkan pada Pilwali Blitar 2019. Penetapan ini sudah melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan DPT Pilwali blitar 2020.

#### 82. Mayangkara 16/10/2020, BAWASLU KOTA BLITAR TEMUKAN RATUSAN INDIKATOR DATA PEMILIH BARU BELUM MASUK DPS PILWALI BLITAR 2020

Komisioner Bawaslu Kota Blitar Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Abdul Aziz Al-Kaharudin mengatakan ditemukan 571 indikasi data pemilih baru yang belum masuk DPS, temuan ini setelah dilakukan cross-check antara hasil analisa DPT Pemilu 2019 dan DPS Pilwali 2020, kemudian disandingkan dengan data yang tidak memenuhi syarat DPT Pemilu 2019 dan DPS Pilwali 2020. Selain itu juga di lakukan pencocokan data dari Dispendukcapil Kota Blitar. Analisa data

masih belum selasi sampai disini dan masih ada 10 ribu data lebih yang harus dianalisa karena sesuai dengan data yang ada di Dispendukcapil Kota Blitar jumlah wajib KTP sebanyak 117 ribu lebih. Analisa dilakukan untuk memastikan pemilih sudah masuk DPS atau belum dan masih aktif secara administrasi di Blitar atau tidak. Temuan ii juga sudah disampaikan Bawaslu dalam rapat Pleno terbuka penetapan DPT.

83. Forum Nusantara, 16/10/2020, PJS. WALIKOTA BLITAR HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BLITAR, MENYAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PU FRAKSI TENTANG APBD TAHUN 2021

Rapat paripurna DPRD Kota Blitar di laksanakan di Gedung DPRD Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, membahas tentang dua agenda yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap ranperda tentang APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 dan tanggapan atau jawaban Walikota Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD kota Syahrul Alim Dan dihadiri oleh PJS Walikota Blitar Jumadi, Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Wijanarko, Forkopimda dan sejumlah kepala OPD Pemkot Blitar. Point jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD tentang APBD tahun 2021 antara lain terkait dengan penyusunan APBD Kota Blitar tahun 2021. Saat ini Pemkot sedang melakukan tahap pemutahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Kemendagri nomor 050- 37 08 tahun 2020. Berkaitan dengan prioritas APBD tahun 2021 beliau memprioritaskan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian 3 indikator diantaranya indikator kinerja umum, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja daerah. Angka kemiskinan di Kota Blitar menurun pada 3 tahun terakhir 2017 Angka kemiskinan nya sebesar 8,03, tahun 2018 sebesar 7,44 dan tahun 2019 sebesar 7,3.

84. Koran Memo, Jawa Pos, 17/10/2020, KAMPANYE VIA JEJARING SOSIAL JADI PERHATIAN SERIUS BAWASLU

Kampanye yang dilakukan melalui media sosial menjadi atnsi Bawaslu Kota Blitar, salah satu yang diawasi kaitanya dengan netralisasi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Himbauan kepada para ASN yang ada di Kota Blitar untuk bersikap netral dalam Pilwali Blitar, dengan tidak menyukai postingan atau bahkan mengomentari postingan dari tim pasalon. Jika kedapatan menyukai atau mengomentari maka pihak terkait akan menindak lanjuti. Selain itu sanksi yang diberikan kepada

ASN yang kedapatan melanggar akan diserahkan ke Instansinya , seperti Pemkot dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD), karena bawaslu tidak memiliki wewenang, menurut Komisioner Bawaslu Kota Blitar, Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Abdul Aziz Al- Kaharudin, Jumat 16/10/2020. Diakuinya bahwa selama kampanye berlangsung menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, diantaranya ada salah satu ASN yang terindikasi mendukung salah satu calon. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata sudah pensiun. Meskipun demikian Bawaslu tetap memantau para calon, baik secara tatap muka maupun melalui medsos, adapun yang bertugas memantau melalui medsos adalah Tim Cyber.

#### 85. Koran Memo, 18/10/2020, JATAH KARTU SUBSIDI 4 BULAN

Subsidi kuota internet yang diberikan Gubernur Jatim hanya berlaku 4 bulan yakni berakhir pada bulan Desember. Diharapkan kepada seluruh siswa untuk menggunakannya secara maksimal dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kepala SMKN 2 Kota Blitar Joko Marsono mengatakan masa aktif kartu perdana internet merupakan subsidi dari Gubernur Jawa Timur hanya berlaku untuk 4 bulan saja. Jadi untuk kelanjutannya di tahun 2021 kuota tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Pada bulan September lalu siswa mendapatkan subsidi kuota sebesar 10 GB dan jika kuota tersebut sudah habis maka siswa bisa melakukan pengisian ulang saat kuota internet pada kartu tersebut sudah habis, caranya dengan melakukan pengisian pulsa sebesar Rp5.000 untuk bisa melakukan isi ulang kuota dengan besarnya sekitar 11 GB dengan rincian 1 Gb untuk kuota umum dan 10 GB untuk kuota belajar. Dapat dilakukan berulang-ulang sampai pada batas akhir yaitu di bulan Desember karena pemerintah memberikan subsidi selama 4 bulan dan berakhir pada bulan Desember. Subsidi kuota internet bertujuan untuk menunjang kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran jarak jauh di masa pandemi covid 19.

#### 86. Jawa Pos, 19/10/2020, 571 PEMILIH BARU BELUM MASUK DPT

Bawaslu akan terus memantau data pemilih, meskipun KPU Kota Blitar telah menetapkan daftar pemilih tetap ( DPT). Hal ini dilakukan karena Bawaslu Kota Blitar menduga akan terus muncul indikasi pemilih baru yang belum masuk daftar pemilih, hingga Sabtu 17 Oktober 2020 sudah menemukan 571 data pemilih baru yang belum masuk DPS. Temuan tersebut sudah disampaikan ke KPU Kota Blitar pada rapat pleno terbuka penetapan DPT . Komisioner Bawaslu Kota Blitar divisi pengawasan, humas dan hubungan antar lembaga, Aziz Al Kahfi Kaharuddin meminta

kepada KPU Kota Blitar agar segera memperbaiki sejumlah data yang terindikasi pemilih baru. Ratusan data pemilih tersebut merupakan hasil analisa Bawaslu terhadap DPT pemilu tahun 2019 dengan DPS Pilwali 2020, kemudian disandingkan dengan data pemilih tidak memenuhi Syarat (TMS). Selain itu Bawaslu juga menyandingkan data dari dispendukcapil terkait pemilih yang alih status, pindah domisili, meninggal dunia dan lainnya. KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data Dan Informasi, Ninik Sholikhah mengatakan akan Menindaklanjuti saran perbaikan atas temuan 571 data pemilih baru yang belum masuk DPS. saat ini KPU juga sudah Menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. KPU Kota Blitar sudah menetapkan DPT pilwali Blitar sebanyak 114. 890 pemilih sementara untuk jumlah DPS sebelumnya sebanyak 114.895 pemilih.

#### 87. Mayangkara 20/10/2020, JELANG PILWALI BLITAR 2020, 5 RIBU LEBIH WARGA KOTA BLITAR BELUM MEMPUNYAI KTP ELEKTRONIK

Menjelang Pilwali Blitar 2020 banyak warga yang belum memiliki KPT elektronik yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti warga yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 4.094 orang, , sudah melakukan perekaman namun belum dictak sebanyak 219 orang dan sudah mencetak tetapi belum diambil ada 932 orang, jadi total warha yang belum memliki E-KTP sebanyak 5.245 orang terhitung per Juni 2020. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) & Pengolahan Data Dispendukcapil Kota Blitar, Sad Wahjuningtyas mengatakan selain dikarenakan musim pandemi Covid-19 antusias warga untuk mendaftarkan e-KTP dinilai sangat minim, meskipun sekarang sudah disiapkan sarana dan prasana pengadaan e-KTP oleh Dispendukcapil. Sad juga sudah memberikan himbauan kepada warga untuk segera melakukan perekaman, pencetakan atau pengambilan e-KTP supaya hak pilih mereka terpenuhi. Datanya pun juga bervariasi mulai dari umur 17 tahun hingga 60 tahun ke atas. Saat ini, Dispendukcapil Kota Blitar terus melakukan jemput bola, turun langsung ke tiap kelurahan untuk mempercepat proses perekaman KTP elektronik menjelang pelaksanaan Pilwali Blitar 2020.

#### 88. Jawa Pos, 21/10/2020, SUBSIDI KUOTA KEMENDIKBUD BELUM MERATA

Penyaluran bantuan subsidi kuota internet 4 bulan mulai September hingga Desember dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih belum maksimal, masalahnya sampai saat ini masih

banyak yang mengeluhkan baik dari SD maupun SMP belum mendapatkan kuota internet yang besarnya mencapai 35 Gb tersebut. Kepala Bidang, Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, berdasarkan informasi yang diterimanya masih banyak siswa yang belum menerima Subsidi kuota internet dari Kemendikbud. Diduga nomor yang didaftarkan sudah dalam kondisi off sehingga subsidi tersebut belum diterima. Masih belum semua dapat subsidi karena pengiriman dilakukan secara bersamaan dan langsung ke nomornya masing-masing dan nomornya juga beda-beda operator. Selain kemungkinan nomornya off ada juga kemungkinan lain seperti operator juga memerlukan waktu untuk mengisikan kuota ke masing-masing nomor, selain itu kan nomor. Pihaknya juga mengatakan terus berkoordinasi dengan pihak sekolahan untuk mengawal penyakuran subsidi karena hanya pihak sekolahan yang berhak menerbitkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) bagi siswa yang sudah menerima subsidi. Selain itu pihak sekolahan juga harus melaporkan juga melalui website yang sudah disediakan.

#### 89. Koran Memo 22/10/2020, DISDIK BAKAL DIPANGGIL DEWAN

Lelang seragam TK sampai SMP di Kota Blitar gagal dilakukan, untuk itu dewan berencana memanggil dinas pendidikan untuk menurut akar permasalahannya. Sebelumnya tidak pernah terjadi pelelangan seragam yang tertunda seperti ini. Meskipun ada yang gagal Namun bukan masalah seragam melainkan lelang sepeda gratis untuk siswa SMP, menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Said Novandi mengatakan saat ditemui media pada, Rabu 21/10/2020. Hal ini langsung dipertanyakan disebuah forum resmi yang diperkirakan akan dilaksanakan Usai dewan menyelesaikan tugas reses. Beruntungnya tahun ini siswa belum ada kegiatan belajar jadi batalnya pendistribusian seragam tidak terlalu berpengaruh dengan siswa. Ternyata gagalnya pelelangan seragam disebabkan adanya ketidak sesuaian penulisan kode jenis kain, pada saat penginputan pada spesifikasi yang salah sehingga spesifikasi tidak sesuai dengan Perwali Nomor 39 tahun 2020 tentang Pakaian Seragam. Didik megakui pernyataan tersebut dan mengatakan sudah melaporkan kesalahan itu kepada kepala daerah. Dinas juga mengajukan agar pemberian seragam gratis yang batal bisa dianggarkan pada APBD tahun 2021.

#### 90. Mayangkara 30/10/2020, ACARA HIBURAN DITENGAH DEBAT PUBLIK PUTARAN PERTAMA PILWALI BLITAR 2020, INI KATA KPU KOTA BLITAR

Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat & SDM, Ranga Bisma Aditya mengatakan pihak keamanan sempat melarang ada hiburan ketika acara debat publik

berlangsung. Padahal diadakannya acara hiburan itu bertujuan supaya masyarakat yang menonton secara virtual itu tidak bosan makanya diselingi dengan acara hiburan, selian itu pelaksanaanya juga sudah memenuhi protokol kesehatan Covid-19 sehingga dapat dipastikan aman. Rangga mengaku justru dari pihak keamanan lah yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Dengan adanya kejadian ini, menurut Rangga, bisa mempengaruhi lokasi debat publik kedua, apakah akan tetap digelar di Kota Blitar atau di Kota Surabaya. Saat ini pihaknya telah melaporkan hasil evaluasi itu ke KPU Provinsi Jatim, untuk hasil evaluasinya sendiri menyoroti pada komunikasi dengan pihak keamanan terkait dengan acara hiburan ketika debat publik berlangsung, karena sempat terjadi miskomunikasi.

#### 91. Jawa Pos, 04/11/2020, AMANKAN PILWALI, SEBAR RATUSAN PERSONIL LINMAS

Pengamanan Pilwali yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polisi, melainkan ada pihak lain yang membantu yaitu dari perlindungan masyarakat (Linmas). Saat ini sudah sekitar 653 anggota linmas yang sudah lolos seleksi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Blitar. Rencananya anggota linmas tersebut akan disebar di TPS sebanyak 518 anggota, di posko tempat perhitungan suara tingkat kelurahan sebanyak 105 personel, dan perhitungan suara ditingkat kecamatan sebanyak 30 personel. Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun mengatakan akan menyiagakan anggota Satpol PP lainnya untuk mem-back up pengamanan. Para anggota linmas akan mendapat pembekalan teknis terkait pengamanan di TPS, Seragam dan APD . Perlengkapan tersebut rencananya akan dibagikan di akhir november.

#### 92. Koran Memo, 5/11/2020, PEMASANGAN APK DI POHON DIPERTANYAKAN

Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota, Abdul Aziz Al-Kaharudin mengatakan banyak masyarakat dan aktivis yang mempertanyakan terkait dengan perizinan dan status APK paslon Pilwali Kota Blitar 2020 karena dipasang di pohon pinggir jalan. "Beda ya peraturan daerah satu degan lainnya, katakan Kabupaten Blitar hal seperti itu tidak diperbolehkan, sedangkan di Kota diperbolehkan" ujarnya (4/11). Aziz menjelaskan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang peraturan atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil bupati hanya mengatur persoalan dasar. Sedangkan untuk teknisnya ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Dalam perwali disebutkan bahwa pemasangan APK tidak boleh menggunakan paku yang ditancapkan di pohon, melainkan menggunakan tali. Pihak bawaslu juga sudah mengecek ke titik titik lokasi ternyata pemasangan APK menggunakan kawat, jadi tidak ada masalah. Larangan yang terdapat dalam Perwali No. 23 Tahun 2017 diantaranya gedung milik pemerintah, sekolah, taman kota, tempat ibadah, dan di tempat pemakaman umum. Perihal pembersihan APK secara keseluruhan akan dilaksanakan ketika akan memasuki masa tenang.

#### 93. Jawa Pos, 10/11/2020, TUMPANG TINDIH DANA BANTUAN KUOTA INTERNET

Dinas Pendidikan Kota Blitar telah mengusulkan pembatalan subsidi kuota internet kepada Walikota Blitar, karena subsidi yang akan direalisasikan dari P-APBD akan tumpang tindih dengan subsidi kuota internet yang diberikan Kemendikbud. Program subsidi tersebut dinilai kurang tepat karena pemerintah pusat memberikan bantuan kuota internet kepada pelajar Kota Blitar pada bulan September hingga Desember mendatang, menurut Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dispendik Kota Blitar, Didit Rahmat Hidayat pada saat ditemui di kantornya Senin, 9/11/2020. Didit mengatakan rencana subsidi tersebut sudah dianggarkan dalam perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah (P-APBD) 2020, karena sebelumnya belum ada skema bantuan kuota internet dari kemendikbud. Besaran kuota yang diberikan pemerintah pusat sudah cukup untuk kebutuhan belajar secara daring , dan digunakan untuk mengakses rumah belajar dan whatsAap. Meskipun programnya subsidi internet tahun ini dibatalkan, kemungkinan akan diusulkan kembali pada APBD tahun depan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila pandemi ini masih berlangsung hingga tahun 2021. Subsidi kuota internet ini diberikan mulai dari PAUD hingga SMP. Pemberian subsidi ini sebagai upaya untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh karena pandemi Covid-19.

#### 94. Blitarkota.go.id 11/11/2020, WOMAN CONFERENCE 'PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PESTA DEMOKRASI'

Dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol dan PBD) bersama Komite Nasional Pemuda



Indonesia (KNPI) Kota Blitar mengadakan Sosialisasi Women Conference di ruang Integrated System Centre, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar, Rabu (11/11/2020). Acara ini diikuti oleh unsur pemuda, mahasiswa dan masyarakat Kota Blitar. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus penguatan peran perempuan terutama jelang Pilkada 2020. Hakim Sisworo, Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar usai membuka acara mengatakan, perempuan diminta untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 9 Desember nanti. Selain karena memiliki hak, namun suara dari perempuan juga dianggap berpengaruh dalam menentukan setiap kebijakan. Sementara itu, Rangga Bisma Aditya, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM sekaligus narasumber dari kegiatan ini usai acara mengatakan, pada pemilu ini perempuan tidak hanya menjadi objek tetapi diharapkan juga mampu menjadi subjek. Artinya suara perempuan dianggap menjadi penentuan arah pembangunan Kota Blitar kedepan. Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan memberilan impact untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada perempuan. Sementara, sesuai informasi sementara dari total 114.890 pemilih, sebanyak 58.000 orang terdiri dari perempuan. Pada pesta demokrasi 9 Desember mendatang, warga Kota Blitar melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

95. [Blitarkota.go.id](http://Blitarkota.go.id) 11/11/2020, DINILAI PALING INOVATIF, KPU JATIM APRESIASI UPAYA KPU BLITAR MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILWALI 2020

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, utamanya pemilih pemula Pilwali 2020, mendapat apresiasi dari KPU Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya, apresiasi itu disampaikan Gogot Cahyo Baskoro-Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, saat hadir di Sosialisasi Nyoblos Itu Maha Asyik. Rabu, (25/11/2020). Gogot menilai KPU Kota Blitar sangat kreatif dan inovatif dalam melakukan sosialisasi partisipasi pemilih pemula. Menurutnya 19 Kota-Kabupaten di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pilkada 2020, Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah yang memiliki banyak program kreatif dan inovatif. Misalnya lomba design poster, lomba membuat video Pilwali, lomba karaoke Pilwali, lomba pidato demokrasi, lomba fotografi dengan tema Pilwali, dan masih banyak lagi. Pihaknya juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi "Nyoblos Itu Maha Asyik" yang dikemas kekinian. Menurut Gogot sosialisasi yang dikonsep modern, lebih menarik

bagi pemilih pemula, sehingga materi yang disampaikan pun akan lebih mengena. Sementara itu Rangga Bisma Aditya-Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, pemilih pemula di Kota Blitar memiliki peran yang sangat tinggi untuk mensukseskan Pilwali. Pihaknya menargetkan, 7.000 pemilih pemula yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwali 2020, bisa berpartisipasi penuh 09 Desember nanti.

#### 96. Jawa Pos, 11/11/2020, DEWAN TOLAK USULAN LEMARI PEMBEKU

Dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKP 2) Kota Blitar mengusulkan anggaran untuk penambahan fasilitas baru di rumah pemotongan hewan dimoro di APBD 2021. Fasilitas yang dimaksudkan tersebut berupa apa Blast freezer atau lemari es pembeku dan Restraining box atau alat untuk merobohkan sapi dengan mesin hidrolik. Kepala Bidang Pertenakan, DKP2 Kota Blitar, Dewi Masitoh telah mengusulkan anggaran untuk pembelian fasilitas pendukung di RPH pada APBD 2021. Dari ke 2 usulan yang diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Blitar hanya satu usulan yang disetujui oleh DPRD kota Blitar yaitu alat Restraining box. Adapun untuk besaran anggaran yang diusulkan sekitar Rp 165 juta. Dengan adanya tambahan alat tersebut akan semakin mempermudah proses penyembelihan sapi. proses penyembelihan pun lebih cepat sehingga pembeli bisa segera terlayani. Sementara untuk lemari es pembeku daging sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat saat ini di masa pandemi tak sedikit permintaan daging beku terutama permintaan dari luar daerah.

#### 97. Jawa Pos, 13/11/2020, TEMUKAN DATA INDIKASI PEMILIH BARU BELUM MASUK DPT

Bawaslu kembali menemukan sejumlah data pemilih yang terindikasi belum masuk DPT, penemuan ini berdasarkan hasil analisa bawaslu terhadap DPT yang ditetapkan pada 16 Oktober 2020. Komisioner Bawaslu Kota Blitar Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Abdul Aziz Al-Kaharudin mengatakan pada media 12 November 2020, ada 656 indikasi data baru yang belum masuk DPT. Sedangkan untuk data pemilih yang sudah meninggal dunia masuk DPT ada 2 orang, data pemilih ganda ada 1 orang, indikasi pemilih keluar 1 orang, indikasi pemilih dibawah usia 1 orang. Dalam menganalisa DPT yang telah ditetapkan beberapa waktu Bawaslu harus berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait dengan nama nama yang ditemukan tersebut apakah masih aktif

atau sudah meninggal, serta untuk mengetahui apakah ada yang beralih status. Bawaslu langsung menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, pihaknya merekomendasikan KPU untuk lebih mencermati DPT dan hasil analisa tersebut.

98. Koran Memo, 14/11/2020, KPU TERIMA LPDSK PASLON SANTOSO-TJUJUK Rp. 142 JUTA DAN HENRY-YASIN Rp. 26 JUTA

Komisioner KPU kota Blitar Divisi Teknis, Hermawan Miftakhul Habib mengatakan, Paslon Pilwali Kota Blitar mulai melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye. Pasangan santoso dan tjujuk menjadi pasangan yang paling besar menerima laporan dana kampanye yaitu sebesar Rp 142 juta, sedangkan untuk pasangan henry – yasin sebesar Rp 26 juta. Laporan ini dilakukan secara online pada akhir bulan oktober lalu, penyerahan laporan melalui sistem informasi dana kampanye atau yang biasa disebut dengan Sidakam. Sesuai prosedur yang berlaku apabila KPU sudah menerima laporan, selanjutnya akan diumumkan melalui website sebagai bentuk transparansi. Selain melaporkan dana penerimaan dana kampanye, paslon juga harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran daa kampanye maksimal tanggal 6 Desember 2020. Ada 3 laporan yang harus dilakukan di antaranya laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dana kampanye, dan laporan pengeluaran dana kampanye. Laporan awal dana kampanye dilakukan pada tanggal 25 September 2020, pasangan Santoso – Tjujuk Rp 1 Juta sedangkan untuk pasangan Henry-Yasin Rp 5 juta.

99. Koran Memo, 14/11/2020, GELAR BIMTEK PERDANA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Ketua KPU Kota Blitar melakukan bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2020. Acara bimtek dilaksanakan di Convention Hall, Puri Perdana pada hari Jumat, 13 November 2020. Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengatakan bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara merupakan bimtek pertama yang digelar beberapa Bimtek lanjutan. Tujuan utama dari diadakannya Bimtek adalah untuk memberikan pemahaman awal kepada PPS dan PPK tentang pemungutan dan perhitungan suara, ditambah lagi akan ditetapkannya KPPS sehingga perlunya pemahaman secara utuh dari TPS untuk menyampaikan kembali kepada KPPS di wilayahnya masing-masing. Pihaknya juga menjelaskan, terdapat perubahan yang signifikan tentang fungsi dari Sirekap regulasi

yang terakhir. Selain memiliki fungsi tabulasi Sirekap juga berfungsi untuk mengolah data secara JPEG yang sebelumnya itu menjadi fungsi tersendiri yang masuk dalam Silon, namun ada kemungkinan silon akan ditiadakan.

#### 100. Jawa Pos, 15/ 11/2020, TERUS TERTIBKAN APK SALAH PASANG

Penertipan Alat Peraga Kampanye akan terus dilakukan sampai masa tenang. Pada hari Jumat, 13 Nvember 2020 Komisioner Bawaslu Kota Blitar, Abdul Aziz Al kaharudin mengatakan penertiban APK masih terus dilakukan sesuai rencana masih ada dua kegiatan untuk penertiban APK di masa kampanye. Penertipan APK harus melalui beberapa rangkaian administrasi yang panjang jadi hasil pengawasan atau temuan dari pengawas tingkat kelurahan dan kecamatan kemudian direkomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti salah satunya dengan sanksi pencopotan APK. Sebelum penertiban dilakukan biasanya KPU memberitahukan kepada tim paslon untuk menertibkan APK nya sendiri. Jika tidak ditertibkan maka akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Di sepanjang jalan Utara makam Bung Karno masih banyak APK yang melanggar ketentuan diantaranya APK dipasang di pohon dengan cara dipaku hal tersebut dilarang karena bisa mengancam kelestarian pohon , sedangkan yang diperbolehkan yaitu dengan cara ditali atau diikat dengan kawat ataupun tali.

#### 101. Blitarkota.go.id 09/12/2020, BAWASLU TIDAK TEMUKAN PRAKTIK MONEY POLITIC DI MASYARAKAT

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar terus mengawal pelaksanaan tahapan Pilwali, hingga hari H pencoblosan. Hingga 09 Desember 2020, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dan praktik money politik. Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko mengatakan untuk money politik, pengawasan dilakukan mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga hari H pencoblosan. Selama masa tenang tanggl 06 sampai 08 Desember 2020, Bawaslu bersama jajaran kepolisian dan Satpol PP melakukan patroli hingga dini hari, untuk mengantisipasi adanya praktik money politic. Namun, hingga hari H Pilwali 2020, hasilnya nihil. Bawaslu juga tidak menerima laporan apapun dari masyarakat. Bambang menegaskan pengawasan partisipatif dari masyarakat pada Pilwali 2020 dinilai meningkat. Saat ini banyak masyarakat yang sadar bahwa money politic tidak menguntungkan. Utamanya kelompok pemilih pemula, yang memiliki sisi integritas dan idealisme yang cukup tinggi. Disisi lain, Bawaslu juga sudah gencar melakukan sosialisasi anti-

money politic di sekolah hingga kampung-kampung. Bambang mengajak masyarakat untuk tetap berperan aktif melakukan pengawasan sampai tahapan final Pilwali, yaitu pengesahan pasangan calon terpilih.

#### 102. Blitarkota.go.id 09/12/2020, KPU KOTA BLITAR PASTIKAN HAK SUARA PASIEN COVID-19 TERAKUMULASI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar memastikan hak suara pasien konfirmasi Covid-19 di Kota Blitar, tetap terwadahi saat hari H pemungutan suara Pilwali 2020. Rabu, (09/12/2020). Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan KPU telah menghadirkan tujuh TPS keliling di RSUD Mardi Waluyo dan Rumah Sakit Swasta, serta satu TPS Khusus di Rumah Isolasi Covid-19 dan Lapas Kelas IIB Blitar. KPPS terdekat diterjunkan untuk memfasilitasi pemilih yang terkonfirmasi, dengan didampingi Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Petugas yang terjun di tempat isolasi ini, dibekali Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19, yang terdiri dari baju hazmat level tiga, face shield, dan masker. Secara teknis, pemungutan suara bagi pasien konfirmasi ini dilakukan melalui petugas pendamping. Petugas KPPS hanya masuk sampai di lobi, sedangkan petugas kesehatan yang sudah menandatangani form C, akan masuk ke ruang isolasi dan membantu pasien melakukan pencoblosan. Petugas yang menunggu diluar, manyaksiskan proses pencoblosan tersebut melalui CCTV. Rangga tidak bisa merinci berapa total pemilih yang terkonfirmasi Covid-19 di Kota Blitar. Namun untuk pemilih yang ada di Lapas Kelas IIB Blitar ada sekitar 30 orang, 14 diantaranya merupakan pasien konfirmasi Covid-19. Sedangkan untuk pemilih di Rumah Isolasi Covid-19 ada sekitar 16 orang. Rangga berharap, partisipasi pasien konfirmasi Covid-19 di Kota Blitar bisa menambah canvas KPU untuk mencapai target partisipasi masyarakat pada Pilwali 2020, sebesar 80%. Meski belum mengetahui angka riilnya, namun jika melihat animo masyarakat selama proses pemungutan suara, Rangga optimisi target itu bisa terpenuhi.

#### 103. Memo X, 16 Desember 2020, KPU KOTA BLITAR TETAPKAN REKAPITULASI SUARA PILWALI KOTA BLITAR 2020

KPU Kota Blitar melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada tanggal 15 Desember 2020 di salah satu hotel yang ada di Kota Blitar. Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengatakan dalam rekapitulasi tersebut KPU Kota Blitar menetapkan Perolehan suara nomor urut 1

(Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto) memperoleh total suara 37.362 dan nomor urut 2 (Santoso-Tjujuk) memperoleh suara sebanyak 50.258. Jumlah suara sah sebanyak 87.620 dan suara tidak sah sebanyak 3288 dari total DPT 114.890. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 90.908. Choirul Umam menyampaikan bahwa dalam pilwali tahun 2020 KPU Kota Blitar berhasil mendapatkan prestasi karena tingkat partisipasi pemilih mencapai 79,2 persen melebihi target nasional yaitu sebesar 77,5 persen. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan pihak yang membantu KPU Kota Blitar dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

#### 104. Koran Memo, Jawa Pos. 17/11/2020, SOAL APBD, PEMKOT DEWAN SATU KATA

Pjs walikota Blitar, Jumadi menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Blitar rapat paripurna bersama DPRD berjalan dengan lancar, Dewan memberikan persetujuan berkaitan dengan APBD 2021 dan masukan dari Dewan akan menjadi Evaluasi bagi Pemerintah Kota. Rapat Paripurna itu adalah proses, dia mencontohkan soal APBD 2021, antara eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk membahas anggaran. Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya eksekutif dan legislatif satu kata atau meyetujui anggaran yang akan di jalankan tahun depan. Menurutnya, Pemkot dan Dewan merupakan satu kesatuan, dimana pemkot yang menjalankan program dan legislatif yang mengawasi serta mengontrol kebijakan.

Rapat paripurna, dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim dan wakilnya Agus Zunaidi. Sementara itu Pjs Walikota Blitar menghadiri rapat paripurna bersama Sekda Kota Blitar, Rudy Wijonarko dan para kepala OPD selain itu juga dihadiri oleh perwakilan dari Polres Blitar Kota, Dandim 0808/Blitar, Danyonif511/Blitar, Pengadilan Negeri, dan Kajari Blitar. Rapat bertajuk Penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Dan Persetujuan Bersama Atas Ranperda Tentang APBD Kota Blitar 2021.

Prosesi pada rapat ini diawali dengan pembacaan berita acara, laporan badan anggaran, hingga sambutan dari 4 fraksi diantaranya PDI perjuangan, KB, PPP, Indonesia Bersatu. Keempat fraksi tersebut juga menyetujui soal Ranperda APBD 2021. Stahrul juga megatakan pada tahun 2021 yang perlu digaris bawahi adalah Pemkot tetap menganggarkan biaya penanganan Covid – 19, namun semua kaan tetap jai prioritas, untuk Covid, pembangunan dan infrastruktur lainnya.

105. Jawa Pos, 11/11/2020, SAHKAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2021, PRIORITASKAN PENANGANAN COVID-19

DPRD Kota Blitar melaksanakan rapat paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) 2021, Dan Persetujuan Bersama Atas Raperda Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2021, selain itu juga membahas tentang prioritas penanganan dampak covid-19. Rapat dilaksanakan di ruang graha paripurna pada tanggal 16 November 2020. Rapat Paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, Wakil DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, Plt Walikota Blitar Jumadi, Sekda Kota Blitar Rudy Wijonarko, perwakilan Polres Blitar Kota, Dandim 0808/ Blitar, Danyonif 511/ Blitar, Pengadilan Negeri Blitar, Kajari beserta Kepala OPD lingkup Pemkot juga nampak hadir pada rapat tersebut. Syahrul mengatakan tujuan dari pembahasan 2 agenda ini untuk menyikapi kebutuhan pada tahun mendatang. Adapun perda yang akan disusun ada 2 usulan eksekutif dan inisiatif DPRD, serta membahas APBD yang di prioritaskan untuk penanganan Covid-19.

106. Koran Memo, 18/11/2020, LOGISTIK COBLOSAN TIBA DI KPU

Menjelang pelaksanaan pemilihan Pilwali Blitar 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, satu persatu logistik sudah tiba di gudang logistik KPU Kota Blitar di Jl. Kelurahan Nasional III Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Adapun logistik yang datang berupa surat suara sebanyak 119.888 lembar. Jumlah surat suara tersebut sudah mampu mengakomodasi kebutuhan Pilkada di Kota Blitar. Selain surat suara beberapa logistik lainnya juga sudah datang, diantaranya kota suara, kabel ties, segel dan tinta. Sementara untuk template dan formulir C masih menunggu. Sebagian logistik yang belum datang merupakan yang berhubungan dengan sortir lipat surat suara, untuk perihal ini pihaknya tidak melibatkan pihak luar, tapi melibatkan sekitar 40 orang dari PPK dan PPS. Hal ini bertujuan demi keamanan surat suara.

107. Koran Memo, 18/11/2020, Pemerintah Kota Blitar menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD)

Untuk penyelenggaraan Pilwali, Pemkot Siapkan APD yang akan diberikan kepada petugas KPPS. Selasa, 17 November 2020 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, Hakim Sisworo, mengatakan bahwa APD sudah siap di distribusikan ke KPU Kota Blitar paling cepat minggu ini dan saat ini masih disimpan. Adanya APD setidaknya bisa meminimalisir penyebaran Covid -19. Pemerintah Kota

Blitar berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang aman, sehat dan damai. Mewujudkan komitmen tersebut Pemkot memberikan sarana berupa APD. Anggaran yang digunakan dalam pengadaan APD dan Rapid test sebesar 5 Miliar. Adapun perlengkapan APD meliputi masker, sarung tangan, face shield, hand sanitizer, baju hazmat sekali pakai dan lainnya. Jumlah KPPS dalam pesta demokrasi ini sebanyak 1.813 orang yang akan disebar ke 21 kelurahan, dan setiap TPS akan di isi 7 petugas.

#### 108. Jawa Pos, 18/11/2020, PENGADAAN LOGISTIK TERKENDALA REGULASI

Sampai saat ini senin, 16 November 2020 pengadaan logistik Pilwali di Kota Blitar terkendala, pasalnya sampai saat ini hanya tersedia 2 item dari totalnya 28 item. Ketua Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Blitar, Chrisetyo Widyaksono, menyatakan bahwa regulasi dari pusat belum final sehingga menghambat pengadaan barang. Pasalnya pengadaan barang dan jenisnya harus disesuaikan dengan regulasi pusat. Sehingga saat ini masih tersedia 2 item yang sudah ada di gudang KPU Kota Blitar dari totalnya 28 item yang harus disiapkan. Dua item tersebut meliputi kabel ties dan tinta, KPU menyiapkan tintanya dua kali kebutuhan di TPS yaitu sebanyak 518 botol lengkap dengan step pipetnya, sedangkan kbel ties yang digunakan untuk pengaman kotak suara sebanyak 1.554 buah. Kemudian untuk surat suara juga belum datang sampai saat ini, namun dari pihak percetakan bilang kemungkinan paling lambat hari Rabu 18 November 2020 akan sampai di KPU. Selain kebutuhan logistik, kelengkapan APD juga akan disediakan oleh Pemkot Blitar.

#### 109. Koran Memo, 20/11/2020, ANTUSIASME MASYARAKAT LEBIH TINGGI

KPU Kota Blitar kembali membuat keputusan tentang lokasi debat terakhir Pilwali. Semula debat akan dilaksanakan di Surabaya, kini lokasinya dikembalikan di Blitar dengan alasan antusias masyarakat yang tinggi untuk mengikuti jalannya debat via televisi dibandingkan di luar kota. Pengembalian lokasi debat ini sudah melalui proses yakni hasil evaluasi debat publik kedua di Surabaya beberapa waktu lalu. Setelah melalui pertimbangan akhirnya debat puncak di putuskan di blitar, untuk lokasi menyusul dalam waktu debat ini. Setelah melaksanakan 2 kali debat dapat dilihat jika animo masyarakat lebih tinggi jika debat dilakukan di Kota Blitar meskipun masyarakat hanya menyaksikan secara online. Waktu debat pertama dilaksanakan di Kota Blitar perbincangan masyarakat mampu bertahan lama, sedangkan ketika debat dilaksanakan



di luar kota perbincangannya sekitar sehari saja, meskipun pelaksanaan debat di Surabaya lebih efektif dan efisien dibandingkan di Kota Blitar.

#### 110. Koran Memo, Jawa Pos 30/11/2020, HARI PERTAMA SORTIR SEBANYAK 134 SURAT SUARA RUSAK

Logistik surat suara Pilwali Kota Blitar mulai dilakukan penyortiran di KPU Kota Blitar pada 28 November 2020, diketahui terdapat ratusan surat suara tak layak edar. Kasubag Umum Sekretariat KPU Kota Blitar, Chrisetyo Widyaksono mengatakan hari pertama penyortiran data dengan total 33.420 terdapat 134 surat suara rusak. Kerusakannya juga bervariasi mulai dari robek, hasil cetakan tidak merata atau ada sebagian cat yang hilang, dan warna dari surat suara tidak sesuai spesifikasi. Surat suara ini akan dikembalikan ke percetakannya untuk diganti dengan surat suara yang baru. KPU juga masih menunggu hasil sortiran pada hari kedua ketika sudah ada totalnya maka akan dibuatkan kebijakan. Ada 86 ribu surat suara yang sedang di sortir. Sementara KPU menerima surat suara sebanyak 119.888 lembar.

#### 111. Jawa Pos, 30/11/2020, SALURKAN HAK PILIH WAJIB TERAPKAN PROKES

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Blitar Moh. Aminurcholis menjelaskan mematuhi protokol kesehatan saat beraktifitas dan terutama pada saat menyalurkan hak suara pada Pilwali 9 Desember 2020 harus menjadi kesadaran bersama. Masyarakat yang hendak menyalurkan suara ke TPS harus mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di Kota Blitar. Penerapan protokol kesehatan pada saat pesta demokrasi meliputi 3 M yaitu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menggunakan masker. Berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya karena pada tahun ini masa pandemi Covid-19 maka membutuhkan persiapan yang berbeda agar kegiatan dapat berjalan lancar, untuk itu petugas akan mengarahkan masyarakat yang ada di TPS.

#### 112. Harian Bangsa, 01/12/2020, KPU Kota Blitar kekurangan 1.893 surat suara

Sortir dan lipat surat suara dilakukan pada tanggal 28-29 November 2020 telah dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Minggu, 29 November 2020 Kasubag Umum Sekretariat KPU Kota Blitar, Chirsetyo Widyasono mengatakan hasil dari sortir surat suara saat ini jumlah kekurangannya

mencapai 1.893 lembar dengan rincian ada 1.334 surat suara yang belum dikirim dan ada 559 lembar surat suara yang rusak. pada pilwali Blitar 2020 membutuhkan surat suara sebanyak 119.888 lembar,. Jumlah itu sudah termasuk untuk 2,5% suara cadangan dan 2000 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang. setelah dilakukan sortir KPU hanya menerima satu 18.554 lembar surat suara. KPU Kota Blitar akan mengajukan penggantian dari kekurangan kiriman surat suara dan surat suara rusak, untuk itu sebelum melakukan pengajuan penggantian an-nur akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu.

#### 113.Koran Memo, 3/12/2020, AJAK TOKOH AGAMA KAMPANYEKAN PEMILU AMAN

Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard Sinambela melakukan kegiatan kunjungan silaturahmi ke kantor Nahdhotul ulama dan Muhammadiyah dengan tujuan untuk mewujudkan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang aman, sejuk dan taat protokol kesehatan. Kunjungan ini dilakukan pada senin, 1 Desember 2020 diawali dengan mendatangi kantor cabang Muhammadiyah dan dilanjutkan ke kantor cabang Nahdlatul Ulama. Leonard ingin menyampaikan persepsi bersama-sama untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilih namun tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19. Selain itu pihaknya juga menghimbau untuk tidak terpecah pasca pelaksanaan pencoblosan hanya karena beda pilihan. Polres Blitar kota juga menyerahkan bantuan sosial berupa 5 kuintal beras, 1.000 masker, 20 liter henseinaitaizer kepada pihak PCNU dan PD muhammadiyah kota Blitar. Ini merupakan salah satu wujud kedekatan Kapolres Blitar kota dengan tokoh agama yang ada di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

#### 114.Koran Memo, 3/12/2020, MINTA AKTIVITAS DIHENTIKAN SEMENTARA

Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto melakukan sidak ke lokasi tower BTS di Jl. Melati gang 2 pada hari Rabu, 2 Desember 2020. Beliau mengatakan secara prinsip sidak ini dilakukan berdasarkan aduan penolakan yang disampaikan GPI dan masyarakat pada 23 November 2020. DPRD juga sudah menampung aduan maupun aspirasi masyarakat sekitar tower. Totok menyampaikan hasil audiensi yang dilaksanakan oleh DPRD bersama GPI dan masyarakat, meminta untuk dilakukan peninjauan ulang bukan hanya pada prosedur permohonan melainkan tentang penerbitan izin yang dilakukan OPD. Dari hasil sidak yang telah dilakukan, pihaknya menyebutkan jika lokasi tower ini berada di tengah perumahan

warga, jarak paling dekat dengan rumah warga sekitar 4 meter. Selain itu juga dilakukan pengukuran zona melingkar pada sekitar tower yang hasilnya diketahui radius berjarak 30 meter dari titik tengah ditarik dari garis dalam ke luar. Totok jua menjelaskan segala peraturan perundang-undangan harus dijalankan dan diterapkan sehingga jika kedepannya permohonan izin tidak bisa melengkapai dan menyelesaikan persyaratan akan ada potensi izin pendirian tower dicabut.

#### 115.Koran Memo 04/12/2020, SUKSESKAN PILKADA SENIMAN NGAMEN SUARA KAN COBLOSAN

Kamis, 3 Desember 2020 para seniman bersemangat membantu menyukseskan pemilihan kepala dengan cara ngamen dari rumah ke rumah untuk menyuarakan pentingnya coblosan. Melalui grupnya Said Novandi beserta grup Keroncong mengamen dari toko ke toko dengan menyanyikan lagu agar mau mencoblos pada tanggal 9 Desember nanti. Said mengaku bahwa dirinya tidak mengamen sendirian melainkan dengan seniman musik keroncongnya dan para kader PDI Perjuangan dengan mendatangi toko di sepanjang jalan Merdeka. Mereka saling berbagi tugas ada yang memainkan biola, gitar, bass hingga ukulele selama kurang lebih 5 menit. Selain mengamen, para kru juga membagikan bunga ke warga sekitar dengan memberikan kalimat ajakan untuk mengaspirasi pilihannya pada 9 Desember mendatang. warga pun memberikan respon positif kepada pengamen yang mensosialisasikan ajakan untuk menggunkan hak pilihnya di Pilkada 9 Desember nanti.

#### 116.Jawa Pos, 7/12/2020, MASA TENANG TERTIBKAN RATUSAN APK

Alat Peraga Kampanye (APK ) berbagai jenis mulai ditertibkan pada 6 Desember 2020 karena sudah memasuki masa tenang. Komisioner KPU Kota Blitar, divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan petugas gabungan yang diketuai oleh KPU Kota Blitar, Bawaslu, Polri/Tni dan Satpol PP menyisir di sejumlah titik di 3 Kecamatan yang ada di kota Blitar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan Apakah masih ada APK yang terpasang atau tidak di masa tenang yang dimulai pada 6 sampai 8 Desember. Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa dalam masa tenang harus bersih dari berbagai bentuk APK tetapi sampai saat ini masih banyak APK yang terpasang di berbagai tempat. Dengan demikian petugas langsung menertibkan APK yang masih terpasang karena APK tersebut tidak dicopot oleh tim paslon. Sebelumnya KPU sudah menghimbau kepada tim paslon

untuk segera mencopot sendiri sejumlah APK sebelum memasuki masa tenang, namun tidak dihiraukan oleh tim paslon. Apabila mereka tidak mengindahkan permintaan dari KPU maka Tim paslon akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif.

#### 117. Koran Memo, 08/12/2020, LOGISTIK SIAP DIDISTRIBUSIKAN

Senin, 7 Desember 2020 Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengatakan bahwa dua hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan semua logistik sudah lengkap dan sudah siap untuk didistribusikan ke TPS di seluruh Kota Blitar. Perlengkapan protokol kesehatan dan teknis pelaksanaan sudah tersedia secara keseluruhan dan sudah didistribusikan, selain itu buku panduan yang sudah dinanti juga sudah datang dan sudah didistribusikan ke petugas untuk dipelajari. Sedangkan logistik teknis seperti kotak suara, surat suara, form dan sebagainya akan didistribusikan pada hari selasa 8 Desember 2020. Semua item akan diserahkan secara simboleh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan akan langsung diteruskan kepada panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing kelurahan. Setelah itu logistik akan diinapkan semalam dan akan diteruskan pagi harinya ke TPS. Terakhir KPU akan membakar Surat Suara yang cacat atau rusak.

#### 118. Jawa Pos, 10/12/2020, 500 METER PERGI KE TPS MENGGUNAKAN KURSI RODA

Pilwali Blitar 9 Desember 2020 tampak warga berjajar rapi dan sejumlah TNI, Polri dan Linmas yang sedang bertugas. Disela-sela antrian yang panjang terdapat warga yang cukup menyita pandangan petugas Tps 009 yang berlokasi di kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar. Hal yang menyita pandangan tersebut ada pada warga penyandang disabilitas yang tetap semangat menyalurkan haknya pergi ke TPS. Terlihat dua orang duduk di kursi roda yang berada di barisan depan antrian para DPT yang tengah menunggu giliran mencoblos. Kedua sosok tersebut adalah Yulia Sri Wulandari dan Bibit Santoso. Keduanya merupakan penyandang disabilitas dengan sejumlah keterbatasan fisik. Yuli mengaku bahwa dirinya tidak keberatan untuk menggunakan hak pilihnya walaupun harus menggunakan kursi roda sendirian untuk menuju ke TPS karena menurutnya menggunakan hak pilih pada Pilwali 2020 ini merupakan kewajiban bagi warga yang ada di Kota Blitar. Berbeda dengan yulia, salah seorang penyandang disabilitas lain, bibit santoso mengaku bukan warga Kota jika dirinya tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilwali kali ini,

menurutnya menggunakan hak pilih merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Camat kepanjenkidul mengapresiasi yulia dan bibit karena sudah meluangkan waktunya untuk menggunakan hak pilihnya, dan pihaknya juga berpesan untuk mengambil sikap teladan dari kedua warga tersebut.

119. Jawa Pos, 10/12/2020, ANTUSIAS TINGGI, PEMILIH PATUH PROKES.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020, S ekda Kota Blitar, Rudy Wijonarko melakukan kunjungan ke 3 TPS di 3 Kecamatan dan 1 TPS Khusus di Lapas Kelas IIB Blitar. Peninjauan ini dilakukan untuk meastikan bahwa TPS benar-benar mematuhi protokol kesehatan, dan hasilnya rata-rata TPS sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik di masa pandemi ini. Selain itu partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan suaranya cukup tinggi. Masyarakat mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan dimasa pandemi serta mencegah penularan Covid 19 sehingga mereka mematuhi protokol kesehatan saat datang ke TPS seperti menggunakan masker, tertib menunggu antrian, dan menjaga jarak. Setelah mengunjungi 3 TPS forkopimda melanjutkan kunjungannya di lapas kelas IIB yang termasuk TPS Khusus. Dikatakan khusus karena pengambilan suara dilakuakn dengan cara keliling, petugas TPS setempat berkeliling mengambil suara dari penghuni lapas yang memiliki hak suara. Petugas TPS menggunakan APD lengkap karena di lapas tersebut termasuk kawasan rawan paparan covid-19 dan penghuni lapas ada yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun mereka tetap bisa menyalurkan suaranya.

120. Jawa Pos, 11/12/2020, SIAP-SIAP REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengatakan KPU menjadwalkan rekapitulasi suara tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020. Seluruh logistik yang berupa surat suara hasil pemungutan dan kotak suara sudah didistribusikan ke Kantor Kecamatan masing masing. Jika tidak ada kendala rekapitulasi akan dilaksanakan secara serentak di tiga kecamatan yaitu kecamatan Sananwetan, dan Kepanjenkidul, dan Sukorejo. Rencananya rekapitulasi akan dilaksanakan selama 4 hari, kemudian dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kota yang dijadwalkan pada tanggal 13-17 Desember 2020. Selanjutnya hasil akhir akan di laksanakan rapat pleno untuk mengetahui siapa yang mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada Kota Blitar 2020. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis, Hernawan Miftakhul Habib mengatakan untuk tingkat partisipasi

masyarakat dalam Pilwali 9 Desember 2020 kemarin belum diketahui. Jika dilihat dari versi perhitungan cepat yang dilakukan oleh tim pemenangan itu bukan menjadi dasar KPU dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Namun dirinya yakin dalam Pilwali ini partisipasi masyarakat mencapai target yang ditentukan yaitu 80 persen.

#### 121. Jawa Pos, Koran Memo 12/12/2020, RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERSETUJUAN ATAS DUA RAPERDA USUL INISIATIF DPRD KOTA BLITAR

DPRD Kota Blitar kembali menggelar rapat paripurna pada 11 Desember 2020 dengan agenda penetapan persetujuan bersama atas 2 Rancangan peraturan daerah ( raperda) usul inisiatif DPRD Kota Blitar tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan dan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Rapat ini dihadiri oleh ketua DPRD kota Blitar Syahrul Alim beserta wakilnya Agus Zunaedi, Walikota Blitar Santoso, Sekda Kota Blitar Rudy Wijonarko, Forkopimda dan dan sejumlah kepala OPD. Ketua bapemperda DPRD Kota Blitar Dedik hendarwanto mengatakan 2 raperda itu merupakan inisiatif dari DPRD kota Blitar, menurutnya dua raperda ini dipandang perlu sebagai bentuk pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran sekaligus guna meningkatkan kesejahteraan kaum lanjut usia di Kota Blitar. Tujuan dari dua raperda usulan kreatif untuk meningkatkan pelayanan kaum lansia di seluruh fasilitas yang ada di kota Blitar. Selain itu juga untuk meningkatkan item dan unit dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dapat meningkatkan keamanan dan keamanan warga Kota Blitar secara menyeluruh.

#### 122. Jawa Pos, 16/12/2020, ADA KESALAHAN INPUT DATA PEMILIH

Pada tanggal 15 Desember 2020 KPU Kota Blitar melakukan rekapitulasi Pilwali Blitar 2020 dan akhirnya Paslon nomor urut 2 Santoso-Tjujuk unggul dengan suara sebanyak 50.258. Namun ada catatan dari Bawaslu Kota Blitar terkait input data pemilih yang selisih kelebihan satu. "Tetapi itu tidak merubah hasil suara dari Paslon" jelas Choirul Umam Ketua KPU Kota Blitar. Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan karena ini akan menjadi bahan evaluasi Bawaslu untuk penyelenggraan Pemilu selanjutnya. Menurutnya, selama proses rekapitulasi berlangsung mulai tingkat TPS, Kecamatan hingga kota tidak ada kendala berarti, misalnya misalnya protes terkait hasil suara dan sebagainya. Namun ada masalah administrasi yang dipertanyakan salah satu tim Paslon terkait segel kotak suara yang dobel. Perihal kelekatan segel yang tidak sama itu dikarenakan segel pertama kurang melekat, akhirnya ditambahi segel

lagi. Setelah rapat rekapitulasi akan dilakukan lagi rapat pleno penetapan paslon terpilih.

### 123. Koran Memo, 17/12/2020, DUKUNG TNI – POLRI TINDAK TEGAS OKNUM RADIKALISME

Para tokoh agama terus mendukung TNI – Polri untuk menindak tegas oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama, ini adalah salah satu wujud penolakan terhadap model dakwah yang dilakukan oknum dengan cara menyampaikan ujaran kebencian kepada masyarakat. KH. Subakir Ketua MUI Kota Blitar menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum maka dari itu setiap orang harus patuh patuh pada hukum. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak ikut berspekulasi tentang proses hukuman yang sedang dijalani Habib Rizieq Shihab. Ketua Forum Umat Beragama, Abdul Basyid mengatakan masyarakat harus tetap menjaga stabilitas keamanan negara dengan tidak mencontoh oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama. Kapolres Blitar Kota juga mengucapkan terimakasih Kepada tokoh agama mapapun ulama yang mendukung langkah TNI-Polri dalam menindak tegas oknum Radikalisme.

### 124. Harian Bangsa, Koran Memo, Jawa Pos, Memo X, 24/11/2020 PENGAJUAN IMB TOWER DIDUGA DIMANIPULASI

Warga kembali melakukan aksi unjuk rasa memprotes soal izin mendirikan bangunan tower di Jl. Melati Gang 2 Kepanjen Kidul Kota Blitar. Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena setelah audiensi sebelumnya bersama Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak menemukan jalan keluar. Massa sebanyak 50 orang melakukan unjuk rasa di dua tempat yaitu di Kantor DPRD Kota Blitar dan Kantor Pemkot Blitar. Koordinator Lapangan, Jaka Prasetya mengatakan adanya manipulasi yang dilakukan dari pihak pemohon serta tidak adanya verifikasi lapangan yang dilakukan oleh KPTSP sehingga terjadi kesalahan yang terkesan dibiarkan. Selesai berorasi di depan kantor pemkot, massa ditemui oleh Sekda Kota Blitar Rudy Widjonarko dengan mengatakan akan segera menyampaikan tuntutan massa kepada Pjs Wali Kota Blitar. Jumat pekan lalu saat melakukan unjuk rasa di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pelayanan Terpadu Satu Pintu warga meminta untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower seluler dilingkungan mereka karena pengajuan permohonan IMB pendirian tower dinilai sarat rekayasa. Sedangkan unjuk rasa yang dilakukan di Kantor DPRD Kota Blitar ditemui oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan secepatnya akan mencari solusi dari kasus pendirian tower.

## **BAB 5**

### **REVIEW DOKUMEN**

#### **5.1. Aspek Kebebasan Sipil**

Secara teoritis, konsep civil liberty berkaitan dengan apa yang disebut dengan free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest (Bealey, 2000:56). Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari civil liberty, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi, antara lain, kebebasan untuk mengemukakan pendapat (free speech), kebebasan press (free press), kebebasan untuk berserikat (assembly), dan kebebasan untuk berkeyakinan/ beribadah (worship) (Bealey, 2000:56).

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan supreme coercive authority. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "tyranny of the majority". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil (Bealey, 2000:57).

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (Civil Liberty) tersebut telah diturunkan kedalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat;
- 2) Kebebasan Berpendapat;
- 3) Kebebasan Berkeyakinan;
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama.

#### **5.1.1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat**

- a. Indikator 1: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.



Hasil penelusuran dokumen dan berita media, pada tahun 2020 tidak ditemukan ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat yang menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul di Kota Blitar.

- b. Indikator 2: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

Selama tahun 2020, tidak ada kelompok masyarakat di Kota Blitar yang melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan sehingga kelompok masyarakat lain menjadi tidak bebas berkumpul dan berserikat. Demikian juga, di Kota Blitar tidak ada pembubaran terhadap organisasi atau kegiatan berkumpulnya masyarakat.

### **5.1.2 Kebebasan Berpendapat**

- a. Indikator 3: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

Selama tahun 2020, tidak ada tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang menghambat masyarakat untuk bebas menyatakan pendapat.

- b. Indikator 4: Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

Kejadian seperti yang disebutkan dalam indikator 4, tidak terjadi di Kota Blitar.

### **5.1.3. Kebebasan Berkeyakinan**

- a. Indikator 5: Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya.

Pada tahun 2020, tidak ada temuan dan catatan di Kota Blitar tentang keberadaan aturan tertulis yang membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan agama.

- b. Indikator 6: Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ajaran agama.

Selama tahun 2020, tidak ada temuan dan catatan di Kota Blitar tentang tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan agama.

- c. Indikator 7: Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

Berdasarkan penelusuran dari pihak-pihak terkait, selama 2020 tidak ada tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat terhadap kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

#### 5.1.4. Kebebasan dari Diskriminasi

- a. Indikator 8: Aturan tertulis diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

Hasil penelusuran dari berbagai lembaga penegakan hukum dan penyedia dokumen hukum, tidak ada satupun aturan tertulis yang bersifat diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

- b. Indikator 9: Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya

Berdasarkan penelusuran dari pihak-pihak terkait, selama tahun 2020, tidak terdapat Tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya di Kota Blitar.

- c. Indikator 10: Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya

Selama tahun 2020, di Kota Blitar, tidak ada ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya.

## 5.2. Aspek Hak-Hak Politik

Bollen (1993) menulis, bahwa "political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives." Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa political rights mencakup partisipasi dan kompetisi.

Mengingat pentingnya aspek hak politik (political rights) ini, maka Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Pada konteks penyusunan IDI, aspek political rights ini kemudian telah diturunkan kedalam 2 (dua) variabel utama, yaitu: 1) Hak memilih dan dipilih; 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan.

### 5.2.1. Hak Memilih dan Dipilih

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (citizen's rights) atau hak-hak constitutional warga Negara (the citizen's constitutional rights) dapat terlaksana.

Hak-hak warga negara (citizen's rights) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

a. Indikator 11: Hak memilih atau dipilih dihambat

Secara umum, di Kota Blitar tidak ditemukan hak memilih dan dipilih yang dihambat.

Hasil konfirmasi dengan stakeholder terkait dalam acara FGD (Focus Group Discussion) dan berita media menunjukkan bahwa secara umum tidak ditemukan hak memilih dan dipilih yang dihambat, baik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kota Blitar tahun 2020.

b. Indikator 12: Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

Fasilitas untuk penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih, baik pada Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020 telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Indikator 13: Kualitas Daftar Pemilih Tetap

Mengikuti tahapan-tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Blitar telah memadai. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri ke KPU pada tanggal 17 Desember 2017;
- 2) Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 17 Mei 2018;
- 3) Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada tanggal 22 Juli 2018;
- 4) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat KPU RI pada tanggal 8-10 September 2018;
- 5) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan pada tanggal 28 Agustus-18 Maret 2019;
- 6) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) pada tanggal 14-16 Agustus 2018.

Adapun tahapan Pilkada serentak 2020 terbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5 tahun 2020 adalah sebagai berikut: Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPI dan penyampaian kepada PPS (15 Juni-14 Juli 2020);
2. Pencocokan dan penelitian (15 Juli-13 Agustus 2020);
3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS (7 Agustus-29 Agustus 2020);
4. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada PPK (30 Agustus-1 September 2020);
5. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan penyempaiannya kepada KPU kabupaten/kota (2-4 September 2020);
6. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS (5-14 September 2020);
7. Rekapitulasi DPS tingkat provinsi (15-16 September 2020);
8. Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS (14-18 September 2020);
9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS (19-28 September 2020);
10. Perbaikan DPS oleh PPS (29 September-3 Oktober 2020);
11. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK (4-6 Oktober 2020);

12. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota (7-9 Oktober 2020);
13. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT (9-16 Oktober 2020);
14. Penyampaian DPT kepada PPS (17-26 Oktober 2020);
15. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi (17-18 Oktober 2020);
16. Pengumuman DPT oleh PPS (28 Oktober-6 Desember 2020).

#### Tahapan Pendaftaran Paslon

1. Pengumuman pendaftaran Paslon (28 Agustus-3 September 2020);
2. Pendaftaran Paslon (4-6 September 2020);
3. Verifikasi syarat pencalonan (4-6 September 2020);
4. Pengumuman dokumen Paslon dan dokumen calon (4-8 September 2020);
5. Tanggapan dan masukan masyarakat (4-8 September 2020);
6. Pemeriksaan kesehatan (4-11 September 2020);
7. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (11-12 September 2020);
8. Verifikasi syarat calon (6-12 September 2020);
9. Pemberitahuan hasil verifikasi (13-14 September 2020);
10. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon (14-22 September 2020);
11. Penyerahan perbaikan syarat calon (14-16 September 2020);
12. Verifikasi perbaikan syarat calon (16-22 September 2020);
13. Penetapan Paslon (23 September 2020);
14. Pengundian nomor urut calon (24 September 2020).

#### Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (9 Desember 2020);
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS (9 Desember 2020);
3. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9-11 Desember 2020);
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK (10-14 Desember 2020);
5. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota (10-16 Desember 2020);
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota (13-17 Desember 2020) - Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota.

d. Indikator 14: Voters Turnout

Tingkat partisipasi pemilih di kota Blitar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 tinggi, yakni 83,7 %. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 sebesar 97.133 pemilih dari total Data Pemilih Tetap (DPT) sebesar 113.544 (Sumber KPUD Kota Blitar : Model DB1 Pemilihan DPRD Kota Blitar, 2019). Hanya 16,3 % masyarakat di Kota Blitar yang tidak menggunakan hak pilih atau golput.

Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Blitar sebesar 90.908 pemilih dari total DPT sebesar 115.365. Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Blitar tahun 2020 sebesar 78,8 % (Keputusan KPU Kota Blitar No 275 Tahun 2020).

e. Indikator 15: Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Blitar

Jumlah Perempuan terpilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Blitar sebanyak 3 dari 25 anggota DPRD atau 12 %. Adapun anggota dewan perempuan tersebut berasal dari 1 orang anggota dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) sebanyak 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

### 5.2.2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan

a. Indikator 16: Demonstrasi / Mogok yang bersifat kekerasan

Sepanjang tahun 2020, di Kota Blitar tidak terjadi demonstrasi atau mogok yang berujung pada kekerasan. Hal ini telah dikonfirmasi dengan berita media dan hasil FGD (Focus Group Discussion ke 1 dan ke 2).

b. Indikator 17: Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan

Dapat dilihat dalam review media banyaknya unjuk rasa yang dilakukan secara damai, dalam setahun tercatat hanya sekali unjuk rasa yang berujung pada keributan. Menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar sangat aspiratif dan memiliki toleransi yang tinggi. Sehingga mengedepankan dialog dalam mencapai solusi dari permasalahan yang ada.

Pada tahun 2020, tim POKJA IDI dan tim Skoring IDI Kota Blitar telah menyepakati menggunakan sumber data pengaduan masyarakat dari Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat di laman: <https://ulpim.blitarkota.go.id/> dan temuan dari berita.

Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) adalah sebuah unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sebagai sub-sistem dari Komisi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Blitar yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengelola pengaduan berupa masukan, kritik, saran dan informasi dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju pemerintahan yang lebih baik.

Selain bertujuan untuk menciptakan mekanisme check and balance secara efektif, seimbang dan proporsional di dalam pemberian layanan publik, ULPIM sekaligus juga memberikan informasi yang diperlukan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum agar terwujud keseimbangan arus informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Blitar.

Pada tahun 2020, terdapat 14 pengaduan yang menjadi berita dan 85 pengaduan masyarakat Kota Blitar yang disampaikan melalui laman <https://ulpim.blitarkota.go.id/> mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

### **5.3. Aspek Lembaga Demokrasi**

Kendati kata "lembaga" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, lembaga demokrasi didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah (Bealye, 2000: 166). Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka lembaga demokrasi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka lembaga demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur"—meliputi, antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur"—seperti misalnya, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, press, dan kelompok kepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari lembaga demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek lembaga demokrasi telah dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 3) Peran Partai Politik, dan
- 4) Peradilan yang Independen.



### 5.3.1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil di Kota Blitar

Setelah era Reformasi, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahun 1999, Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan pertama pasca era reformasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Sehingga sampai dengan saat ini, pemilihan umum di Kota Blitar telah dilakukan selama 5 (lima) kali, yakni Pada Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Secara umum pelaksanaan Pemilihan umum di Kota Blitar berlangsung secara kondusif, bebas dan adil. Berikut terlampir hasil Pemilu Legislatif masing-masing Dapil di Kota Blitar pada Tahun 2019.

**Tabel 2:** Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2019

(Dapil 1: Kecamatan Kepanjen Kidul)

<b>Nama Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>%</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	3.206	12,1
Partai Gerakan Indonesia Raya	1,607	6,1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.077	45,5
Partai Golongan Karya	2.633	9,9
Partai Nasional Demokrat	454	1,7
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	36	0,1
Partai Berkarya	193	0,7
Partai Keadilan Sejahtera	1.244	4,7
Partai Persatuan Indonesia	114	0,4
Partai Persatuan Pembangunan	2.637	9,9
Partai Solidaritas Indonesia	420	1,6
Partai Amanat Nasional	632	2,4
Partai Hati Nurani Rakyat	124	0,5
Partai Demokrat	1,116	4,2

Partai Bulan Bintang	35	0,1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	18	0,1
<b>JUMLAH</b>	<b>26.546</b>	<b>100,0</b>

Sumber: KPUD Kota Blitar

Perolehan suara di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Kepanjen Kidul dimenangkan oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara sebanyak 45,5 %. Urutan kedua, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 12,1 % suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menduduki peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebesar 9,9%.

**Tabel 3:** Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019

(Dapil 2 Kecamatan Sanan Wetan)

<b>Nama Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>%</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	3.942	11,8
Partai Gerakan Indonesia Raya	1.668	5,0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.036	30,0
Partai Golongan Karya	4.864	14,6
Partai Nasional Demokrat	255	0,8
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	48	0,1
Partai Berkarya	162	0,5
Partai Keadilan Sejahtera	1.783	5,3
Partai Persatuan Indonesia	253	0,8
Partai Persatuan Pembangunan	3.081	9,2
Partai Solidaritas Indonesia	370	1,1
Partai Amanat Nasional	1.657	5,0
Partai Hati Nurani Rakyat	3.227	9,7
Partai Demokrat	1.988	6,0
Partai Bulan Bintang	44	0,1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27	0,1
<b>JUMLAH</b>	<b>33.405</b>	<b>100,0</b>

Sumber: KPUD Kota Blitar

Di Daerah Pemilihan 2 yakni Kecamatan Sanan Wetan, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) juga memperoleh suara terbanyak dengan perolehan

suara sebesar 30 %. Urutan kedua ditempati oleh Partai Golongan Karya dengan perolehan sebesar 14,6 %. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 11,8 %.

**Tabel 4:** Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2014  
(Dapil 3 Kecamatan Sukorejo)

<b>Nama Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>%</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	4.846	15,4
Partai Gerakan Indonesia Raya	6.152	19,5
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.851	31,2
Partai Golongan Karya	1.379	4,4
Partai Nasional Demokrat	806	2,6
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	87	0,3
Partai Berkarya	81	0,3
Partai Keadilan Sejahtera	1.136	3,6
Partai Persatuan Indonesia	154	0,5
Partai Persatuan Pembangunan	3.460	11,0
Partai Solidaritas Indonesia	333	1,1
Partai Amanat Nasional	92	0,3
Partai Hati Nurani Rakyat	106	0,3
Partai Demokrat	2.967	9,4
Partai Bulan Bintang	58	0,2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	17	0,1
<b>JUMLAH</b>	<b>31.525</b>	<b>100,0</b>

Sumber: KPUD Kota Blitar

Demikian juga di Daerah Pemilihan 3 yakni Kecamatan Sukorejo, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) telah memenangkan Pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 31,2 %. Disusul oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan sebanyak 19,5 %. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebanyak 15,4 %. Berikut rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Blitar dalam Pemilu 2019.

**Tabel 5:** Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Blitar Tahun 2019

<b>Nama Partai</b>	<b>DAPIL 1</b>	<b>DAPIL 2</b>	<b>DAPIL 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
PKB	3.206	3.942	4.846	11.994	13,1
Partai GERINDRA	1,607	1.668	6.152	9.427	10,3
PDIP	12.077	10.036	9.851	31.964	34,9
Partai GOLKAR	2.633	4.864	1.379	8.876	9,7
Partai NASDEM	454	255	806	1.515	1,7
Partai GARUDA	36	48	87	171	0,2
Partai BERKARYA	193	162	81	436	0,5
PKS	1.244	1.783	1.136	4.163	4,6
Partai PERINDO	114	253	154	521	0,6
PPP	2.637	3.081	3.460	9.178	10,0
PSI	420	370	333	1.123	1,2
PAN	632	1.657	92	2.381	2,6
Partai HANURA	124	3.227	106	3.457	3,8
Partai DEMOKRAT	1,116	1.988	2.967	6.071	6,6
PBB	35	44	58	137	0,1
PKPI	18	27	17	62	0,1
<b>JUMLAH</b>	<b>26.546</b>	<b>33.405</b>	<b>31.525</b>	<b>91.476</b>	<b>100,0</b>

Sumber: KPUD Kota Blitar

Dari data ketiga dapil tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) menempati urutan pertama perolehan suara tingkat Kota Blitar dengan 34,9 %. Urutan kedua ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 13,1 % dan urutan ketiga dipegang oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 10,3 %.

Pada tahun 2020, di Kota Blitar juga diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seretak se Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020. Pilkada Kota Blitar tahun 2020 diikuti oleh 2 calon, yakni Calon Pasangan Nomor urut 1 : Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, SE.; Drs. H. Santoso , M.Pd dan Ir. H. Tjujuk Sunario, MM.

Pemungutan suara Pilkada ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan hasil rekapitulasi penghitungan suaranya sebagai berikut:

<b>Nama pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan</b>
Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, SE.	37.362
Drs. H. Santoso , M.Pd dan Ir. H. Tjujuk Sunario, MM.	50.258
<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>87.620</b>

Sumber: Keputusan KPUD Kota Blitar Nomor 275 Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pasangan calon Drs. H. Santoso , M.Pd dan Ir. H. Tjujuk Sunario, MM telah memenangkan Pilkada Kota Blitar tahun 2020 dengan memperoleh 50.258 suara atau 57,4 %, mengalahkan pasangan calon Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, SE., yang memperoleh 37.362 suara atau 42,6 %. Sehingga pasangan Drs. H. Santoso , M.Pd dan Ir. H. Tjujuk Sunario, MM., menjadi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode 2021-2024.

a. Indikator 18: Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu

Secara umum KPUD Kota Blitar telah melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya tahapan pemilu Tahun 2019 dengan baik. Dalam Pemilu 2019, KPUD Kota Blitar telah menjadi pihak penyelenggara Pemilu yang netral, hal ini dibuktikan bahwa tidak ada kasus yang ditemukan di media dan di FGD tentang keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

KPU RI telah menetapkan tahapan Pemilu tahun 2019 melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara lengkap seperti dikutip dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id>, pada hari Rabu (28/2/2018).

<b>Tanggal</b>	<b>Tahapan</b>
17 Agustus 2017-31 Maret 2019	Perencanaan Program Dan Anggaran
1 Agustus 2017-28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017-14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017-20 Februari 2018	Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018-17 April 2019	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari-21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara

17 Desember 2018-18 Maret 2019	Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018-17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017-6 April 2018	Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018-21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden
20 September 2018-16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden
24 September-16 April 2019	Logistik
23 September 2018-13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden
22 September 2018-2 Mei 2019	Laporan Dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019-16 April 2019	Masa Tenang
8 April 2019-17 April 2019	Pemungutan Dan Penghitungan Suara
18 April 2019-22 Mei 2019	Rekapitulasi Penghitungan Suara
23 Mei 2019-15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
Juli-September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus-Oktober 2019	Pengucapan Sumpah/Janji

Demikian juga dengan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 juga telah terlaksana dengan baik, walaupun pelaksanaannya diundur dari 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 karena pandemi Covid 19 yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### b. Indikator 19: Kecurangan Dalam Penghitungan Suara

Tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Blitar. Hal ini dibuktikan dengan Form Model DB-2 PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI

DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU 2019. Semua saksi dari 16 Partai Politik di Kota Blitar menyatakan NIHIL.

Demikian juga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020, tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara.

### 5.3.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar hasil pemilu 2019 sebanyak 25 orang dan didominasi oleh anggota dari PDI-P yaitu sebanyak 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB sebanyak 4 orang. Posisi ke 3 ditempati PPP dengan 3 kursi. Partai Golkar, Partai Demokrat dan Gerindra masing masing menempatkan 2 Anggota Legislatif di DPRD Kota Blitar. Partai di Kota Blitar yang memperoleh 1 kursi di DPRD Kota Blitar yakni, PKS dan Hanura. Berikut tabel Komposisi Anggota DPRD Kota Blitar Periode 2019–2024.

**Tabel 6:** Komposisi Anggota DPRD Kota Blitar 2014–2019

<b>Nama Partai</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD</b>
PDI Perjuangan	10 orang
PKB	4 orang
PPP	3 orang
Partai Gerindra	2 orang
Partai Demokrat	2 orang
Partai Golkar	2 orang
PKS	1 orang
Hanura	1 orang

Sumber: KPUD Kota Blitar

Dari tabel tersebut dalam dijelaskan bahwa Partai Demokrasi Perjuangan menempatkan anggota legislatif terbanyak di Kota Blitar, yakni 10 kursi. Disusul urutan ke 2 ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 4 kursi. Partai Persatuan Pembangunan menempati urutan ke 3 dengan perolehan sebanyak 3 kursi di DPRD Kota Blitar. Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Demokrta masing-masing memperoleh 2 kursi. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura masing-masing memperoleh 1 kursi. Partai Nasdem yang sebelumnya pada Pemilu 2014 mendapatkan 1 kursi, pada Pemilu 2019 ini tidak lagi mendapatkan kursi di DPRD Kota Blitar.

a. Indikator 20: Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Lampiran 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020 menyebutkan bahwa Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan pada tahun sebesar Rp227.016.220.871 atau 23% dari Total Anggaran Belanja sebesar Rp983,726,832,863. Prosentase sebesar 23% tersebut telah melampaui amanat Undang-Undang yang mengharuskan sebesar 20% dari APBD. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Sedangkan alokasi Anggaran Urusan Kesehatan dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp218.207.546.167 atau 22% dari Total Anggaran Belanja sebesar Rp983,726,832,863. Angka prosentase sebesar 22% tersebut juga telah melampaui amanat dalam Undang Kesehatan yang mewajibkan alokasi sebesar 10% dari APBD untuk bidang kesehatan. Undang Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada pasal 171 ayat (2) berbunyi: "Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji."

b. Indikator 21: Perda yang merupakan inisiatif DPRD

DPRD Kota Blitar memiliki peran penting dalam proses pemerintahan di Kota Blitar, terutama fungsi kontrol terhadap pemerintah Kota Blitar, Penganggaran dan Penetapan Regulasi (Peraturan Daerah) Kota Blitar. Pada periode 2019-2020 ini, Pimpinan DPRD Kota Blitar terdiri dari :

Ketua : Syahrul Alim (PDIP)

Wakil Ketua : Yasin Hermanto (PKB)

Wakil Ketua : Agus Zunaedi (PPP)

Pada tahun 2020, DPRD Kota Blitar telah menghasilkan 2 Peraturan Daerah (Perda) atas inisiatif dari DPRD Kota Blitar dari total 5 Perda yang dihasilkan di tahun 2020, yakni:

- i. Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- ii. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran



c. Indikator 22: Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Pada tahun 2020, terdapat 6 (enam) rekomendasi DPRD Kota Blitar kepada Walikota Blitar, yakni :

1. Rekomendasi Tentang Pemasangan Fiber (No. 001/R. Pim/I/2020 tanggal 2 Januari 2020);
2. Rekomendasi Tentang Cafe Karaoke (No. 174/60/410.040.3/2020 tanggal 26 Februari 2020);
3. Rekomendasi Tentang Tender Tenaga Outsourcing (No. 174/89/410.040.3/2020 Tanggal 1 April 2021);
4. Rekomendasi tentang Pembangunan Stand Lapangan Pakunden (No. 174/100/410.040.3/2020 Tanggal 20 April 2020);
5. Rekomendasi tentang Perkembangan COvid 19 (No. 174/101/410.040.3/2020 Tanggal 21 April 2020);
6. Rekomendasi tentang Penanganan Covid 19 (No. 174/356/410.040.3/2020 Tanggal 11 Desember 2020) (Sumber: Setwan DPRD Kota Blitar, 2021).

### 5.3.3. Peran Partai Politik di Kota Blitar

Sebagai institusi demokrasi, partai politik di kota Blitar berperan penting dalam proses pendidikan politik serta sosialisasi politik, yang tentunya sangat bersinegi dengan upaya demokratisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Pemilu 2019, di Kota Blitar terdapat 16 (enam belas) Partai Politik yang mengikuti Pemilu 2019, yakni: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dari 16 (enam belas) Partai Politik tersebut, pada tahun 2020, Pemerintah Kota Blitar telah mengalokasikan Bantuan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang semuanya dialokasikan untuk kegiatan kaderisasi.

Terdapat 8 (delapan) Partai Politik di Kota Blitar yang memperoleh kursi DPRD sehingga mendapat bantuan Parpol dari Pemerintah Kota Blitar, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

a. Indikator 23: Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu

Kegiatan Kaderisasi Partai Politik di Blitar berjalan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh alokasi dana bantuan Partai Politik di Kota Blitar yang mensyaratkan penggunaan dananya untuk pendidikan politik dan kaderisasi Partai Politik.

Dana bantuan politik tersebut selayaknya dialokasikan untuk kegiatan kaderisasi parpol dengan menyampaikan laporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik dan diserahkan kepada Bakesbangpol. Laporan kegiatan kaderisasi parpol harus disampaikan dalam dua bentuk: cetak dan soft-copy (file). Bentuk laporan cetak berupa bendelan yang dijilid dengan memiliki sampul yang berjudul "kaderisasi" atau "pelatihan kader," dengan melampirkan notulen, foto kegiatan, materi-materi pelatihan dan pelaporan keuangan. Sedangkan laporan berupa file, berisi ketentuan yang sama. Hal ini memudahkan bagi tim POKJA IDI dan tim Skoring IDI untuk menemukan data-datanya.

Pada Tahun 2020, terdapat 27 kegiatan kaderisasi Partai Politik yang terdiri dari 1 kegiatan dari PPP, 6 kegiatan dari PKB, 7 kegiatan dari Partai HANURA, dan 13 kegiatan kaderisasi Partai dari PDIP. (Sumber: Data Bakesbangpol Kota Blitar, 2021)

b. Indikator 24: Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Secara umum, persentase perempuan yang menjadi pengurus partai politik di Kota Blitar sebesar 37,5%, melebihi kuota pengurus perempuan sebesar 37%. Dari keseluruhan partai politik yang ada di Kota Blitar, PAN menempati urutan terbesar yakni 46,7%. Hanya PDIP yang pengurus perempuannya kurang dari 30%. Berikut data pengurus Partai Politik:

**Tabel 7:** Komposisi Pengurus Perempuan pada Partai-partai Politik di Kota Blitar Tahun 2019

NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PENGURUS	PEREMPUAN	
		Jumlah	%
PARTAI NASDEM	22	7	31,8
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16	5	31,3

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12	4	33,3
PDI PERJUANGAN (PDIP)	14	4	28,6
PARTAI GOLONGAN KARYA	63	27	42,9
PARTAI GERINDRA	17	6	35,3
PARTAI DEMOKRAT	15	6	40,0
PARTAI AMANAT NASIONAL	30	14	46,7
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27	9	33,3
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	12	5	41,7
PARTAI BULAN BINTANG	6	2	33,3
PKPI	16	5	31,3
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	1	33,3
PARTAI BERKARYA	11	4	36,4
PARTAI RAKYAT	3	1	33,3
<b>JUMLAH</b>	<b>267</b>	<b>100</b>	<b>37,5</b>

Sumber : KPU Kota Blitar Tahun 2020 (diolah)

#### 5.3.4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

- a. Indikator 25: Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN

Pada tahun 2020 terdapat 3 kebijakan pejabat pemerintah Kota Blitar yang digugat di PTUN dan dinyatakan bersalah, yakni:

1. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara: 69/G/2020/PTUN.SBY, yang Menyatakan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur bernomor 303/Pbt-HM No.2188/Kel. Sentul/2019. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2188/Kel. Sentul SU Tgl. 21-04-2003. No.00030/Sentul/2003 Luas 4.374 M<sup>2</sup> a/n SUSILO PRABOWO Terhadap tanah terletak di Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kab. Blitar. tertanggal 18 September 2019 adalah Tidak Syah dan harus dibatalkan.
2. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara: 77/G/2020/PTUN.SBY yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Blitar, Nomor: 188/437/HK/410.010.2/2019, tertanggal 27 Desember 2019, Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Penghentian Sementara Kegiatan dan Tempat Usaha Hiburan Karaoke Brilliant Kafe Live Music;

3. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara: 154/G/2020/PTUN.SBY, yang menyatakan Batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Blitar tanggal 20 Agustus 2020 dalam bentuk Formulir MODEL BA.7 – KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) Tahun 2020 Tentang: REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA MASA PERBAIKAN tanggal 20 Agustus tahun 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat gagal/tidak lolos sehingga tidak bisa mendaftar sebagai pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada Pilkada Serentak tahun 2020 .

b. Indikator 26: Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah

Proses transparansi informasi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal 14, yang berbunyi: "Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

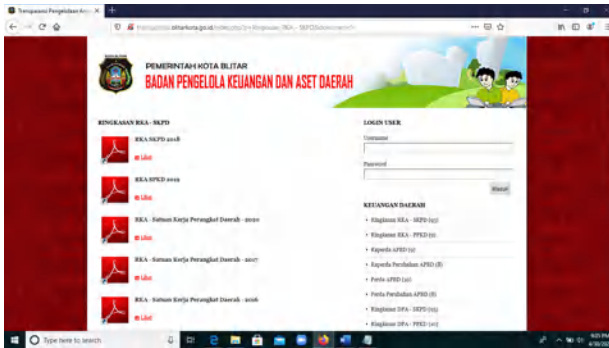
- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;

- i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.”

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Blitar memenuhi tanggung jawabnya untuk secara konsisten mengunggah informasi APBD dilaman yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran daerah.

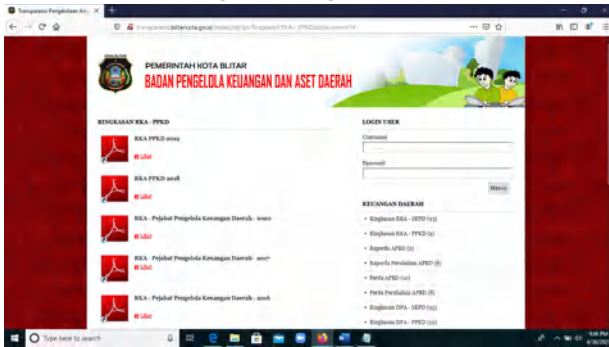
Sebagaimana disyaratkan dalam penghitungan skor Indeks Demokrasi Indonesia, wajib mengunggah 12 poin dari 16 poin yang ada dalam tampilan laman web BPKAD. Ketentuan yang harus dipatuhi adalah poin 1 hingga poin 8, wajib diunggah sebelum bulan Desember pada tahun pengukuran IDI. Sedangkan poin 9 hingga poin 12, dapat diunggah setelah tahun pengukuran IDI. Misalnya pengukuran IDI kota Blitar berlangsung untuk tahun 2020, maka poin 1 hingga poin 8 wajib diunggah sebelum bulan Desember 2020. Sedangkan poin 9 hingga poin 12, dapat diunggah setelah bulan Desember 2020. Berikut bukti Indikator Keterbukaan Informasi Publik Poin 1 sampai dengan Poin 8 yang Wajib diunggah Dalam Laman Transparansi Kota Blitar Tahun 2019, dapat dilihat dalam gambar berikut.

Point pertama adalah Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2020, sebagaimana gambar berikut ini:



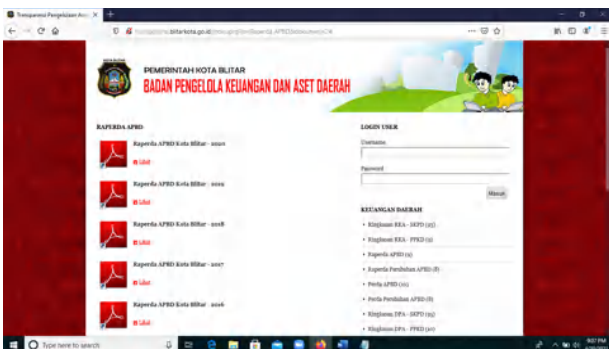
**Gambar 2:** Hasil Unggahan RKA SKPD Tahun 2020

Point kedua, RKA PPKD sebagaimana gambar berikut ini:



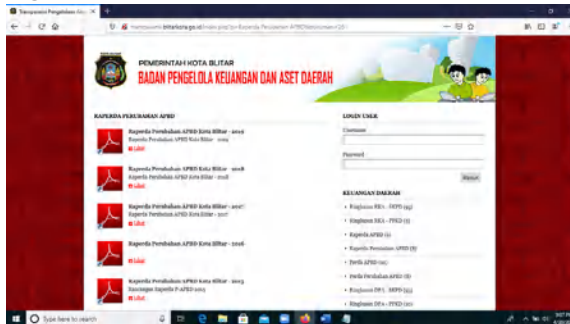
**Gambar 3:** Hasil Unggahan RKA PPKD Tahun 2020

Point ketiga adalah Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA ) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar 2020, sebagaimana gambar berikut:



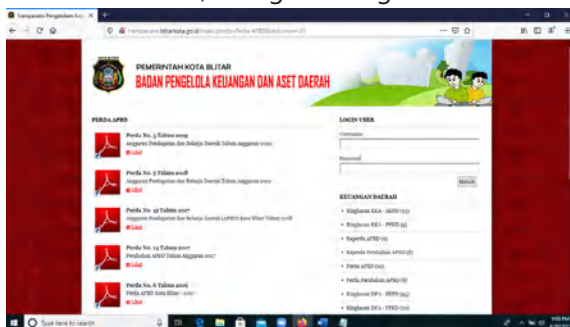
**Gambar 4:** Hasil Unggahan Raperda APBD Tahun 2020

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang PERUBAHAN APBD KOTA BLITAR TAHUN 2020 merupakan point ke 4 yang harus di upload, sebagaimana gambar berikut ini:



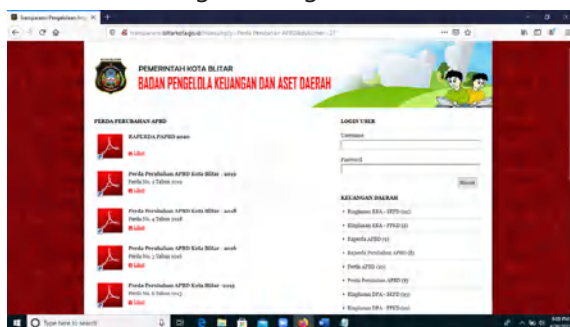
**Gambar 5:** Hasil Unggah Raperda Perubahan APBD Tahun 2020

Point ke 5 yang harus di upload adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Blitar Tahun 2020, sebagaimana gambar berikut ini:



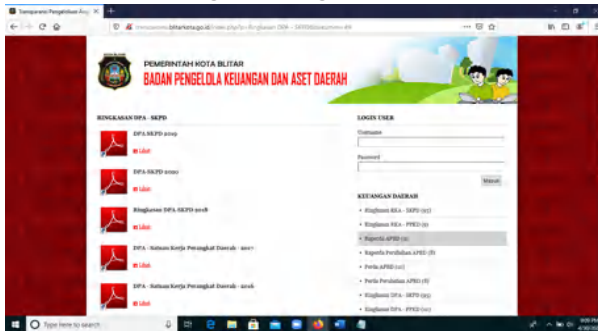
**Gambar 6:** Hasil Unggah Perda tentang APBD Kota Blitar Tahun 2020

Point ke 6 adalah Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2020, sebagaimana gambar berikut ini:



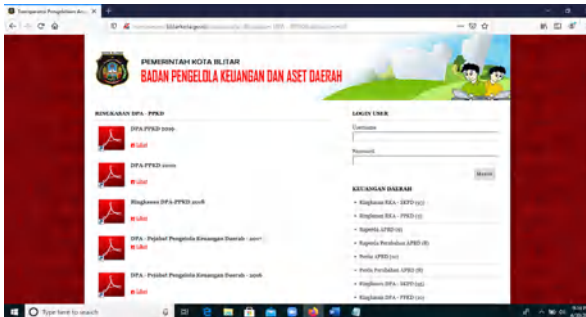
**Gambar 7:** Hasil Unggahan Perda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2020

Point ke 7 adalah Ringkasan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD Kota Blitar Tahun 2020, sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar 8:** Hasil Unggahan Daftar DPA SKPD Kota Blitar Tahun 2020

Point ke 8 yang harus diupload adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2020, sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar 9:** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2020

### 5.3.5. Peradilan yang Independen

#### a. Indikator 27: Keputusan hakim yang kontroversial

Sebagaimana hasil penelusuran data ke Pengadilan Negeri Kota Blitar, Polres Kota Blitar dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Blitar, tidak ditemukan kasus tentang keputusan hakim yang kontroversial. Demikian juga hasil dari pengumpulan data dari media massa selama tahun 2020, tidak ada proses pengadilan yang menghasilkan keputusan hakim yang kontroversial.

#### a. Indikator 28: Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Berdasarkan hasil penelusuran informasi dan pengumpulan data ke Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, LSM dan review media massa, tidak ditemukan kejadian tersebut di Kota Blitar.



## BAB 6

### HASIL PENGHITUNGAN SKOR IDI KOTA BLITAR TAHUN 2020

IDI Kota Blitar 2020 mencapai angka 86,31 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI Kota Blitar 2019 yang sebesar 82,98. Capaian kinerja demokrasi Kota Blitar tahun 2020 berada pada kategori "baik". Kategori ini sama dengan perolehan skor IDI untuk tahun 2019. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60).

Perubahan angka IDI Kota Blitar dari 2019-2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang mengalami kenaikan skor (dari 94,13 menjadi 100), (2) Hak-Hak Politik yang turun 1,38 poin (dari 72,23 menjadi 70,85), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 7,63 poin (dari 86,02 menjadi 93,65).

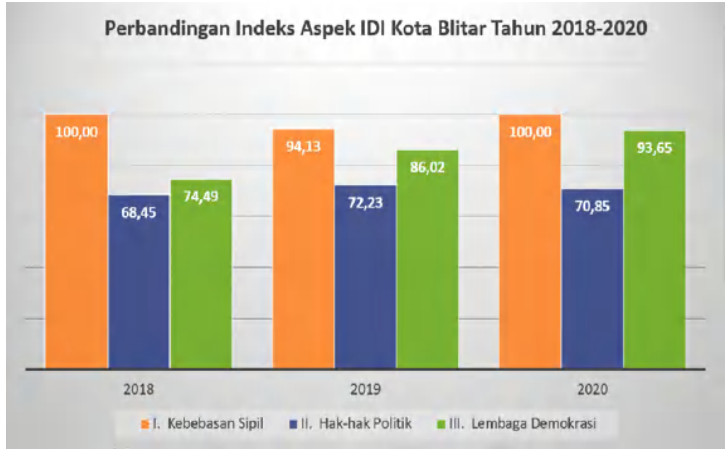
Penghitungan IDI Kota Blitar dari tahun 2020 merupakan hasil bersama dari seluruh unsur yang mendapatkan penilaian. IDI Kota Blitar merupakan skoring Indeks Demokrasi Indonesia yang pertama kali dilakukan oleh sebuah daerah tingkat II di Indonesia, karena belum ada yang melakukan. Kota Blitar membuktikan bahwa utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya bermanfaat di tingkat provinsi, melainkan bermanfaat juga di tingkat kota dan kabupaten di Indonesia. IDI menjadi potret atas kondisi demokrasi di Kota Blitar pada tahun penilaian dan menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan politik dan demokrasi pada tahun berikutnya.

Kenaikan angka IDI Kota Blitar adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Kota Blitar. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

#### 6.1. Perkembangan Indeks Aspek IDI

Angka IDI Kota Blitar 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 100; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 70,85; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 93,65.

Pada tahun 2020, aspek Kebebasan Sipil mengalami kenaikan sebesar 5,87 poin dibandingkan hasil pada tahun 2019. Aspek Hak-Hak Politik mengalami sedikit penurunan sebesar 1,38 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan 7,63 poin dibandingkan tahun 2019.



**Gambar 10:** Perkembangan Indeks Aspek IDI Kota Blitar, 2018-2020

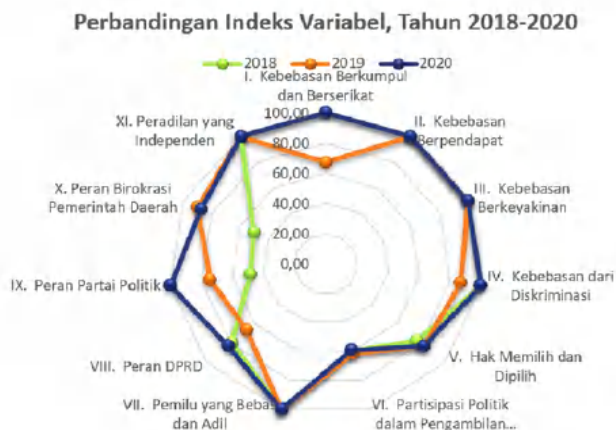
Sumber: Pokja IDI-Tim Assessment-Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, 2021

Serupa dengan tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2020 tidak ada indeks aspek yang berkategori “buruk”. Meskipun aspek Kebebasan Sipil mengalami kenaikan, aspek Hak-hak Politik di kota Blitar pada tahun 2020 masih berada pada kategori “sedang.” Sementara aspek Lembaga Demokrasi, kategorinya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan sejak tahun 2019 berada pada kategori “baik.”

## 6.2. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada tahun 2020 terdapat dua variabel yang mengalami penurunan indeks, empat variabel yang mengalami peningkatan, dan lima variabel lainnya tetap. Dua variabel yang mengalami penurunan adalah Kebebasan Berkumpul dan Berserikat sebesar 32,81 poin. Dua variabel yang mengalami penurunan adalah: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (turun 2,75 poin) dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (turun 2,41). Sedangkan variabel yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, sebesar 32,81 poin. Tiga variabel lain yang alami kenaikan adalah: kebebasan dari Diskriminasi (naik 13,03 poin), Peran DPRD (naik 15,78 poin), dan Peran Partai Politik (naik 25,71 poin).

Terdapat empat variabel yang masih memiliki poin 100, sama dengan tahun lalu, yaitu: Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peradilan yang Independen. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 11:** Perkembangan Indeks Variabel IDI Kota Blitar, 2018-2020

Sumber: Pokja IDI-Tim Assessment-Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, 2021

### 6.3. Perkembangan Skor Indikator IDI

Pada IDI kota Blitar 2019, dari 28 indikator terdapat 20 yang mencapai kinerja kategori "baik" (skor di atas 80), meliputi:

- a. Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- b. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- c. Indikator 3, Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- d. Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- e. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya
- f. Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ajaran agama
- g. Indikator 7, Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama,

- h. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- i. Indikator 9, Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- j. Indikator 10, Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok rentan lainnya,
- k. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih terhambat,
- l. Indikator 12, Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
- m. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- n. Indikator 14, Voters turn out
- o. Indikator 16, Demonstrasi/ Mogok yang Bersifat Kekerasan,
- p. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu,
- q. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara,
- r. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan,
- s. Indikator 21, Perda yang merupakan inisiatif DPRD,
- t. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu,
- u. Indikator 24, Perempuan pengurus partai politik,
- v. Indikator 25, Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN,
- w. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
- x. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial,
- y. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Meskipun demikian, masih terdapat kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2020. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 15, Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Blitar

- b. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- c. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif.

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Pemerintah perlu melakukan Pendidikan politik agar warga kota tidak segan mengadukan berbagai hal tentang penyelenggaraan pemerintah melalui berbagai saluran. Jika selama ini hanya mengandalkan data aduan dari Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat, sebuah unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Perlu dibuat sosialisasi lebih gencar tentang keberadaan ULPIM bagi masyarakat kota Blitar, melalui baliho, spanduk, iklan koran maupun iklan radio. Perlunya mempertimbangkan membuka saluran-saluran pengaduan masyarakat di website instansi pelayanan publik, seperti PDAM Kota Blitar, PLN Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo, Dinas Pendidikan Kota Blitar, dan lain lain.

Jumlah pengaduan berupa berupa masukan, kritik, saran dan informasi dari masyarakat dan mendapat penanganan cepat dari instansi terkait merupakan bukti terjadinya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Blitar.

Pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Blitar telah menunjukkan kontribusi dan kerjasamanya dalam upaya peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar. Sekretariat DPRD Kota Blitar meningkatkan kualitas tertib administrasi dengan melakukan pendokumentasian rekomendasi-rekomendasi legislatif kepada eksekutif dengan membuat pencatatan dan penomoran surat di bagian tata usaha. Sekretariat DPRD juga telah mendorong kinerja DPRD Kota Blitar menjadi lebih baik, dengan memastikan bahwa setiap rekomendasi dari alat kelengkapan DPRD harus diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis dan dicatatkan dengan penomoran surat.

Pada proses pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 ini, peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sangat menonjol untuk mendukung program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, dalam hal penyediaan data dan akses data ke berbagai instansi terkait pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.

#### **6.4. Penjelasan Teknis**

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur

pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Penghitungan IDI Kota Blitar mengacu pada metode pengukuran IDI Nasional dengan melakukan modifikasi pada obyek yang dinilai yaitu di daerah tingkat II. Pada beberapa indikator, nilai IDI Kota Blitar menggunakan hasil pengukuran tingkat provinsi karena tidak tersedianya data pembandingan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu pada indikator 11, 12, 13, 14, 18 dan 19.

**Tabel 8:** Komponen Penghitungan IDI Kota Blitar, 2017–2019

Aspek	Variabel	Indikator
<b>Kebebasan Sipil</b>	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
<b>Hak-Hak Politik</b>	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
<b>Lembaga Demokrasi</b>	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan media daring, serta dari dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh Pokja IDI Kota Blitar, diolah oleh Tim Assessment yang terdiri dari Bakesbangpol dan BPD Kota Blitar, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Blitar, dan diverifikasi oleh Tenaga Ahli IDI Provinsi Jawa Timur dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses: pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks variabel; dan ketiga, menghitung indeks aspek atau keseluruhan. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan

kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di Kota Blitar.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0–100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks=0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks=100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0–100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Hasil selengkapnya penghitungan keseluruhan indeks, sebagai berikut:

**Tabel 9:** Skor Aspek, Variabel dan Indikator IDI Kota Blitar, 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>	<b>80,34</b>	<b>82,98</b>	<b>86,31</b>
<b>ASPEK: I. KEBEBASAN SIPIL</b>	<b>100,00</b>	<b>94,13</b>	<b>100,00</b>
<b>Variabel: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat</b>	<b>100,00</b>	<b>67,19</b>	<b>100,00</b>
1. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	62,50	100,00
2. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Kebebasan Berpendapat</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	100,00
2. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Kebebasan Berkeyakinan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3. Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100,00	100,00



4.	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00	100,00
5.	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Kebebasan dari Diskriminasi</b>		<b>100,00</b>	<b>86,97</b>	<b>100,00</b>
6.	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00
7.	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya	100,00	53,13	100,00
8.	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00
<b>ASPEK: II. HAK-HAK POLITIK</b>		<b>68,45</b>	<b>72,23</b>	<b>70,85</b>
<b>Variabel: Hak Memilih dan Dipilih</b>		<b>77,30</b>	<b>82,62</b>	<b>82,62</b>
9.	Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	82,69	96,15	96,15
10.	1Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	97,77	97,77
11.	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	86,07	83,38	83,38
12.	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	74,80	83,70	83,70
13.	Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD (kabupaten/kota)	40,00	40,00	40,00
<b>Variabel: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan</b>		<b>59,60</b>	<b>61,83</b>	<b>59,08</b>
14.	Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	89,47	100,00	100,00
15.	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	29,72	23,67	18,17
<b>ASPEK: III. LEMBAGA DEMOKRASI</b>		<b>74,49</b>	<b>86,02</b>	<b>93,65</b>
<b>Variabel: Pemilu yang Bebas dan Adil</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

16.	Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00	100,00
17.	Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Peran DPRD</b>		<b>79,27</b>	<b>66,56</b>	<b>82,34</b>
18.	Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan thd total APBD	100,00	100,00	100,00
19.	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	85,71	0,00	80,00
20.	Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0,00	3,57	21,43
<b>Variabel: Peran Partai Politik</b>		<b>48,57</b>	<b>74,29</b>	<b>100,00</b>
21.	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	42,86	71,43	100,00
22.	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00	100,00
<b>Variabel: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah</b>		<b>50,22</b>	<b>89,75</b>	<b>87,34</b>
23.	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	100,00	97,37	92,11
24.	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	83,33	83,33
<b>Variabel Peran Peradilan yang Independen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
25.	Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	100,00
26.	Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	100,00

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2020 memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan khususnya sektor Politik, Pemerintahan, dan Sosial Masyarakat. Buku data IDI Kota Blitar Tahun 2020 ini menyediakan data dan analisis atas berbagai permasalahan politik, pemerintahan, hukum dan sosial yang muncul di Kota Blitar sepanjang tahun 2020.

Dengan ketersediaan data dan analisis ini, pemerintah Kota Blitar dapat mengatasi tantangan untuk peningkatan kinerja demokrasi di Kota Blitar pada tahun berikutnya. Buku ini dapat memberikan prediksi dan antisipasi, melalui program dan kebijakan politik yang sinergis antara para pihak sebagai pemangku kepentingan dalam Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar.

Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2020 ini merupakan *outcome* dari kegiatan Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2020. Tim penyusun sangat mengharapkan masukan dan saran demi sempurnanya pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Buku Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar Tahun 2020 ini merupakan gabungan antara Laporan Akhir Penyusunan Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2020 dengan hasil penghitungan skor Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2020. Pada proses penghitungan, telah melibatkan unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Pokja IDI Provinsi Jawa Timur, Pokja IDI Kota Blitar dan Tim Konsultan IDI Kota Blitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bealey, Frank. 2000. *The Blackwell Dictionary of Political Science* (Blackwell Publishers Ltd)
- Bollen, Kenneth. 1993. "Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross-National Measures", *American Journal of Political Science* 37(4): 1207-1230.
- BPS Kota Blitar, *Kota Blitar dalam Angka 2018*.
- BPS Kota Blitar, *Statistik Kota Blitar Tahun 2019*.
- Case, William. 2002. *Politics in Southeast Asia: Democracy or less*. Routledge, pp. 1-28 ("Comparing politics in Southeast Asia").
- Coppedge, Michael and Wolfgang Reinicke . 1990. "Measuring Polyarchy", *Studies in Comparative International Development* 25(1): 51-72.
- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy*. New Haven & London: Yale University Press.
- Gastil, John. 1993. *Democracy in Small Groups: Participation, Decision Making, and Communication.*, (2nd.ed.2014). Philadelphia: New Society Publishers.

### Referensi Peraturan Perundangan:

1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

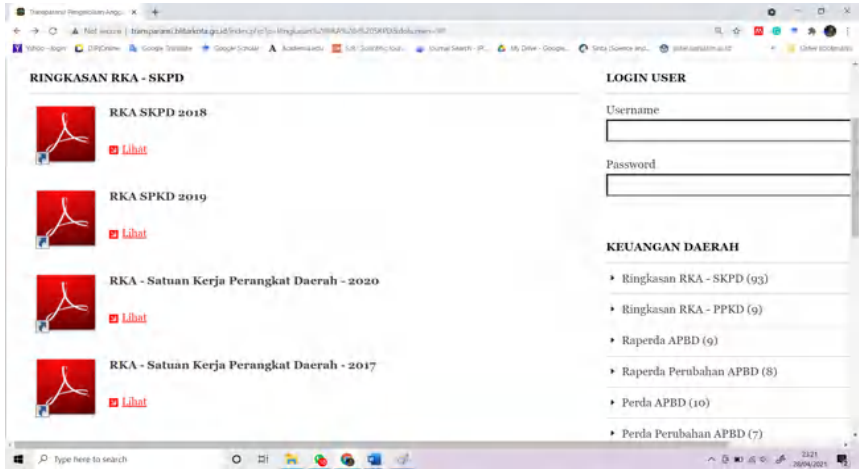
7. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 22 LN No. 97 Tahun 1997 TLN No. 3698.
8. Undang-Undang tentang Narkotika Indonesia, UU No. 35 LN No. 143 Tahun 2009 TLN No. 5062.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
12. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



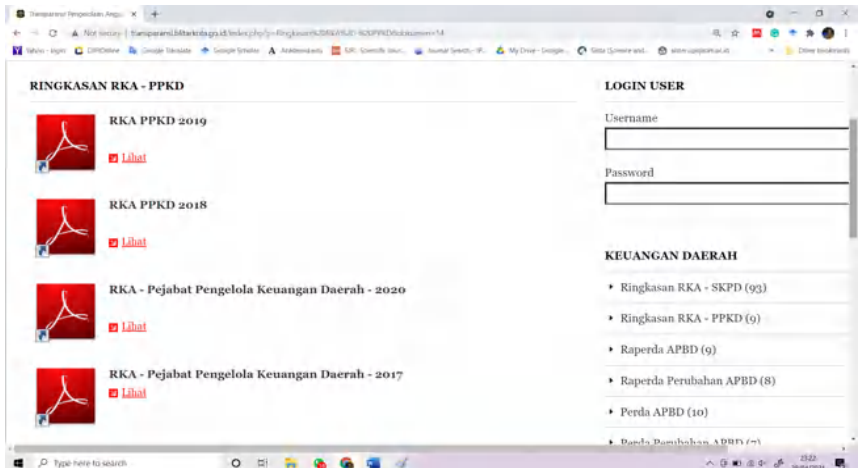
## Lampiran 2: INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

### POIN-POIN WAJIB UNGGAH DALAM LAMAN TRANSPARANSI KOTA BLITAR TAHUN 2020

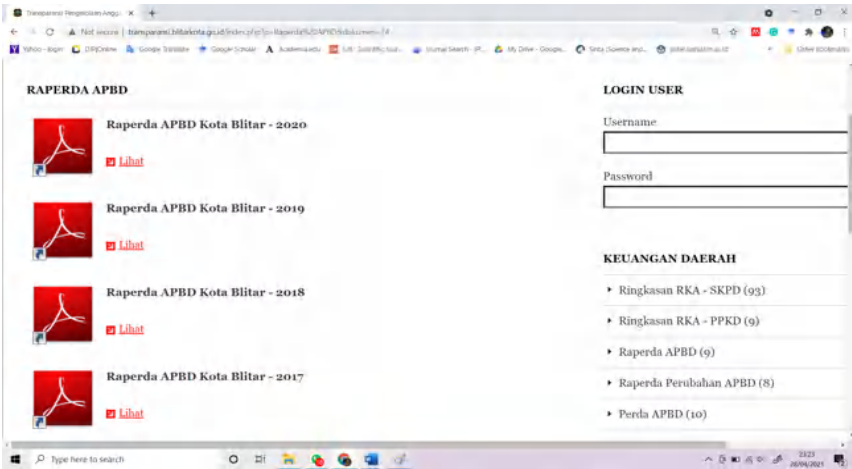
#### 1. Ringkasan RKA SKPD 2020 (Sudah)



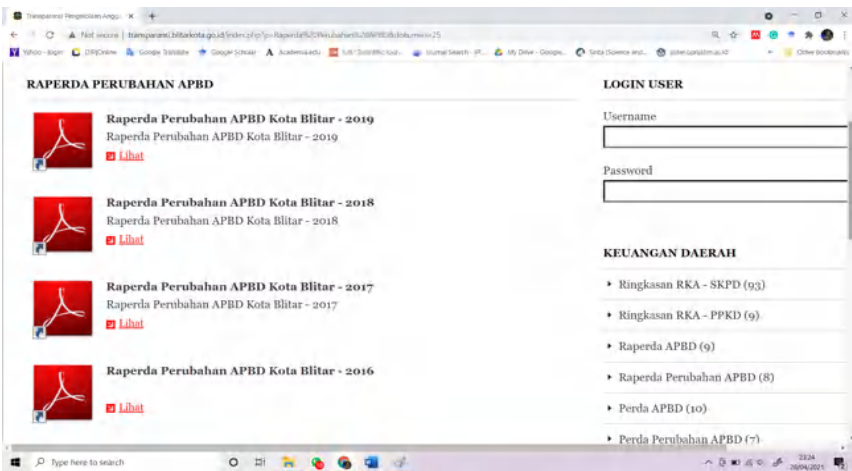
#### 2. Ringkasan RKA PPD 2020 (Sudah)



### 3. RAPERDA APBD Kota Blitar 2020 (Sudah)



### 4. RAPERDA PERUBAHAN APBD KOTA BLITAR TAHUN 2020 (Belum Unggah)





## 5. PERDA APBD KOTA BLITAR TAHUN 2020 (Belum Unggah)

**RAPERDA APBD**

- Raperda APBD Kota Blitar - 2020**  
[Lihat](#)
- Raperda APBD Kota Blitar - 2019**  
[Lihat](#)
- Raperda APBD Kota Blitar - 2018**  
[Lihat](#)
- Raperda APBD Kota Blitar - 2017**  
[Lihat](#)

**LOGIN USER**

Username

Password

**KEUANGAN DAERAH**

- ▶ Ringkasan RKA - SKPD (93)
- ▶ Ringkasan RKA - PPKD (9)
- ▶ Raperda APBD (9)
- ▶ Raperda Perubahan APBD (8)
- ▶ Perda APBD (10)

## 6. PERDA PERUBAHAN APBD KOTA BLITAR TAHUN 2020 (Belum Unggah)

**PERDA PERUBAHAN APBD**

- Perda Perubahan APBD Kota Blitar - 2019**  
Perda No. 4 Tahun 2019  
[Lihat](#)
- Perda Perubahan APBD Kota Blitar - 2018**  
Perda No. 4 Tahun 2018  
[Lihat](#)
- Perda Perubahan APBD Kota Blitar - 2016**  
Perda No. 3 Tahun 2016  
[Lihat](#)
- Perda Perubahan APBD Kota Blitar - 2015**  
Perda No. 6 Tahun 2015  
[Lihat](#)

**LOGIN USER**

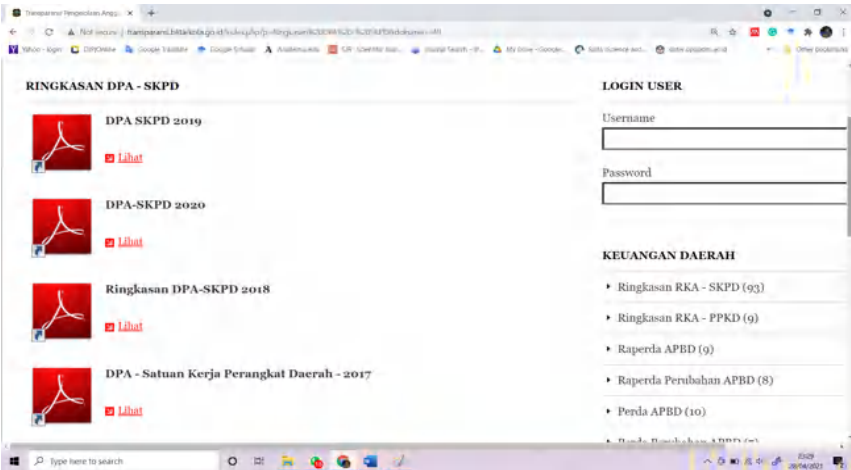
Username

Password

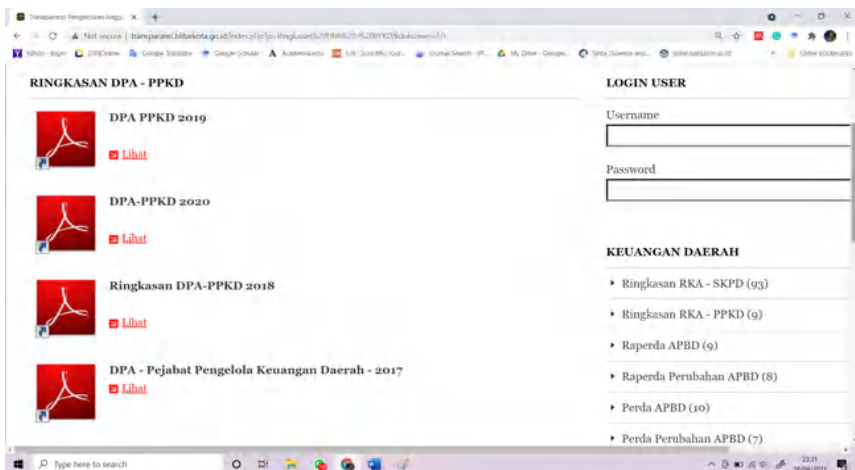
**KEUANGAN DAERAH**

- ▶ Ringkasan RKA - SKPD (93)
- ▶ Ringkasan RKA - PPKD (9)
- ▶ Raperda APBD (9)
- ▶ Raperda Perubahan APBD (8)
- ▶ Perda APBD (10)
- ▶ Perda Perubahan APBD (7)

## 7. RINGKASAN DPA SKPD KOTA BLITAR TAHUN 2020 (Sudah)



## 8. RINGKASAN DPA PPKD KOTA BLITAR TAHUN 2020 (Sudah)



## 9. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TELAH DI AUDIT TAHUN 2020 (Sudah, perbaiki nama file)

The screenshot shows a web browser window displaying a portal for regional government financial reports. The page is titled "LAP. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TELAH DIAUDIT". On the left, there are four report entries, each with a PDF icon and a "Lihat" link:

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Anggaran dan Realisasi Penanggulangan Covid-19
- Laporan Operasional Audited 2019
- Laporan Arus Kas Audited Kota Blitar 2019

On the right side, there is a "LOGIN USER" section with fields for "Username" and "Password". Below that is a "KEUANGAN DAERAH" section with a list of reports:

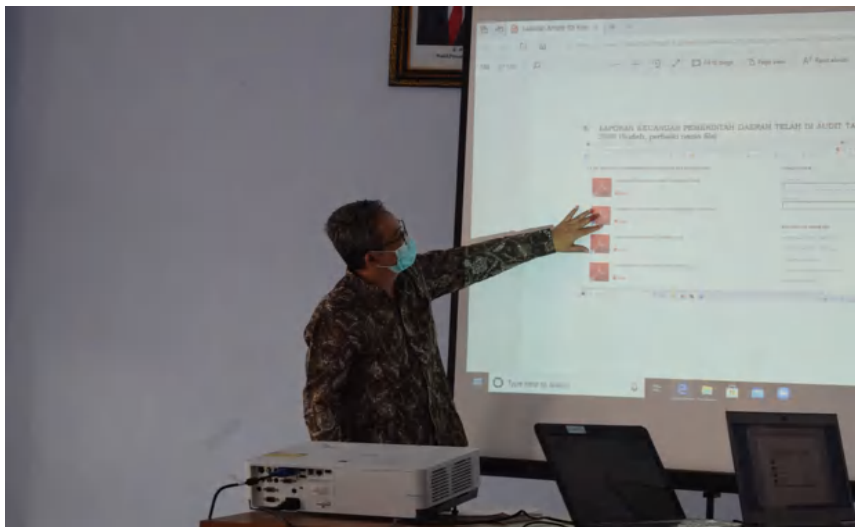
- Ringkasan RKA - SKPD (93)
- Ringkasan RKA - PPKD (9)
- Raperda APBD (9)
- Raperda Perubahan APBD (8)
- Perda APBD (10)
- Denda Pembiayaan APBD (7)

The browser's address bar shows a URL starting with "http://www.diponegoro.go.id". The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 13:52 on 10/10/2021.

Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan











REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202136256, 2 Agustus 2021

## Pencipta

Nama : **Zainal Abidin Achmad, Endah Siswati dkk**  
Alamat : Jl. Wiguna Tengah 9/31-33, RT/RW 004/003, Kel/Desa Gunung Anyar  
Tambak, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, JAWA TIMUR, 60294  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM UPN VETERAN JAWA TIMUR**  
Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, JAWA TIMUR,  
60294

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KOTA BLITAR  
TAHUN 2020**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 30 Juli 2021, di Blitar  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali  
dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000263116

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Zainal Abidin Achmad	Jl. Wiguna Tengah 9/31-33, RT/RW 004/003, Kel/Desa Gunung Anyar Tambak, Kcc. Gunung Anyar
2	Endah Siswati	Puri Nirwana Gajayana Kav.17, RT/RW 010/002, Kel/Desa Dinoyo, Kcc. Lowokwaru
3	Agus Wahyudi	Jl. Soekarno Hatta Gang Langsep, RT/RW 012/005, Kel/Desa Kelutan, Kec. Trenggalek
4	Syifa Syarifah Alamiyah	Pondok Wiguna Regency II/3, RT/RW: 016/004, Kel/Desa Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar
5	Juwito	Jl. Medokan Sawah 68, RT/RW: 001/001, Kel/Desa: Medokan Ayu, Kecamatan: Rungkut

